

Laporan Riset Kebijakan

Transformasi Struktural dan
Perangkap Pendapatan Menengah:
Menelaah Proses Pembangunan
di Indonesia Menuju 2030



Laporan Riset Kebijakan

Transformasi Struktural dan
Perangkap Pendapatan Menengah:
Menelaah Proses Pembangunan
di Indonesia Menuju 2030



Laporan Riset Kebijakan

Transformasi Struktural dan Perangkap Pendapatan Menengah:
Menelaah Proses Pembangunan di Indonesia Menuju 2030

Penulis:

Mohammad Arsjad Anwar, Soekarno Wirokartono, Kiki Verico, Vid Adrison,
Dendi Ramdani, Jahen Fachrul Rezki, I Kadek Dian Sutrisna Artha,
Riatu Mariatul Qibthiyah, Abdul Malik, Diaz Erlangga





Abstraksi

Salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah agar Indonesia bisa keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah pada 2030. Perangkap negara berpendapatan menengah didefinisikan sebagai stagnasi pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan suatu negara pada tingkat pendapatan tersebut.

Studi ini meninjau karakteristik dan indikator makro untuk mengeksplorasi berbagai kondisi transformasi struktural dan mengidentifikasi kebijakan yang perlu diambil untuk menghindari perangkap negara berpendapatan menengah.

Kata Pengantar

Ketika suatu negara beranjak menuju negara maju, sumber daya yang tersedia jamaknya akan beralih dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Namun, sejarah menunjukkan bahwa transformasi struktural tidak selalu berjalan mulus atau seragam. Dalam proses transisi dari negara berpendapatan menengah ke negara berpenghasilan tinggi, banyak negara terjebak dalam perangkap pendapatan menengah. Dalam beberapa dekade terakhir hanya dua negara yang kerap disebut berhasil melaluinya, yaitu Finlandia dan Korea Selatan. Untuk beranjak dari status negara berpenghasilan menengah ke negara berpenghasilan tinggi ternyata bukan hal mudah. Ini fakta yang memprihatinkan karena kemiskinan dan pengangguran berarti belum bisa ditanggulangi.

Pengamatan dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tergantung kepada ekonomi berbasis sumber daya ketimbang inovasi. Ini memunculkan anggapan bahwa jika tren tersebut berlanjut, Indonesia akan terjebak dalam perangkap pendapatan menengah. Selain itu, jika ingin beralih status menjadi negara berpenghasilan tinggi, kontribusi industri berat (kimia, mesin, dan transportasi) diprediksi akan jadi lebih besar ketimbang industri ringan (pengolahan makanan, tekstil, dan mebel). Semakin tinggi sumbangan industri berat dalam perekonomian, semakin rendah ketergantungan pada impor barang modal. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah mengambil tindakan untuk menghindari perangkap pendapatan menengah. Indonesia mungkin membutuhkan waktu 25 tahun lagi sebelum benar-benar siap naik status jadi negara maju. Namun, selang waktu antara proses pembangunan dan dampak yang dirasakan bisa sangat lama. Sebab itu, tindakan tepat harus segera diambil.

Dalam kerangka di atas, tujuan kajian kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan proses transformasi struktural Indonesia dengan berfokus pada transformasi di bidang industri dan perdagangan internasional.
2. Untuk menjelaskan transformasi struktural dalam demografi dengan menggunakan proyeksi masa depan dari pemerintah dan lembaga lain.
3. Untuk menguraikan arah transformasi struktural dalam dekade berikutnya (dua perspektif pembangunan jangka menengah).
4. Untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia dan merekomendasikan kebijakan untuk menghindari perangkap pendapatan menengah.

Ucapan Terima Kasih

Kajian mengenai “**Transformasi Struktural dan Perangkap Pendapatan Menengah: Menelaah Proses Pembangunan di Indonesia Menuju 2030**” disusun oleh tim peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI) dengan ketua tim Prof. Dr. Mohammad Arsjad Anwar. Laporan kajian ini terdiri dari enam bab yang disusun dari kontribusi tulisan dengan arahan dan diskusi dengan ketua tim. Adapun kontributor setiap bab adalah sebagai berikut:

- Bab 1. Pendahuluan (Soekarno Wirokartono)
- Bab 2. Proses Akumulasi dan Transformasi Struktural (Kiki Verico)
- Bab 3. Proses dan Perkembangan Industrialisasi (Vid Adrison dan Dendi Ramdani)
- Bab 4. Perdagangan Internasional dan Kebijakan Makroekonomi (Jahen Fachrul Rezki dan I Kadek Dian Sutrisna Artha)
- Bab 5. Ketenagakerjaan dan Kependudukan (Riatu Mariatul Qibthiyah)
- Bab 6. Rekomendasi Kebijakan: Peta Jalan Keluar dari Perangkap Pendapatan Menengah (Abdul Malik, Kiki Verico, Dendi Ramdani, Jahen Fachrul Rezki, Riatu Mariatul Qibthiyah, dan Diaz Erlangga)

Kajian ini merupakan masukan yang dapat digunakan sebagai identifikasi awal kondisi untuk menentukan arah kebijakan perencanaan jangka menengah. Dengan selesainya kajian ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dedi MM Riyadi dari Knowledge Sector Initiative, RTI International dan DFAT untuk pendanaan kajian, serta PAT Bappenas untuk fasilitas dan arahan kajian ini.

Masukan dan arahan dari pengulas sangat membantu untuk menyelesaikan dan memperbaiki laporan ini. Untuk itu, kami berterimakasih kepada PAT Bappenas, kolega internal di LPEM dan FEB UI, yaitu Bapak Maddaremmeng A. Panennungi, Bapak Dendi Ramdani, dan Ibu Diahhadi Setyonaluri. Apresiasi yang tinggi juga kami sampaikan kepada asisten peneliti LPEM-FEB UI yang tergabung di tim kajian, yakni Yusuf Sofiyandi dan Ita Alvionita, atas dukungan dalam mengumpulkan dan mengolah data guna penyusunan laporan ini.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu mempersiapkan kajian, administrasi, dan memberikan masukan untuk penyusunan laporan ini, baik di LPEM-FEB UI maupun di KSI-Bappenas, terutama untuk Saudari Mirisa Hasfaria.

Jakarta, 20 Januari 2015

I Kadek Dian Sutrisna Artha
Kepala LPEM-FEB UI

Daftar Isi

Abstraksi	iii
Kata Pengantar	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	xi
Singkatan Dan Akronim	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Perekonomian Global	1
1.2. Pertumbuhan Ekonomi	4
1.3. Ketahanan Ekonomi.....	4
1.4. Kecepatan dalam Pemulihan Ekonomi	5
BAB 2. PROSES AKUMULASI DAN TRANSFORMASI STRUKTURAL	7
2.1. Gambaran Ekonomi Makro Terkait Akumulasi	8
2.2. Gambaran Efisiensi Investasi dari Perbandingan Nilai Tambah dan Input Produksi (ICOR/Incremental Capital Output Ratio).....	10
2.3. Akumulasi Tabungan Nasional.....	11
2.4. Anggaran Pemerintah untuk Mendukung Proses Akumulasi	12
2.5. Akumulasi Investasi Asing Jangka Panjang (FDI Inflows)	13
2.6. Akumulasi Sumber Daya Manusia (SDM).....	14
BAB 3. PROSES DAN PERKEMBANGAN INDUSTRIALISASI	19
3.1. Pola Umum Transformasi Industri.....	19
3.2. Pergeseran Struktur Industri Manufaktur	20
3.3. Pulau Jawa Jenuh dan Ketimpangan Jawa-Luar Jawa Melebar	22
3.4. Alokasi Sumber Daya.....	23
3.4.1. Pertanian	25
3.4.2. Industri Pengolahan.....	25
BAB 4. PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN MAKROEKONOMI	28
4.1. Gambaran Umum Perdagangan Internasional di Indonesia	28
4.2. Ekspor dan Impor Komoditas Pertanian	30

4.3.	Ekspor dan Impor Sektor Manufaktur	31
4.4.	Ekspor dan Impor Sumber Daya Alam.....	33
4.5.	Kebijakan Perdagangan dan Industrialisasi	34
4.6.	Reformasi Kebijakan Perdagangan	35
BAB 5.	KETENAGAKERJAAN DAN KEPENDUDUKAN.....	37
5.1.	Modal Manusia dan Pembangunan	37
5.2.	Profil Demografi dan Potensinya.....	38
5.3.	Profil Ketenagakerjaan.....	40
5.4.	Penyerapan Tenaga Kerja: Perkembangan ke Aktivitas Formal	42
5.5.	Produktivitas Tenaga Kerja: Investasi dan Kebijakan di Bidang Pendidikan	43
BAB 6.	REKOMENDASI KEBIJAKAN: PETA JALAN KELUAR DARI PERANGKAP PENDAPATAN MENENGAH	45
6.1.	Transformasi Struktural: Solusi Menghindari Perangkap Pendapatan Menengah	45
6.2.	Pola Transformasi: Pengalaman Negara-negara Lain	46
6.3.	Tantangan 10-20 Tahun ke Depan: Pilihan dan Fokus Kebijakan dalam Konteks Transformasi Struktural	47
6.3.1.	Proses Akumulasi Pembentukan Modal.....	47
6.3.2.	Proses dan Perkembangan Industrialisasi	48
6.3.3.	Perdagangan Internasional dan Kebijakan Makroekonomi	49
6.3.4.	Profil Ketenagakerjaan dan Arah Kebijakan ke Depan.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....		52
LAMPIRAN.....		54
RIWAYAT PENULIS		115



Daftar Tabel

Tabel 1.1	PNB per Kapita Negara Terpilih 1984-1998 (US\$).....	86
Tabel 1.2	PNP per Kapita Negara Terpilih 2000-2012 (US\$).....	87
Tabel 1.3	PNB per Kapita (US\$) dan Pertumbuhan Rata-rata PNB per Kapita (%) Negara Terpilih 1984-1995.....	88
Tabel 1.4	Investasi Langsung Luar Negeri, PMTDB Negara 2000-2010 (Miliar US\$ dan % PDB).....	89
Tabel 1.5	Jumlah Peneliti per Satu Juta Penduduk, Jumlah Artikel Jurnal Teknis dan Ilmiah, Pengeluaran Riset (% dari PDB 1987-2009).....	90
Tabel 1.6	Struktur PDB Negara Terpilih 1965-2010 (% dari PDB).....	91
Tabel 2.1	PDB Indonesia Menurut Pengeluaran Berdasarkan Harga Berlaku (Triliun Rupiah) 2004 - 2013.....	92
Tabel 2.2	PDB Indonesia Menurut Pengeluaran Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (Triliun Rupiah) pada 2004-2013.....	93
Tabel 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Sektor 2001-2013.....	94
Tabel 2.4	Laju Inflasi Indonesia Menurut Sektor (Perubahan Deflator) 2001-2013.....	95
Tabel 2.5	Defisit Neraca Transaksi Berjalan (CAB) per PDB Harga Berlaku (%) 2004-2014.....	96
Tabel 2.6	Proporsi Ekonomi Menurut Sektor Harga Berlaku (%) 2004-2013.....	97
Tabel 2.7	Proporsi Ekonomi Menurut Pengeluaran Harga Berlaku (%) 2004-2013.....	98
Tabel 2.8	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Harga Konstan (%) 2005-2013.....	99
Tabel 2.9	PMTDB dan PDB Indonesia Berdasarkan Harga Berlaku (Triliun Rupiah) dan Persentase PMTDB/PDB 2001-2013.....	100
Tabel 2.10	ICOR Indonesia Berdasarkan PDB Harga Konstan (Miliar Rupiah) 2000-2012.....	100
Tabel 2.11	Gross National Saving per PDB Harga Berlaku (%) 2005-2012.....	100
Tabel 2.12	Deposito (M2-M1) per PDB (%) 2001-2013.....	101
Tabel 2.13	Suku Bunga Deposito 6 Bulan (%) 2001-2014 (September).....	101
Tabel 2.14	Defisit APBN per PDB Harga Berlaku (%) 2005-2013.....	102
Tabel 2.15	Proporsi Belanja Modal APBN per PDB Harga Berlaku (%) 2005-2012.....	102
Tabel 2.16	Proporsi Pengeluaran APBN per PDB Harga Berlaku untuk Infrastruktur (%) 2004-2013 (Proksi Pengeluaran Modal Kementerian PU).....	102
Tabel 2.17	Proporsi Penerimaan Pajak APBN per PDB Harga Berlaku (%) 2001-2013.....	103
Tabel 2.18	Proporsi Penerimaan Nonpajak APBN per PDB Harga Berlaku (%) 2000-2013.....	103
Tabel 2.19	Proporsi PMA (FDI Inflows) per PDB 2004-2012.....	103
Tabel 2.20	PNP per Kapita dan Proporsi FDI per GDGF 2004 dan 2010.....	104

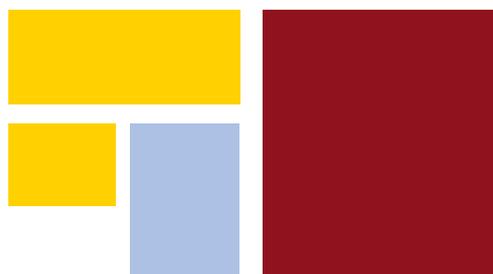
Tabel 2.21	Proporsi Pengeluaran APBN per PDB Harga Berlaku untuk Bidang Pendidikan dan Kesehatan (%) 2000-2012.....	105
Tabel 2.22	Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia (%) 2001-2012	105
Tabel 2.23	Angka Melek Huruf di Indonesia (%) 2001-2012.....	106
Tabel 2.24	Angka Harapan Hidup di Indonesia (Tahun) 2001-2012	106
Tabel 2.25	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan (%) 2001-2013.....	107
Tabel 2.26	Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 100 Orang Laki-laki Menurut Tingkat Pendidikan yang Sama 2004-2013	107
Tabel 2.27	Proporsi Tingkat Pendidikan Menurut Jenis Kelamin dan Kota dan Desa 2001, 2007 dan 2013.....	108
Tabel 2.28	PDB per Kapita dalam Rupiah dan US\$ 2004-2013	109
Tabel 2.29	HDI Indonesia Dibandingkan dengan HDI Negara ASEAN+6.....	109
Tabel 2.30	Proporsi Pengeluaran untuk Riset terhadap PDB (%) Indonesia dan Negara Terpilih 2001-2012	110
Tabel 2.31	Jumlah Peneliti per Satu Juta Penduduk Indonesia dan Negara Terpilih 2001-2012.....	111
Tabel 2.32	Jumlah Publikasi Jurnal Ilmiah Internasional Indonesia dan Negara Terpilih 2001-2012.....	112
Tabel 2.33	Upah Nominal 2001-2013 (Rupiah).....	113
Tabel 2.34	Upah Riil (Produktivitas) dan Upah Nominal 2001-2013 (Rupiah)	113
Tabel 3.1	Pertumbuhan PDB Negara Terpilih Terinci Menurut Lapangan Usaha Besar 1980-2010 (%).....	114
Tabel 3.2	Selisih Pertumbuhan Sektoral dengan Pertumbuhan PDB Negara Terpilih 1980-2010 (%).....	115
Tabel 3.3	Struktur PDB Indonesia Terinci Menurut Pulau 2000-2013 (%)	116
Tabel 3.4	Struktur PDB Indonesia Terinci Menurut Lapangan Usaha dan Pulau (%)	117
Tabel 3.5	Perkembangan Panjang Jalan (Km) Terinci Menurut Pulau/Kelompok Pulau dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan 2000-2012	119
Tabel 3.6	Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Terinci Menurut Pulau 2010-2013.....	119
Tabel 3.7	Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Terinci Menurut Lapangan Usaha 2010-2013	119
Tabel 3.8	Tingkat Pendidikan Tertinggi Tenaga Kerja Berdasarkan Pulau 2001 dan 2013....	121
Tabel 3.9	Struktur Produksi Tanaman Bahan Pangan Terinci Menurut Pulau (%).....	122
Tabel 4.1	Ekspor-Impor Kelompok Komoditas Indonesia (Juta US\$)	123
Tabel 4.2	Ekspor-Impor Kelompok Komoditas Tanaman Bahan Makanan (Juta US\$).....	124
Tabel 4.3	Ekspor-Impor Kelompok Komoditas Hasil Peternakan (Juta US\$)	124
Tabel 4.4	Ekspor-Impor Kelompok Komoditas Barang Kimia (Juta US\$)	125

Tabel 4.5	Ekspor-Impor Kelompok Komoditas Hasil Industri Menurut Bahan Baku (Juta US\$)	125
Tabel 4.6	Ekspor-Impor Kelompok Komoditas Barang Manufaktur (Juta US\$)	126
Tabel 4.7	Ekspor-Impor Kelompok Komoditas Mesin dan Alat Pengangkutan (Juta US\$)....	126
Tabel 4.8	Ekspor-Impor Kelompok Komoditas Hasil Industri Lainnya (Juta US\$)	127
Tabel 5.1	Angka Ketergantungan dan Persentase Penduduk Bekerja di Usia Produktif (15-64 Tahun) dan Nonproduktif (65 Tahun dan Lebih) 2001 dan 2013	128
Tabel 5.2	Proyeksi Jumlah Penduduk Terinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2000-2025 (A)- 2015 (B) Terinci	128
Tabel 5.3	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Kepadatan Berdasarkan Pulau 2001 dan 2013.....	129
Tabel 5.4	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Kepadatan Berdasarkan Provinsi 2001 dan 2013.....	130
Tabel 5.5	Persentase Penduduk Bekerja dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan	131
Tabel 5.6	Nilai Upah Rata-rata Pekerja (Rupiah) Berdasarkan Lapangan Pekerjaan 2001-2012.....	131
Tabel 5.7	Tamatan Pendidikan Penduduk Bekerja di Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Sektor Lainnya (%)	132
Tabel 5.8	Perkembangan Struktur Penduduk Berumur 15 Tahun, Terinci Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin, Kota dan Desa, Sakernas Agustus 2001-Agustus 2013	133
Tabel 5.9	Perkembangan Struktur Jumlah Penduduk yang Bekerja Selama Seminggu, Terinci Menurut Lapangan dan Status Pekerjaan Utama, Jenis Kelamin, Kota dan Desa, Sakernas Agustus 2001-Agustus 2013.....	135
Tabel 5.10	Perkembangan Struktur Jumlah Penduduk dan Penduduk Berumur 15 Tahun/ Lebih Menurut Jenis Kelamin, Kota dan Desa, Sakernas Agustus 2009-2013	136
Tabel 5.11	Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Pulau 2001-2013.....	137
Tabel 5.12	Perkembangan Struktur Jumlah Penduduk yang Bekerja Selama Seminggu, Terinci Menurut Lapangan dan Jenis Pekerjaan Utama, Sakernas Agustus 2001-Agustus 2013	138
Tabel 5.13	Populasi Perempuan, Tingkat Upah, dan Status Informalitas dari Pekerja Perempuan	139
Tabel 5.14	Perkembangan Struktur Jumlah Penduduk yang Bekerja Selama Seminggu, Terinci Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama, Sakernas Agustus 2001-Agustus 2013	140
Tabel 5.15	Persentase Pekerja Berdasarkan Tamatan Pendidikan dan Kelompok Pulau 2001-2013	141
Tabel 5.16	Persentase Pekerja Berdasarkan Pulau dan Lapangan Pekerjaan 2001-2013	142

Tabel 5.17	Penduduk Berdasarkan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki per Pulau (2004, 2007, 2010, 2013)	144
Tabel 5.18	Angka Partisipasi Murni SD, SMP, SMA (%)	147
Kotak 5.1	Data Sakernas: Sebuah Catatan.....	149

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Struktur PDB Indonesia Terinci Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000, 2002-2012 (%).....	32
Gambar 3.2	Selisih Struktur PDB Indonesia Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (%)	33
Gambar 3.3	Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDB Berdasarkan Harga Konstan, Terinci Menurut Subsektor, 2002-2012 (%).....	34
Gambar 3.4	Selisih Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDB Berdasarkan Harga Berlaku dan Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000, Terinci Menurut Subsektor, 2002-2012 (%)	35
Gambar 5.1	Tren Jumlah Penduduk Menurut Usia: Asia Tenggara dan Indonesia.....	62
Gambar 5.2	Persentase Pengangguran Terbuka dan Persentase Pekerja dengan Jam Kerja Kurang dari 35 Jam	66



Singkatan dan Akronim

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BPS	: Badan Pusat Statistik
BLU	: Badan Layanan Umum
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CAB	: Current Account Balance
D-1	: Diploma I
D-3	: Diploma III
D-4	: Diploma IV
DD	: Domestic Demand
FDI	: Foreign Direct Investment
GDCF	: Gross Domestic Capital Formation
GNI	: Gross National Income
GNS	: Gross National Saving
HDI	: Human Development Index
HB	: Harga Berlaku
HK	: Harga Konstan
ICOR	: Incremental Capital Output Ratio
IMF	: International Monetary Fund
ISIC	: International Standard Industrial Classification
LoI	: Letter of Intent
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDB	: Pembentukan Modal Domestik Bruto
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMTDB	: Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
PNB	: Produk Nasional Bruto
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak

PNP	: Pendapatan Nasional Penduduk
PPP	: Purchasing Power Parity
PPh	: Pajak Penghasilan
PPn	: Pajak Penjualan
PPNBM	: Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah
S-1	: Sarjana
S-3	: Doktor
Sakernas	: Survei Angkatan Tenaga Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SITC	: Standard International Trade Classification
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UNESCO	: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization



Pendahuluan

Lazimnya, *middle-income trap* atau perangkap pendapatan menengah diasosiasikan dengan kegagalan suatu negara untuk naik peringkat dari pendapatan menengah ke level berpenghasilan tinggi. Setidaknya terdapat tiga karakteristik yang membedakan negara yang berhasil dengan yang gagal naik peringkat—dari pendapatan menengah bawah ke menengah atas, dan dari menengah atas ke negara berpendapatan tinggi. Pengamatan terhadap 28 negara menunjukkan bahwa ketiga karakteristik tersebut meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, ketahanan ekonomi, dan kecepatan dalam pemulihan ekonomi.

Kedua puluh delapan negara tersebut dipilih berdasarkan sejumlah kriteria. Di antaranya, berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa, tersebar di berbagai belahan dunia, mewakili negara maju dan negara berkembang, dan mewakili negara yang berhasil dan negara yang gagal naik peringkat kelas pendapatan. Mereka adalah 17 negara berpendapatan tinggi—yang terdiri dari delapan negara yang sudah lama maju, empat negara berpendapatan tinggi dalam periode 1987-1998 (Spanyol, Portugal, Korea Selatan, dan Yunani), dan lima negara berpendapatan tinggi dalam kurun 2000-2012 (Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Chili, dan Rusia). Sisanya, sebelas negara tak berpendapatan tinggi, yakni tiga negara di Amerika Latin (Argentina, Meksiko dan Brazil) dan tujuh negara Asia (Vietnam,

Filipina, Thailand, Malaysia, India, Indonesia, dan Turki). Negara berpenghasilan besar dimasukkan dalam studi ini untuk melihat proses mereka menuju negara berpendapatan tinggi.

Selanjutnya, ulasan dibagi menjadi dua bagian, yaitu perekonomian global (yang meliputi 27 negara) dan perekonomian Indonesia. Masing-masing bagian membahas tiga topik, yaitu pertumbuhan ekonomi, ketahanan ekonomi, dan kecepatan dalam pemulihan ekonomi. Untuk memperoleh kesimpulan yang jelas, uraian dalam perekonomian global dibatasi pada kasus-kasus ekstrem negara yang berhasil dan sebaliknya. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, pembaca dapat melihat tabel-tabel lampiran.

1.1. PEREKONOMIAN GLOBAL

Pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang berhasil naik peringkat pendapatan dari menengah bawah ke menengah atas dan dari menengah atas ke pendapatan tinggi adalah negara yang tumbuh cukup tinggi dalam periode yang cukup panjang tanpa henti (*sustained growth*). Jangka waktu tersebut bisa mencapai dua dekade atau lebih. Di Asia, kita melihat dua contoh keberhasilan, yaitu Korea Selatan dan Cina. Korea Selatan naik tiga peringkat dari negara berpendapatan rendah ke pendapatan menengah bawah, lalu menengah atas, kemudian menjadi negara berpendapatan tinggi. Peringkat negara berpendapatan tinggi bagi

Korea Selatan dicapai pada tahun 1995 (**Tabel 1.1**). Rata-rata pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita Korea Selatan dalam periode 1970-1995 mencapai 10,4% per tahun (**Tabel 1.3**). Sementara Cina naik dua peringkat dari negara berpenghasilan rendah ke pendapatan menengah bawah, lalu ke pendapatan menengah atas. Peringkat pendapatan menengah atas dicapai pada tahun 2010 (**Tabel 1.2**). Rata-rata pertumbuhan PNB per kapita Cina untuk kurun waktu 1970-1995 adalah 6,9% per tahun (**Tabel 1.3**). Tiga negara Amerika Latin—Argentina dan Brazil yang sejak dekade 1980-an sudah berada di level pendapatan menengah atas, serta Meksiko yang sejak dekade 1990-an mencapai peringkat pendapatan menengah atas—tidak pernah berhasil naik peringkat menjadi negara berpenghasilan tinggi (**Tabel 1.1** dan **Tabel 1.2**). Rata-rata pertumbuhan PNB per kapita per tahun pada periode 1970-1995 untuk Argentina, Brazil, dan Meksiko di bawah 1,0% (**Tabel 1.3**).

Apabila diamati lebih jauh, transformasi ekonomi (proses akumulasi dan proses alokasi sumber daya) di negara-negara yang berhasil tersebut berjalan dengan lancar. Pertama, proses akumulasi berjalan cukup cepat. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) dan kualitas tenaga kerja naik pesat didukung oleh tingkat tabungan yang juga meningkat cepat. Korea Selatan dan Cina merupakan dua contoh negara dengan proses akumulasi yang mengagumkan. Penanaman modal di Korea Selatan menjelang tahun 1995 mencapai sekitar 35% Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu di Cina, penanaman modal menjelang tahun 2000 mencapai 38%, bahkan dewasa ini mencapai 48%. Bandingkan tingkat pembentukan modal tersebut dengan di Argentina dan Brazil yang rata-rata sekitar 20%, dan Meksiko yang di bawah 25% (**Tabel 1.4**).

Di bidang sumber daya manusia, kinerja (asupan atau hasil) antara lain dapat dilihat dari jumlah peneliti pada lembaga penelitian dan pengembangan per satu juta orang, jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal teknis, dan jumlah pengeluaran untuk penelitian dan

pengembangan sebagai persentase PDB. Lihatlah kinerja sumber daya manusia Korea Selatan pada tahun-tahun menjelang kenaikan tingkat pendapatan ke negara berpendapatan tinggi (2000-2005) dengan di Argentina, Brazil, dan Meksiko (**Tabel 1.5**). Adapun kinerja Cina memang masih di bawah Argentina, Brazil, dan Meksiko yang sudah lama menjadi negara berpendapatan menengah atas.

Penanaman modal yang tinggi tersebut didanai dari tabungan yang juga tinggi. Di Korea Selatan tabungan bruto mencapai 35%, sedangkan di Cina sekitar 50%. Bandingkan angka tersebut dengan tabungan di Argentina yang negatif, Brazil 15%, dan Meksiko sekitar 22%.

Kedua, proses akumulasi di atas mengubah keunggulan komparatif perekonomian dan pada gilirannya mendorong proses realokasi sumber daya ekonomi (perubahan struktur produksi dalam negeri dan perdagangan internasional). Faktor produksi (modal dan tenaga kerja) berpindah dari lapangan usaha dengan produktivitas rendah (sektor pertanian) ke yang lebih tinggi seperti sektor industri dan sektor jasa. Perlu dicatat bahwa proses industrialisasi berhenti pada saat negara mencapai status negara maju, yaitu ketika industri pengolahan sudah melewati puncaknya, yakni di atas 30% PDB, kecuali di Korea Selatan. Transformasi juga terjadi di industri pengolahan, dari industri ringan ke industri berat (**Tabel 1.6**). Realokasi sumber daya ekonomi inilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi. Dalam contoh di atas, yaitu di Korea Selatan dan Cina, proses realokasi sumber daya ekonomi berjalan cepat. Di Cina, sumbangan industri pengolahan pada 1965 mencapai 28% dan bertahan pada angka sekitar 30% pada 2010. Bandingkan keadaan tersebut dengan Argentina dan Brazil yang di atas 25% pada 1990, dan kemudian turun menjadi 21% untuk Argentina dan 16% untuk Brazil. Untuk Meksiko, angkanya bertahan pada kisaran 20% untuk kurun waktu 1965–2010.

Proses realokasi sumber daya ekonomi yang cepat di Korea Selatan dan Cina bukan

saja didorong oleh peningkatan faktor produksi (tenaga kerja dan modal), tapi juga oleh peningkatan prasarana “keras” (jalan, pelabuhan udara dan laut, listrik, telekomunikasi) dan “lunak” (kerangka peraturan, kelembagaan pasar uang, modal, dan sebagainya).

Proses akumulasi dan realokasi sumber daya ekonomi tadi mendorong proses aglomerasi—yang pada gilirannya berdampak pada urbanisasi. Proses aglomerasi ini mendorong peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan.

Seperti dijelaskan di atas, kinerja negara-negara yang gagal mengerek peringkat pendapatan pada umumnya berada di bawah negara-negara yang berhasil naik kelas. Pertumbuhannya rendah, proses akumulasi alokasi sumber daya ekonomi tidak mulus, dan prasarannya pun buruk. Di Amerika Latin, kita melihat contoh Argentina, Meksiko, dan Brazil.

Ketahanan ekonomi. Negara yang tumbuh secara berkelanjutan adalah mereka yang mempunyai ketahanan ekonomi yang tangguh. Ketahanan ekonomi tersebut tercermin dalam indikator makro seperti keuangan negara, neraca pembayaran, dan stabilitas ekonomi. Dalam kaitannya dengan ketahanan fiskal, ada dua indikator yang perlu diperhatikan, yaitu defisit dan pelunasan utang (pokok dan bunganya)—keduanya dinyatakan sebagai persentase dari PDB. Semakin besar defisit dan rentang waktunya cukup lama (seperti yang terakumulasi dalam besarnya pinjaman luar negeri), semakin rentan negara tersebut terhadap gejolak nilai tukar dan bunga pinjaman. Hampir serupa dengan fiskal, indikator ketahanan dalam neraca pembayaran adalah besarnya defisit transaksi berjalan dan Debt Service Ratio (DSR). Semakin besar dan lama suatu negara mengalami defisit, semakin besar pinjaman luar negerinya. Pada gilirannya hal itu akan menaikkan DSR.

Ketahanan ekonomi makro adalah syarat mutlak (*necessary condition*). Adapun syarat cukup (*sufficient condition*) terpenuhi apabila indikator mikronya juga sehat. Termasuk di dalamnya adalah kesehatan perbankan dan perusahaan-perusahaan. Kesehatan perbankan

tercermin antara lain dari besarnya piutang tak tertagih (*bad debt*). Sementara kesehatan perusahaan antara lain tercermin dalam keserasian (mata uang dan jatuh temponya) antara investasi dan pembiayaan. Perbandingan antara pinjaman dengan modal sendiri (*leverage*) juga tak boleh terlalu tinggi.

Karakteristik makro dan mikro penting untuk dimiliki agar perekonomian cukup tangguh menghadapi gejolak (harga komoditas, arus modal) yang akan terus datang dan pergi. Negara-negara dengan ketahanan ekonomi yang tinggi seperti Cina dan Korea Selatan akan sulit terempas oleh krisis. Sedangkan negara-negara dengan pertahanan yang lemah seperti Argentina, Brazil, dan Meksiko akan jatuh bangun melalui krisis.

Kecepatan dalam pemulihan ekonomi. Pada masa lalu, dewasa ini, dan masa depan, gejolak ekonomi selalu mengancam perekonomian global. Hampir tak ada negara yang kebal terhadap gejolak ekonomi dunia. Oleh karena itu, kunci agar perekonomian dalam negeri tidak terpuruk adalah menjaga kesehatan perekonomian. Walaupun sampai terkena krisis, perekonomian harus mampu pulih dengan cepat. Kemampuan tersebut tidak semata-mata menyangkut aspek perumusan kebijakan ekonomi. Namun, yang tidak kalah penting adalah kemampuan mencapai kesepakatan-kesepakatan politik sebagai bagian dari strategi keluar dari krisis. Korea Selatan hanya memerlukan waktu dua tahun untuk pulih menjadi negara berpenghasilan tinggi. Sementara di negara Amerika Latin dan Eropa (Yunani, Portugal, dan Spanyol) membutuhkan waktu lama untuk mencapai kesepakatan tersebut. Akibatnya, pemulihan dari krisis juga memerlukan waktu yang lama.

INDONESIA

Pembangunan ekonomi di Indonesia tumbuh cepat dalam kurun waktu 1970-1996. Transformasi struktural pun berjalan cepat. Transformasi terhenti ketika terjadi krisis ekonomi pada 1997-1999. Selanjutnya, dalam rentang 2000-2013, proses transformasi berjalan lagi

namun dengan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan sebelum krisis. IHWAL pembangunan periode 1970-1996 tidak akan dikupas lebih lanjut karena cakupan studi ini mengenai keberhasilan/kegagalan suatu negara naik peringkat dari pendapatan menengah bawah ke menengah atas dan dari menengah atas ke pendapatan tinggi—bukan dari pendapatan rendah ke pendapatan menengah bawah. Untuk Indonesia, hal ini berarti meliputi periode waktu 1997-2013.

1.2. PERTUMBUHAN EKONOMI

PNB per kapita Indonesia meningkat dari US\$ 570 pada tahun 2000 menjadi US\$ 3.420 pada 2012. Ini pertumbuhan yang cukup tinggi. Kurun waktu tersebut ditandai oleh adanya *boom* komoditas hasil pertambangan dan perkebunan. Namun, dengan memperhitungkan inflasi dan nilai tukar valuta asing, laju pertumbuhan 2000-2012 tersebut masih di bawah rata-rata laju pertumbuhan per kapita tiap tahun yang dicapai dalam kurun waktu 1970-1995, yaitu sebesar 4,7%. Laju pertumbuhan pada periode 2000–2012 memang cukup tinggi untuk mengangkat Indonesia dari keterpurukan akibat krisis ekonomi 1997/1998—yang digolongkan sebagai negara berpenghasilan menengah bawah pada tahun 2003. Namun, tak cukup cepat untuk mengantar Indonesia ke level negara berpenghasilan menengah atas, yang pada 2012 batas bawah pendapatan per kapitanya mencapai US\$ 4.086. Pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh di bawah rata-rata pertumbuhan per kapita tiap tahun Korea Selatan dan Cina yang mencapai hampir 10%. Ini mengangkat kedua negara tersebut dalam peringkat pendapatan. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih jauh di atas Argentina, Brazil, dan Meksiko yang rata-rata di bawah 1% dan gagal naik peringkat pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi yang sedang-sedang saja adalah cerminan dari proses yang melandasinya, yaitu transformasi struktural perekonomian. Sudah dapat diduga bahwa proses akumulasi, pembangunan prasarana, serta alokasi sumber daya ekonomi masih jauh

dari optimal.

Dalam proses akumulasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang pada tahun 2010 mencapai sekitar 32%, tergolong cukup tinggi. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata PMTB untuk negara-negara pendapatan menengah bawah (28%). Demikian pula dengan tingkat tabungan yang cukup bagus. Namun, diukur dari keberhasilan investasi sumber daya manusia (SDM), masih sangat mengecewakan. Ini bisa dilihat pada jumlah peneliti di lembaga penelitian dan pengembangan per satu juta orang (90), jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal teknis (262), maupun jumlah pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sebagai persentase PDB (0,08). Bandingkan angka tersebut dengan di Cina yang secara berturut-turut adalah 1.199, 74.019, dan 1,47. Capaian Indonesia bahkan masih di bawah Vietnam.

Alokasi sumber daya ekonomi juga berjalan lambat. Dalam kurun 2000–2010, sumbangan sektor pertanian turun sebesar 1%, dari 16% menjadi 15%. Sementara sumbangan sektor industri pengolahan merosot dari 28% pada tahun 2000 menjadi 25% pada 2010. Yang meningkat hanyalah sektor jasa. Tapi itu pun bukan jasa sektor formal. Produktivitas per tenaga kerja yang tinggi ada pada sektor industri dan sektor jasa formal. Perlu pula dicatat bahwa dalam kurun waktu tersebut sumbangan pertambangan minyak dan gas (migas) dan industri migas merosot sangat tajam. Dari industri nonmigas, sumbangan subsektor tekstil dan pakaian jadi juga melorot drastis.

Proses transformasi ekonomi yang lambat juga disebabkan oleh lambannya pembangunan prasarana, baik yang “keras” seperti jalan, jembatan, pelabuhan udara dan laut, listrik, serta telekomunikasi, maupun yang “lunak” seperti kerangka peraturan dan kelembagaan (pasar uang dan modal).

1.3. KETAHANAN EKONOMI

Belajar dari krisis ekonomi 1997/1998, ketahanan ekonomi Indonesia telah diperkuat. Kerangka kebijakan disusun dan dilaksanakan lebih tertib. Misalnya, defisit Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh melebihi 3% PDB. Pinjaman luar negeri pun tidak boleh lebih dari 60% PDB. Kesehatan perbankan dimonitor lebih ketat dan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk. Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) juga independen.

Walhasil, defisit APBN tidak pernah melebihi 3% PDB. Sementara pinjaman luar negeri pemerintah juga terus turun. Defisit transaksi berjalan juga tidak lebih dari 3% PDB. Cadangan devisa terus bertambah.

Perlu dicatat bahwa pengeluaran subsidi selama lima tahun terakhir mencapai lebih dari Rp 700 triliun. Jumlah tersebut luar biasa besar sehingga menggerogoti alokasi dana untuk pembangunan prasarana. Untungnya, harga bahan bakar minyak (BBM) sudah disesuaikan sehingga pengeluaran subsidi untuk energi mulai turun. Catatan lainnya, pinjaman sektor swasta yang meningkat dengan cepat sehingga angka DSR sudah lebih dari 50%. Batas maksimum DSR yang sehat adalah 15%.

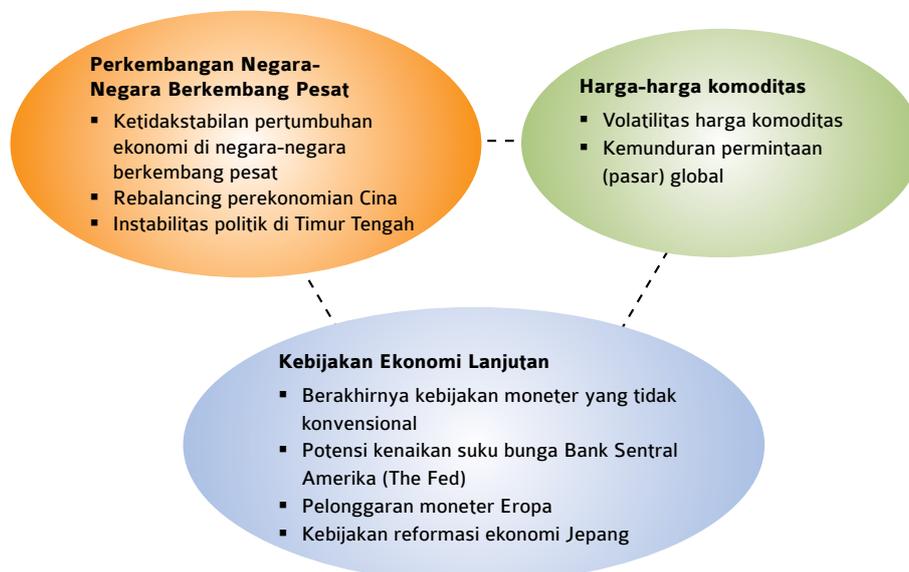
1.4. KECEPATAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI

Seperti diuraikan di atas, ketahanan ekonomi Indonesia membaik dalam kurun waktu 2000–2013. Gejolak keuangan global pada 2008 dengan cepat dapat diredam sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2009 masih dapat dipertahankan pada tingkat 4,6%. Hasil tersebut dapat dicapai walaupun faktor eksternal tidak mendukung. Pada waktu itu pertumbuhan

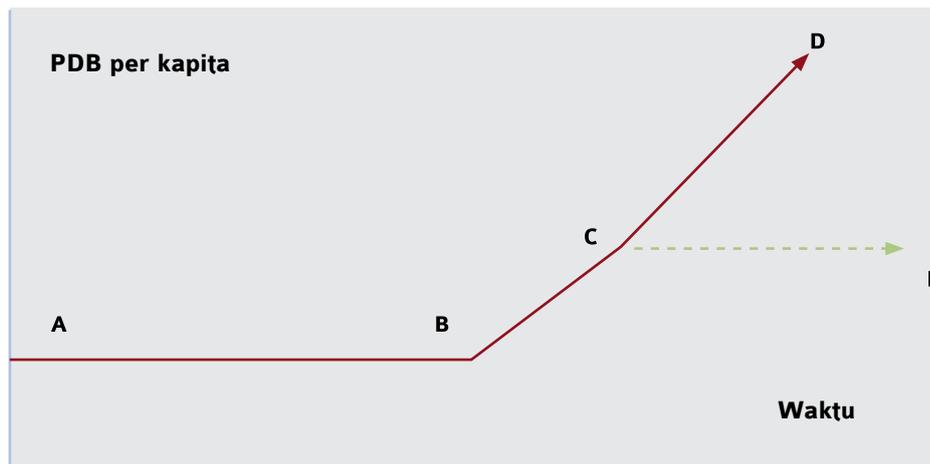
ekonomi dunia turun menjadi 2,2% dan perdagangan dunia turun ke level 14,4%.

Risiko eksternal lainnya yang masih menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia adalah turunnya harga komoditas dan berakhirnya kebijakan pelonggaran kuantitatif (*quantitative easing policy*) The Fed dengan potensi kenaikan The Fed Funds Rate. Turunnya harga komoditas berpengaruh pada ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh ekspor mineral dan komoditas. Kemudian, potensi kenaikan The Fed Funds Rate akan mengganggu stabilitas pasar finansial Indonesia berupa larinya modal asing ke luar negeri (*capital flight*). Namun, bauran kebijakan fiskal dan moneter serta kebijakan struktural yang diambil pemerintah akan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional terhadap gejolak perekonomian global. Perekonomian Indonesia diprediksi masih dapat tumbuh 5-6% dalam kondisi pemulihan perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Daya tahan dari gejolak eksternal dan pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi syarat bagi Indonesia untuk dapat beralih dari negara berpendapatan menengah bawah (*lower-middle income country*) menjadi negara berpendapatan menengah atas (*higher-middle income country*).

Secara umum, menurut Van Tho (2013), ada tiga tahap perkembangan ekonomi suatu negara, yakni negara berpendapatan rendah, kemudian beralih menjadi berpendapatan menengah, dan meningkat menjadi berpendapatan tinggi. Ilustrasinya dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: Kementerian Keuangan, 2014



Pada tahap A-B, perekonomian dikategorikan sebagai negara dengan berpendapatan rendah. Karakteristik negara dalam kategori tersebut di antaranya masyarakatnya masih merupakan masyarakat yang tradisional, terbelakang (*underdeveloped*), dan menghadapi masalah perangkap kemiskinan (*poverty trap*). Negara berpendapatan rendah memiliki keunggulan komparatif di pasar internasional dengan memproduksi barang-barang yang berbiaya rendah dan menggunakan teknologi yang diimpor dari luar. Pada saat perekonomian meningkat menjadi negara berpendapatan menengah (B-C), negara tersebut mendapatkan hasil produktivitas (*productivity gains*) melalui realokasi tenaga kerja dari sektor pertanian yang produktivitasnya rendah, ke sektor industri manufaktur yang produktivitasnya tinggi. Transformasi dari sektor pertanian menuju industri ditandai oleh semakin meningkatnya peran sektor manufaktur dan jasa terhadap total *output* dan total pekerja. Ketika perekonomian masuk kategori pendapatan menengah, terjadi perubahan struktural dalam pasar tenaga kerja, level teknologi, dan keunggulan komparatif.

Pada pasar tenaga kerja, terjadi peralihan dari surplus pekerja (*labor surplus*) menuju kekurangan tenaga kerja (*labor shortage*). Hal ini akan diikuti oleh meningkatnya upah riil. Bila peningkatan upah riil ini tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas pekerja, perekonomian akan kehilangan keunggulan komparatif pada industri padat karya sehingga menurunkan ekspor sektor industri. Pada tahap ini tak mungkin lagi meningkatkan produktivitas

industri dengan mengalihkan tenaga kerja yang berlebih di sektor pertanian ke industri. Akibatnya, peranan sektor industri terhadap perekonomian akan menurun. Perekonomian dalam kondisi ini akan mengalami perangkap pendapatan menengah seperti yang ditunjukkan pada tahap C-E.

Dengan demikian, menurut Van Tho, untuk menghindari perangkap pendapatan menengah, produktivitas tenaga kerja harus meningkat seiring dengan naiknya upah riil. Kualitas tenaga kerja pun harus ditingkatkan dengan transformasi dari industri padat pekerja berkeahlian rendah (*less-skill intensive industry*) menuju industri padat pekerja berkeahlian tinggi (*high-skill intensive industry*). Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas pendidikan.

Pada saat beralih dari negara berpendapatan menengah menuju negara berpendapatan tinggi, ketergantungan terhadap industri padat pekerja berkeahlian tinggi semakin meningkat dan ketersediaan modal manusia (*human capital*) juga bertambah. Ketersediaan dan kualitas prasarana keras (jalan, pelabuhan, air bersih, listrik) dan lunak (institusi) juga mengalami hal serupa. Di samping itu, infrastruktur yang lebih maju dalam bentuk jaringan komunikasi berkecepatan tinggi juga mengalami kenaikan.

Pada bagian berikutnya akan diulas secara mendalam proses transformasi struktural perekonomian Indonesia dengan menghubungkannya pada tahapan kelas pendapatan, mulai dari pendapatan rendah kemudian beralih menjadi negara berpendapatan menengah.

BAB 2

Proses Akumulasi dan Transformasi struktural

Bagian ini akan membahas proses akumulasi Indonesia yang dimulai dari gambaran ekonomi makro, yakni PDB, lalu melihat efisiensi investasi secara umum dengan pendekatan ICOR (Incremental Capital Output Ratio), investasi asing jangka panjang atau Foreign Direct Investment (FDI), kemampuan tabungan (*saving*), anggaran pemerintah, dan investasi nonfisik atau kualitas sumber daya manusia.

Menurut teori, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (*domestic demand/DD*) diperlukan kapasitas produksi yang memadai dari sisi suplai. Hubungan kapasitas suplai dan permintaan dapat dilihat dari perbandingan di dalam persamaan identitas, yaitu antara besaran PDB (*Y*) dan permintaan domestik (*DD*).¹

Permintaan domestik berkorelasi dengan nilai ekspor bersih atau *NX* (*X-M*), di mana *X* adalah nilai ekspor dan *M* adalah nilai impor. Jika kapasitas suplai domestik baik, nilai *NX* dan tabungan domestik—yang terdiri dari tabungan masyarakat dan tabungan pemerintah—akan positif. Sebaliknya jika suplai domestik tidak mampu memenuhi permintaan domestik, nilai ekspor bersih dan tabungan total akan bernilai

negatif.

Nilai *NX* juga tercermin pada *CAB* (*current account balance*) di mana surplus ekonomi domestik tercermin dari surplus *CAB*.² Dilihat dari keseimbangan umum, ekonomi mencakup dua keseimbangan, yaitu keseimbangan eksternal (*Net Export/X-M*) dan keseimbangan internal $\{(S-I) + (T-G)\}$.

Sehingga:

$$NX = (S-I) + (T-G)$$

Artinya, daya saing dipengaruhi oleh kemampuan akumulasi modal atau tingkat tabungan domestik.

Di dalam model Solow dijelaskan kondisi optimal (*steady state*) ditentukan oleh fungsi akumulasi tabungan (*s(ky)*) yang setara dengan akumulasi kapital (*k(y)*) dikurangi oleh depresiasi (δ), faktor produksi (*n*), dan pertumbuhan (*g*). Secara matematis dinyatakan sebagai:

2 1). Pendapatan dan Absorpsi

$$GDP = C+I+G+X-M$$

$$GNI = C+I+G+X-M+Yf$$

$$GNDI = [C+I+G]+[X-M+Yf+TRf]$$

$$A = C+I+G$$

$$CAB = X-M+Yf+TRf$$

$$GNDI = A+CAB$$

$$CAB = GNDI-A$$

2) 2). Pendapatan dan Saving Investment Gap

$$GNDI = C+(S+T)$$

$$CAB = GNDI-A=(C+S+T)-(C+I+G) = (S-I)+(T-G)$$

$$CAB = (Sp-Ip)+(Sg-Ig) = (\text{Private S-I Gap})+(\text{Gov S-I Gap})$$

Atas arahan Prof. Mohammad Arsjad Anwar, bab ini disusun oleh Kiki Verico dan diulas oleh Maddaremmeng A. Panennungi Terima kasih atas bantuan data dari Diaz Erlangga dan Ita Alvionita.

1 Permintaan domestik terdiri dari $(C+I+G)$ yang menjadi $(Y-T-C) + (T-G)$ atau $(S-I) + (T-G)$. Dengan demikian kita mendapatkan persamaan:

$$Y = DD$$

$$Y = (C+I+G)$$

$$I = Y-C-G$$

$$= (Y-T-C) + (T-G)$$

Di mana:

C = Konsumsi, S = Tabungan, I = Investasi, T = Pajak, G = Pengeluaran Pemerintah, DD = Permintaan Domestik

$$sf(y)=kf(y)-(\delta+n+g)$$

Di mana kondisi optimal tercapai ketika:

$$MPK-\delta = n+g$$

Teori pertumbuhan internal (*endogenous growth theory*) menyempurnakan teori Solow dengan menyatakan bahwa pertumbuhan juga dipengaruhi oleh efisiensi faktor produksi). Efisiensi faktor produksi dipengaruhi oleh pendidikan yang mampu meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan keahlian (*skill*).

2.1. GAMBARAN EKONOMI MAKRO TERKAIT AKUMULASI

Gambaran PDB Indonesia dalam dekade terakhir menurut pengeluaran berdasarkan harga berlaku dapat dilihat pada **Tabel 2.1** dan berdasarkan harga konstan tahun 2000 terdapat pada **Tabel 2.2**. Data ini menunjukkan bahwa secara proporsional pengeluaran rumah tangga, ekspor dan impor, adalah komponen terbesar baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Data menunjukkan investasi fisik atau PMTDB (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto) yang terlihat sangat besar pada tingkat harga berlaku dan sebaliknya pada tingkat harga konstan. Artinya, kontribusi PMTDB pada pembentukan inflasi cukup besar.

Data PDB juga memberikan gambaran mengenai produktivitas negara. Hal ini tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang dapat dibedakan antara sektor yang dapat diperdagangkan antarnegara (*tradable*) seperti pertanian, pertambangan dan industri, dan sektor yang tak dapat diperdagangkan antarnegara (*non-tradable*) seperti utilitas (listrik, air, dan gas) serta jasa. Sektor yang *tradable* adalah sumber devisa negara. Pada **Tabel 2.3** terlihat bahwa dalam 13 tahun terakhir (2001-2013) ekonomi Indonesia tumbuh cukup baik, bahkan ketika terjadi krisis keuangan global pada 2008—kala banyak negara terpuruk ke angka negatif, ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional setelah reformasi sekitar 5,5%. Pemicu terbesarnya berasal dari sektor jasa, pengangkutan, dan komunikasi yang tumbuh 12,3%. Adapun

sektor pertambangan subsektor penggalian tumbuh sebesar 6,9%; subsektor konstruksi 6,9%; serta sektor keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan 6,8%. Sementara sektor industri dan pertanian tumbuh di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 4,8% dan 3,5%. Di sektor pertanian, subsektor yang tumbuh paling rendah adalah kehutanan (0,5%), sedangkan yang paling tinggi adalah perikanan (5,6%)—juga di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambaran berdasarkan sektor ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada pertumbuhan sektor *non-tradable*, yakni sektor jasa. Di sektor *tradable*, terutama sektor industri manufaktur, Indonesia masih lemah. Padahal, keunggulan pada sektor industri bisa mendorong Indonesia sama seperti negara Asia maju lainnya, seperti Jepang, Korea Selatan dan Cina. Jika pertumbuhan sektor industri selalu di bawah pertumbuhan ekonomi total, kontribusi sektor ini pada pembentukan PDB nasional akan terus menurun. Adapun sektor ekonomi yang paling buruk adalah pertambangan minyak dan gas (migas) dengan rata-rata pertumbuhan selama 2001-2013 sebesar -2,1%, dan industri migas sebesar -1,5%.

Analisis pertumbuhan ekonomi perlu dilengkapi dengan membandingkannya terhadap laju inflasi berdasarkan sektor. Seperti terlihat pada **Tabel 2.4**, laju inflasi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Pada periode 2001-2013, laju inflasi rata-rata 10%. Ketika laju inflasi lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi, negara berada pada kondisi kurang produktif karena laju pertumbuhan ekonomi lebih cepat dari inflasi yang mengikutinya. Indonesia mulai berada pada periode produktif pada 2012 dan 2013 ketika pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3% dan 5,8%, sedangkan laju inflasi hanya 4%. Namun, pada saat yang sama terjadi defisit neraca perdagangan, yakni pada 2012, dan pelemahan mata uang rupiah yang cukup tajam. Defisit ini adalah yang pertama kali sejak 1969. Bila dilihat dari struktur ekonomi domestik, perekonomian nasional sebenarnya membaik

justru pada 2012-2103. Namun, tidak tercermin pada daya saing perdagangan luar negeri.

Pada periode tersebut, pulihnya ekonomi Amerika Serikat yang berdampak pada kebijakan *tapering off* (pengurangan stimulus ekonomi), membuat investasi dalam US\$ juga membaik. Sehingga, melemahkan daya tahan eksternal ekonomi Indonesia.

Subsektor yang menyumbang laju inflasi tinggi dalam periode ini adalah industri migas sebesar 16% dan subsektor pertambangan nonmigas, juga sebesar 16%. Bedanya, jika subsektor pertambangan nonmigas masih menyumbang pada pertumbuhan ekonomi, industri migas sebaliknya. Terutama subsektor minyak sebab kinerja sektor dan subsektor ini sangat memberatkan perekonomian nasional. Dampak jangka pendeknya, anggaran subsidi untuk minyak akan semakin memberatkan. Dengan demikian, masalah mendasar ekonomi Indonesia dari sisi ini yang berdampak luas pada neraca perdagangan (*trade balance*), neraca transaksi berjalan (*current account balance*), dan neraca pembayaran (*balance of payment*)—yang pada akhirnya memberatkan kebijakan moneter dan fiskal—adalah minyak.

Kelemahan ekonomi nasional yang berdampak pada menurunnya daya saing di dunia internasional terlihat pada performa neraca berjalan (CAB). Persentase CAB terhadap PDB sejak tahun 2009 terus menurun. Pada **Tabel 2.5** terlihat bahwa defisit terus membesar dari 0,6% pada 2004 menjadi -2,9% pada 2014. Penurunan ini dimulai sejak 2012 sebesar -2,8% seiring dengan terjadinya defisit transaksi perdagangan untuk pertama kalinya dalam sejarah ekonomi Indonesia sejak 1969. Defisit CAB pada 2012 dan 2013 disebabkan semakin menurunnya daya saing ekonomi Indonesia. Pada saat bersamaan, sumber devisa seperti

transfer bersih pendapatan orang Indonesia di luar negeri dikurangi pendapatan orang asing di Indonesia, misalnya transfer pendapatan warga Indonesia yang bekerja di luar negeri (*remittance*) dan transfer hasil investasi orang Indonesia di luar negeri (*investment income*) ke Indonesia, terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013, angkanya masing-masing sebesar US\$ 1,14 miliar dan US\$ 25,71 miliar.³ Kondisi ini membuat PNB Indonesia lebih kecil ketimbang PDB, yakni -4% dari PDB. Angka ini merupakan selisih bersih pendapatan yang keluar dari Indonesia. Kendati tidak mampu menutupi defisit CAB, sumber devisa andalan Indonesia yang berasal dari pariwisata meningkat dari US\$ 9,1 miliar pada 2012 menjadi US\$ 10,1 miliar pada 2013.



Agar bisa lolos dari jebakan negara berpendapatan menengah dan masuk menjadi negara maju, Indonesia harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor yang dapat diperdagangkan antarnegara sebagai penghasil devisa dan sumber daya saing ekonomi nasional di tingkat global.

Agar bisa lolos dari jebakan negara berpendapatan menengah dan masuk menjadi negara maju, Indonesia harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor yang dapat diperdagangkan antar-negara sebagai penghasil devisa dan sumber daya saing ekonomi nasional di tingkat global. Sehingga, dalam jangka panjang dapat dinikmati hasilnya berupa penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing internasional.

Ini adalah salah satu cara agar Indonesia dapat meningkatkan jumlah mata uang asing dan mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing untuk tidak terus melemah (depresiasi). Caranya, sebagai langkah awal, memperbaiki daya saing ekonomi Indonesia di dunia internasional—yang melemah seperti yang terlihat dari penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDB dari 28% pada 2004, menjadi 23,7% pada 2013. Indonesia saat ini masih belum optimal dalam menarik investasi asing jangka panjang (*net recipient of FDI inflows*). Pendapatan investasinya defisit dan

³ Sumber data: CEIC, 2014, diolah.

keterkaitannya pada jaringan produksi global (*global production network*) yang masih cukup rendah. Maka, dapat dipastikan bahwa defisit neraca perdagangan atau *trade account* sejalan dengan defisit nilai tambah perdagangannya atau *value-added in trade*.

Data PDB Indonesia dalam 15 tahun terakhir (2004-2013) berdasarkan lapangan usaha atau sektor pada **Tabel 2.6** menunjukkan hal menarik. Rata-rata, kontribusi ekonomi terbesar berasal dari sektor jasa sebesar 48%, lalu sektor industri sebesar 26%, dan sektor primer sebesar 25%. Sektor primer terdiri dari pertanian 15%, pertambangan 11%, dan sisanya, 1%, berasal dari sektor utilitas (listrik, air dan gas). Jika dilihat dari perubahan proporsi sektor usaha sebagai representasi dari pertumbuhan, sektor jasa tumbuh tinggi—dari 48% (2004), menurun sedikit ke 47% (2009), lalu naik menjadi 50% (2013). Sektor primer dari subsektor pertanian cenderung stabil pada angka 14% (2004), 15% (2009), dan kembali 14% (2013). Ironisnya, sektor industri cenderung menurun. Sektor ini sebetulnya sangat diharapkan tumbuh guna mendorong transformasi ekonomi nasional. Kontribusi sektor industri pengolahan terus menitik dari 28% (2004) ke 26% (2009), lalu 23,7% (2013). Lebih jauh, subsektor industri migas dan nonmigas, seperti terlihat pada **Tabel 2.6**, kian merosot dari masing-masing 4,1% dan 24% pada 2004, menjadi 2,9% dan 20,8% pada 2013. Pembangunan industri sebagai lokomotif ekonomi nasional sangat penting sebab jika tidak ada perbaikan, daya saing ekonomi akan melemah. Ini berdampak pada rentannya ekonomi terhadap perubahan eksternal seperti pembelian kembali surat utang (*quantitative easing/QE*), pengurangan stimulus fiskal (*tapering off*) dan adanya rencana The Fed Amerika untuk meningkatkan suku bunga nominal US\$.

Jika dilihat dari PDB berdasarkan pengeluaran, ekonomi nasional digerakkan oleh konsumsi dengan rata-rata 60% dari tahun 2004-2013 dan investasi (PMTB) sebesar 28%. Memasuki periode negara berpendapatan menengah, besarnya ketergantungan pada

konsumsi bisa membuat ekonomi Indonesia sulit berkembang dan menjadi target pasar ketimbang basis produksi. Namun, bila dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi menurut sektor usaha dari tahun 2005-2013, PMTDB tumbuh lebih cepat daripada konsumsi, 7,7% berbanding 4,7%. Artinya, meski pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh investasi, namun tingkat konsumsi jauh lebih besar. Sehingga, pengaruh terbesar masih berasal dari kekuatan konsumsi. Proporsi PDB menurut harga berlaku (HB) dan harga konstan (HK) berdasarkan pengeluaran dapat dilihat pada **Tabel 2.7** dan **Tabel 2.8**.

2.2. GAMBARAN EFISIENSI INVESTASI DARI PERBANDINGAN NILAI TAMBAH DAN INPUT PRODUKSI (ICOR/INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO)

Upaya untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh efisiensi penambahan modal bersih, yakni setelah dikurangi depresiasinya (δ) Ini dapat dinilai dengan melihat kapasitas investasi fisik, yaitu proporsi antara investasi (PMTDB dari sisi pengeluaran) dan PDB total pada kurun 2001-2013 seperti pada **Tabel 2.9**. Data ini menunjukkan proporsi PMTDB harga berlaku terhadap PDB harga berlaku meningkat dari 20% pada 2003 menjadi 32% sepuluh tahun kemudian. Ini berarti peran investasi terhadap PDB nasional semakin besar. Proporsi ini perlu dianalisis lebih lanjut dengan melihat efisiensi kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Caranya, dengan membandingkan penambahan modal (investasi/PMTDB) dan pertumbuhan ekonomi nasional. Indikatornya, rasio penambahan modal-*output* (Incremental Capital Output Ratio/ICOR). Rumusnya:

$$ICOR = \Delta K / \Delta Y$$

Di mana:

ΔK = investasi, ΔY = pertumbuhan ekonomi

Semakin tinggi angka ICOR, semakin tak efisien investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Cara membacanya, berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Hasil perhitungan ICOR nasional dalam rentang 2000-

2012 terdapat pada **Tabel 2.10**. Perhitungan ini dibagi menjadi tiga periode, yaitu 2000-2003, 2004-2008, dan 2009-2012 dengan angka ICOR berturut-turut 4,45; 4,00; dan 3,92.⁴ Artinya, nilai ICOR yang menggambarkan efisiensi kapital terbaik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dicapai pada periode ketiga (2009-2012).⁵ Dalam kurang dari lima belas tahun terakhir, terjadi peningkatan efisiensi investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini perlu diteruskan selama lima tahun ke depan (2014-2019) dan seterusnya.

Dengan menggunakan model indikator kestabilan ekonomi negara atau *steady state indicator* untuk menilai investasi, analisis ICOR dilengkapi dengan analisis tingkat tabungan nasional (*saving ratio*) yang merupakan perbandingan tabungan (*gross national saving*) terhadap PDB harga berlaku. Selama tujuh tahun terlihat peningkatan kemampuan tabungan nasional dari 26% pada 2005 menjadi 30,7% pada 2012. Ini mendukung temuan sebelumnya bahwa kapasitas investasi meningkat. Adanya perbaikan dalam efisiensi investasi (ICOR) dalam sepuluh tahun terakhir dan peningkatan tabungan nasional, semakin mengokohkan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan kapasitas tabungan nasional terhadap PDB harga berlaku terdapat pada **Tabel 2.11**.

2.3. AKUMULASI TABUNGAN NASIONAL

Tingkat tabungan masyarakat dapat dilihat

-
- 4 Rasio investasi HB (harga berlaku) berbeda dengan HK (harga konstan). ICOR menggunakan HK. Jika setelah menggunakan HK ditemukan ICOR menurun, padahal seharusnya naik, diduga karena nilai impor HK *underestimate*. Penjelasan, ekspor HB dibagi ekspor HK menghasilkan deflator ekspor. Impor HB dibagi impor HK menghasilkan deflator impor. Deflator ekspor dibagi deflator impor menghasilkan *Terms of Trade* (ToT). PMDTB: bangunan, peralatan/mesin produksi dalam negeri dan peralatan/mesin produksi impor. Kemungkinan inflator peralatan/impor *underestimate* sementara inflator HK ekspor *overestimate*, di mana HK impor *underestimate*. Seharusnya, inflator impor besar sehingga ICOR HK akan naik dan ICOR akan naik.
- 5 Sebagai catatan, nilai ICOR bisa saja meningkat. Artinya investasi semakin tidak efisien karena inflasi yang tinggi pada sektor konstruksi. Jika dilihat dari PDB berdasarkan lapangan usaha, proporsi sektor jasa konstruksi naik dari 6,6% (2004) menjadi 9,9% (2009), lalu 10% (2013). Kenaikan kontribusi sektor jasa konstruksi pada perekonomian (PDB HB) disebabkan karena pembangunan infrastruktur. Sehingga, peran lahan bergeser dari *land* menjadi *capital* dan harganya meningkat signifikan.

lebih jauh, antara lain, dari deposito. Proksi yang digunakan adalah mengurangi M2 dan M1 sehingga diperoleh jumlah deposito nasional. Selanjutnya, dibandingkan dengan PDB nominal nasional. Hasilnya dapat dilihat pada **Tabel 2.12**. Proporsi deposito terhadap PDB nasional menurun dari 40% pada 2001 menjadi 31% dua belas tahun kemudian. Dalam jumlah nominal, terjadi peningkatan dari sekitar Rp 666 triliun menjadi Rp 2.840 triliun, namun pertumbuhan PDB nasional jauh lebih besar daripada itu. Salah satu faktor yang mungkin memperlambat pertumbuhan deposito selain meningkatnya permintaan investasi adalah pengenaan pajak deposito yang cukup tinggi, yakni 20%, sejak penandatanganan Lol (*Letter of Intent*) dengan International Monetary Fund (IMF). Pajak deposito merupakan salah satu faktor penyebab menurunnya insentif deposito.

Sementara, jika dilihat dari data tingkat suku bunga deposito dari 2001 ke 2013, yang terjadi justru sebaliknya. Terjadi penurunan insentif karena semakin rendahnya suku bunga deposito dari 16,18% pada 2001 menjadi 7,75% pada September 2014, seperti terlihat pada **Tabel 2.13**. Data ini dapat memperkuat argumen sebelumnya, yakni menurunnya insentif masyarakat untuk menempatkan dananya dalam bentuk deposito. Di sisi lain, penurunan tingkat suku bunga bisa berarti semakin membaiknya ekonomi nasional. Ini sejalan dengan pendapat sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan deposito. Tingkat suku bunga nominal, misalnya suku bunga deposito enam bulan, dapat menjadi indikator apakah ekonomi sebuah negara lebih efisien dan berdaya saing atau sebaliknya. Hal ini disebabkan karena penentuan suku bunga nominal harus memperhatikan laju inflasi domestik (*Fischer's Effect*) dan suku bunga negara patokan. Misalnya, suku bunga The Fed di Amerika Serikat—karena perekonomian Amerika yang dominan.

Jika laju inflasi domestik naik, suku bunga nominal akan meningkat. Dan jika ada ekspektasi mata uang rupiah akan melemah—misalnya karena The Fed berencana meningkatkan

suku bunga US\$, suku bunga nominal rupiah akan meningkat untuk mengantisipasi aliran modal keluar dari Indonesia (*capital outflow*). Artinya, tren semakin menurunnya tingkat suku bunga deposito menunjukkan bahwa laju inflasi domestik dan ekspektasi pelemahan mata uang domestik juga menurun. Secara tidak langsung, hal ini menggambarkan ekonomi makro Indonesia semakin membaik dalam 10 tahun terakhir.

Untuk mempertajam analisis, data proporsi tabungan terhadap PDB nominal harus dilengkapi dengan data surplus atau defisit anggaran pemerintah terhadap PDB. Data pada **Tabel 2.14** menunjukkan bahwa defisit anggaran pemerintah terus naik. Pada 2005, defisit anggaran pemerintah per PDB nominal mencapai 0,52% dan pada 2013 mencapai 1,69%—tetap lebih rendah dari yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk melihat dampak defisit anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi, diperlukan data perbandingan belanja modal pemerintah terhadap PDB nominal harga berlaku. Analisis ini membutuhkan data anggaran pemerintah (APBN), khususnya perkembangan alokasi anggaran pengeluaran pembangunan (sampai tahun 2004) dan belanja modal (mulai tahun 2005).

2.4. ANGGARAN PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG PROSES AKUMULASI

Data pada **Tabel 2.15** memperlihatkan bahwa alokasi belanja modal meningkat selama tujuh tahun, dari 1,2% per PDB pada 2005 menjadi 1,8% pada 2012. Peningkatan ini kendati tidak besar namun menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kontribusi pemerintah pada pembentukan modal pembangunan. Akumulasi modal merupakan bagian sangat penting dalam pembangunan dan penciptaan pertumbuhan ekonomi negara. Pengeluaran investasi fisik pada infrastruktur juga bisa dilihat dari persentase pengeluaran negara, baik pemerintah maupun swasta (asing dan lokal), untuk pembangunan infrastruktur terhadap PDB nominal harga berlaku. Pada **Tabel 2.16** terlihat bahwa persentase pengeluaran infrastruktur

dengan proksi pengeluaran belanja modal Kementerian PU per PDB terus meningkat tiap tahun. Dari 0,45% pada 2004 menjadi 0,92% pada 2013.

Selain pengeluaran, surplus/defisit anggaran dipengaruhi oleh penerimaan, sehingga diperlukan juga analisis mendalam mengenai hal ini. Penerimaan pemerintah terdiri dari dua komponen besar, yakni penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak terkait dengan pajak tidak langsung (pajak penjualan/PPn) dan pajak langsung (pajak penghasilan/PPH dan pajak bumi dan bangunan/PBB). Indikator yang digunakan untuk menganalisis ini adalah PPh, PPn, Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM), PBB, cukai, dan pajak lainnya terhadap PDB. Kontribusi pajak pada penerimaan negara dan rasionya terhadap PDB ternyata tak begitu besar. Tahun 2001, rasio pajak per PDB adalah 10,62%. Angka ini naik jadi 12,48% pada 2013 dengan bersumber dari PPh, PPn/PPNBM, PBB, cukai, dan pajak lainnya seperti dalam **Tabel 2.17**.

Tidak ada angka yang pasti tentang berapa persen proporsi penerimaan pajak terhadap PDB sebagai syarat untuk menjadi negara maju. Hal ini terlihat dari data selama 2012-2103 di mana negara maju bisa memiliki proporsi pajak per PDB lebih dari 20% seperti Australia yang memiliki Pendapatan Nasional Penduduk (PNP) atau Gross National Income (GNI) per kapita US\$ 65.000/negara berpendapatan tinggi, atau seperti Jepang pada kisaran 9-10% (PNP per kapita US\$ 46.330/negara berpendapatan tinggi). Proporsi pajak per PDB sejumlah negara maju dan menengah tidak jauh berbeda dengan Indonesia—dengan kecenderungan bahwa rata-rata negara menengah memiliki proporsi penerimaan pajak yang lebih besar ketimbang negara maju.

Lihatlah, negara maju seperti Korea Selatan angkanya 14-14,5% dan Singapura 13-14%. Adapun Malaysia proporsinya 15-16%, Thailand (16-17%), Cina (10-11%) dan Filipina (12-13%).⁶

⁶ Kategori negara: Korea Selatan (PNP per kapita US\$ 25.920/negara berpendapatan tinggi), Singapura (PNP per kapita US\$ 54.040/negara berpendapatan tinggi), Malaysia

Tak ada kesimpulan yang solid berapa angka ideal pajak per PDB untuk kategori negara maju atau menengah.

Pada 2013, rasio sumber penerimaan pajak terhadap PDB secara berturut-turut PPh (6,44%), PPhn/PPNBM (4,66%), cukai (1,01%), PBB (0,3%) dan pajak lainnya (0,07%). Rendahnya rasio pajak tidak lepas dari masih besarnya sektor informal yang belum membayar pajak. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) 2012 menunjukkan angka pekerja bidang informal di Indonesia, yakni pegawai yang bekerja di luar kategori “bekerja dibantu buruh tetap dan buruh atau karyawan atau pegawai”, cukup besar, yaitu sekitar 65%.

Adapun penerimaan bukan pajak terbesar berasal dari sumber daya alam (SDA), yakni minyak, gas, dan sumber daya alam lainnya. Yang perlu diperhatikan dalam penerimaan ini adalah royalti mineral bukan migas yang pemungutannya di bawah target dan keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik dari aset maupun laba. Pada 2013, kontribusi penerimaan bukan pajak mencapai 3,63% dari PDB. Rinciannya, migas 1,93%, nonmigas 0,25%, laba BUMN 0,37%, PNBPN lainnya 0,86%, dan Badan Layanan Umum (BLU) 0,22%.

Seperti terlihat pada **Tabel 2.18**, kontribusi penerimaan SDA terus menukik dari 5,49% pada 2000 hingga menjadi sepertiganya, sekitar 2,17%, pada 2013. Pada periode yang sama, kontribusi migas turun dari 4,8% menjadi 1,93%, dan nonmigas dari 0,69% turun ke 0,25%. Pada tahun yang sama juga laba BUMN meningkat dari 0,29% menjadi 0,37%, dan kontribusi PNBPN lainnya naik dari 0,66% ke level 0,86%. BLU pun, yang angkanya tak signifikan pada 2000 hingga 2006, naik dari 0,05% pada 2007 menjadi 0,22% pada 2013. Menurunnya sumbangan penerimaan dari SDA terutama migas merupakan peringatan bahwa ketersediaan SDA khususnya yang tak dapat diperbarui kian menipis. Sehingga, Indonesia

harus mengembangkan pembangunan dan pertumbuhan ekonominya berdasarkan sumber daya manusia.

Kebutuhan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur dan sumber daya manusia tak hanya dipenuhi tabungan domestik, tapi juga investasi asing. Salah satu sumber utamanya adalah investasi asing jangka panjang (FDI).

2.5. AKUMULASI INVESTASI ASING JANGKA PANJANG (FDI INFLOWS)

Proporsi investasi fisik jangka panjang yang masuk atau *FDI inflow* terhadap pembentukan PDB nasional belum signifikan karena mayoritas investasi fisik yang masuk Indonesia hanya tertarik pada pasar domestik yang besar (*market seeking FDI*) dan sumber daya alam potensial (*raw material input seeking FDI*). Investasi fisik jangka panjang yang masuk dari luar ke Indonesia umumnya bukan karena alasan ingin menjadikan Indonesia sebagai basis produksi (*efficiency seeking*). Tujuan terakhir ini sulit dicapai karena membutuhkan kualitas infrastruktur dan SDM dengan keahlian tinggi. Kendati angkanya belum besar, persentase investasi asing terhadap PDB terus meningkat seperti terlihat pada **Tabel 2.19**, dari 0,73% pada 2004 menjadi 2,18% delapan tahun kemudian.

Data perbandingan FDI terhadap GDCF (Gross Domestic Capital Formation) pada tingkat negara berpendapatan tinggi, menengah atas, dan menengah bawah, menunjukkan bahwa proporsi terbesar terdapat pada negara berpendapatan menengah atas dan diikuti oleh negara menengah bawah. Artinya, jika Indonesia ingin mencapai kategori negara berpendapatan tinggi, angka FDI per GDCF harus ditingkatkan. Indonesia memiliki proporsi FDI per GDCF yang lebih rendah dari angka rata-rata kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah. Data menunjukkan proporsi FDI per GDCF Indonesia adalah 2% pada 2004 dan 10% pada 2010. Pada periode yang sama, angka rata-rata kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah secara berturut-turut 5% dan 10%. Gambaran selengkapnya terlihat pada **Tabel**

(PNP per kapita US\$ 10.430/negara berpendapatan menengah atas), Thailand (PNP per kapita US\$ 5.340/negara berpendapatan menengah atas), Cina (PNP per kapita US\$ 6.560/negara berpendapatan menengah atas), dan Filipina (PNP per kapita US\$ 3.270/negara berpendapatan menengah bawah).

2.20.

Hubungan penanaman modal asing dengan kualitas sumber daya manusia, terutama jika dikaitkan dengan basis produksi atau setidaknya masuk dalam jaringan produksi regional/global, adalah *endogenous* atau saling mempengaruhi. Investasi asing akan masuk dan membuat Indonesia sebagai salah satu basis produksi atau jaringan produksi jika negara memiliki kualitas SDM yang baik. Sebaliknya, kehadiran investasi asing akan mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM.

Ada sejumlah variabel yang berhubungan dengan akumulasi modal atau investasi, yakni selisih dari *capital* (ΔK). Kapital memiliki dua bentuk, yaitu fisik dan nonfisik (*intangible*). Investasi fisik meliputi pengadaan mesin, pabrik, inovasi/paten, dan infrastruktur. Sedangkan investasi nonfisik mencakup kualitas sumber daya manusia, baik pengetahuan maupun keahlian. Keduanya merupakan sumber kekuatan pembangunan. Berbeda dengan SDA yang sifatnya *depletive* atau bisa habis pakai, potensi SDM tidak terbatas.

Terkait pengembangan SDM sebagai kekuatan pembangunan menyempurnakan teori Solow, yaitu pada bagian faktor pertumbuhan internal *endogenous growth*, maka akumulasi investasi pada nonfisik perlu diperhatikan. Indikatornya antara lain proporsi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan terhadap pembentukan PDB nasional. Pengeluaran untuk pendidikan terhadap PDB nominal meningkat dari 2,46% pada 2001 menjadi 3,56% pada 2012, seperti terlihat pada **Tabel 2.21**. Peningkatan ini juga terjadi di bidang kesehatan dari 1,96% pada 2000 menjadi 3,03% dua belas tahun kemudian.

2.6. AKUMULASI SUMBER DAYA MANUSIA

Naiknya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan menunjukkan terjadinya proses akumulasi investasi nonfisik pada sumber daya manusia. Hasilnya semestinya tercermin pada kualitas SDM yang indikatornya, antara lain, Human Development Index (HDI). Namun, sebelum melihat HDI, proses akumulasi

pada sumber daya manusia sebenarnya baru akan terlihat pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Peningkatan persentase pengeluaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap PDB nasional menunjukkan komitmen negara pada proses pembangunan jangka panjang. Manfaat dari ketiga bidang tersebut memang baru bisa dipetik bertahun-tahun kemudian.

Kini, saatnya melihat indikator perkembangan kualitas sumber daya manusia dari komponen HDI, yaitu pendidikan yang terdiri dari angka partisipasi sekolah (*school enrollment*) dan tingkat melek huruf (*adult literacy rate*). Pada **Tabel 2.22** terlihat bahwa selama kurang lebih 10 tahun, dari 2001 ke 2012, jumlah anak yang berada di sekolah dasar atau *school enrollment primary (net)* turun, tetapi jumlah anak yang berada di sekolah menengah atau *school enrollment secondary (net)* dan sekolah tinggi atau *school enrollment tertiary (gross)* naik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia semakin membaik. Kenaikan persentase anggaran pendidikan berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Namun perlu menjadi catatan, kendati capaiannya sudah tergolong baik, yakni lebih dari 95%, namun tingkat melek huruf menurun jika dibandingkan tahun 2008 hingga 2011, seperti yang terdapat pada **Tabel 2.23**.

Indikator kesehatan, yakni angka harapan hidup (*life expectancy*), menunjukkan perbaikan dengan meningkatnya umur harapan hidup Indonesia dari 67,6 tahun pada 2001, menjadi 70,6 tahun pada 2012. Pada **Tabel 2.24** terlihat, kualitas kesehatan orang Indonesia membaik dengan semakin panjangnya umur harapan hidup nasional.

Sedangkan pada **Tabel 2.25** terlihat komposisi tingkat pendidikan yang ditamatkan kian membaik walaupun sekitar 70% masyarakat masih berpendidikan SMA ke bawah (Susenas 2012). Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa komposisi masyarakat yang tidak sekolah menurun dari 11,65% pada 2001, menjadi 5,58% pada 2013. Jumlah masyarakat yang tidak tamat SD dan hanya tamat SD/ sederajat juga menurun

pada periode yang sama. Masing-masing angkanya 17,53% (2001) menjadi 13,76% (2013) dan 33,03% (2001) menjadi 28,2% (2013). Pada periode yang sama, lulusan SMP/ sederajat meningkat dari 17,07% menjadi 20,91%. Demikian pula tamatan SMA/ sederajat ke atas yang naik dari 20,71% menjadi 31,55%. Seluruh proporsi ini menunjukkan bahwa Indonesia menikmati peningkatan kualitas SDM dari sisi status pendidikan formal yang ditamatkan.

Dari sisi gender, rasio perempuan terhadap 100 orang laki-laki menurut tingkat pendidikan meningkat signifikan, khususnya pada tingkat pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. Sejak 2004 hingga 2013 terjadi peningkatan proporsi untuk lulusan SMA atau sederajat dari 74,9 menjadi 79,8. Sementara alumni D-1/D-3 meningkat dari 98,2 menjadi 132,3. Artinya, saat ini jumlah perempuan yang lulus D-1/D-3 lebih banyak dari laki-laki. Pada tingkat lulusan D-4/S-1 juga terjadi peningkatan berarti dari 62,7 menjadi 94,9, yang berarti jumlah perempuan yang lulus jenjang pendidikan D-4/S-1 hampir sama dengan lelaki yang lulus program ini. Jumlah perempuan yang lulus S-2/S-3 juga sudah mulai signifikan walaupun tidak sebesar proporsi perempuan yang lulus D-1/D-3, yaitu 52,3 per 100 orang laki-laki. Data selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.26**.

Korea Selatan menjadi negara maju pada pertengahan 1990-an dengan rasio angka partisipasi 95%. Mengikuti jejak Korea Selatan, untuk memajukan pendidikan caranya antara lain lewat intervensi pemerintah di bidang ini. Misalnya, menerapkan pola subsidi pendidikan. Pola yang ideal adalah subsidi tidak langsung untuk tingkat pendidikan SLTA ke bawah, dan subsidi langsung untuk tingkat pendidikan SLTA ke atas.

Menurut distribusi berdasarkan kota dan desa, tingkat pendidikan semakin membaik pada 2001, 2007 dan 2013. Hal serupa terlihat pada tingkat pendidikan lelaki dan perempuan pada periode yang sama. Artinya, jika dilakukan *cross-tabulation* atau kalkulasi silang, akan ditemukan bahwa proporsi lulusan SLTA ke atas meningkat dan lulusan SLTA ke bawah menurun, baik pada kategori laki-laki dan perempuan maupun untuk

kota-desa. Gambaran lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.27**.

Indikator lain yang perlu dicermati selain pendidikan dan kesehatan adalah PDB per kapita atau daya beli masyarakat. PDB harga berlaku per kapita Indonesia naik sangat tajam dalam 10 tahun terakhir, yaitu tiga kali lipat dari US\$ 1.272 pada 2004 menjadi US\$ 3.739 pada 2013 sebagaimana terlihat dalam **Tabel 2.28**. Jika mampu meningkatkan pendapatan per kapita tiga kali lipat dalam 10 tahun ke depan, Indonesia bisa naik kelas dari negara berpendapatan menengah atas ke pendapatan tinggi. Namun, meningkatkan pendapatan per kapita sebesar itu lebih sulit karena tantangan makin berat. Produktivitas negara terlihat pada PDB per kapita baik dalam US\$ maupun rupiah. Pada tingkat kawasan, misalnya ASEAN+6 (10 negara ASEAN dan 6 negara di luar ASEAN, yaitu Jepang, Korea Selatan, Cina, Australia, Selandia Baru, dan India), Indonesia masuk kategori “negara menengah”. Ini dilihat dari nominal pendapatan per kapita, Indonesia masuk dalam batas atas negara berpendapatan menengah ke bawah (*top limit of lower-middle-income country*) dan produktivitas di kawasan. Produktivitas diukur lewat membandingkan kontribusi Indonesia dalam pembentukan nilai tambah ekonomi ASEAN (PDB nominal) dengan kontribusi Indonesia dalam soal jumlah penduduk di ASEAN.⁷

Klasifikasi negara (berpendapatan tinggi, menengah atas dan bawah, serta berpendapatan rendah) ternyata sebangun dengan indikator sumber daya manusia atau HDI negara tersebut. HDI mencakup indikator pendidikan (angka partisipasi anak usia sekolah dan tingkat melek huruf), kesehatan, dan daya beli. Dengan menggunakan indikator pendapatan per kapita dan HDI, untuk kawasan ASEAN, yang masuk kategori negara tinggi adalah Singapura dan Brunei. Lalu, Malaysia dan Thailand masuk negara menengah tinggi. Sedangkan Indonesia terdaftar sebagai negara menengah ke bawah bersama Vietnam, Kamboja, dan Laos. Kategori rendah dihuni Myanmar. Sebagaimana terlihat di

7 Verico, Kiki, “Postur Ekonomi Indonesia di ASEAN”, majalah *Tempo*, edisi 19-25 Mei 2014.

Tabel 2.29, di ASEAN hasil kategori negara sama dengan hasil kategori HDI. Fakta ini memperkuat argumen Solow dan faktor pertumbuhan internal *endogenous growth* bahwa kemajuan ekonomi sebuah negara tergantung pada produktivitas sumber daya manusianya.

Berdasarkan kategori tadi, saat ini Indonesia termasuk negara menengah dengan salah satu ciri utamanya adalah proporsi jumlah pekerja berkeahlian sedang (*mid-skilled worker*) mulai lebih besar dari pekerja berkeahlian rendah (*low-skilled worker*). Untuk kepentingan jangka panjang, misalnya untuk “lulus” dari kelompok negara berpendapatan menengah atas dengan pekerja berkeahlian sedang dan ke kelas berpendapatan tinggi dengan pekerja berkeahlian tinggi, kegiatan riset dasar dan rekayasa teknis mesti ditingkatkan. Indonesia terbilang masih tertinggal pada tiga indikator pekerja dengan keahlian tinggi, yaitu proporsi pengeluaran riset dan pengembangan (*research and development*) terhadap PDB, jumlah peneliti per 1 juta penduduk, dan jumlah publikasi di jurnal internasional.

Dalam nilai ekspor berteknologi tinggi per PDB (World Development Indicator, Bank Dunia 2010), Indonesia pun masih tertinggal diband-dingkan dengan Malaysia, Thailand, bahkan dengan Filipina yang pendapatan per kapitanya lebih rendah. Pada 2010, nilai ekspor berteknologi tinggi Indonesia sebesar US\$ 6.673 juta. Sedangkan Malaysia US\$ 59.332 juta, Thailand US\$ 34.156 juta, dan Filipina US\$ 29.792 juta. Gambaran ini semakin menunjukkan bahwa produktivitas Indonesia dalam ekspor industri manufaktur yang membutuhkan buruh berkeahlian tinggi masih rendah.

Seperti terlihat pada **Tabel 2.30**, **Tabel 2.31**, dan **Tabel 2.32**, jika dibandingkan antarnegara, misalnya di ASEAN+6, Indonesia tertinggal cukup jauh. Inilah salah satu faktor yang

menyebabkan investor asing tidak melakukan kegiatan industri hulu seperti riset dan inovasi di Indonesia. Mereka lebih memilih Cina atau India yang memiliki sumber daya manusia mumpuni untuk riset dan inovasi. Penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia masih seputar mencari pasar domestik dan suplai bahan mentah—bukan investasi karena alasan efisiensi produksi. Pengeluaran untuk riset dan pengembangan yang masih rendah disebabkan rendahnya kegiatan riset dan pengembangan perusahaan asing di Indonesia—sedangkan di India sudah dilakukan. Fenomena ini juga terkait dengan rendahnya produktivitas riset di Indonesia.

Proporsi pengeluaran untuk riset di Indonesia pada 2008 hanya sekitar 0,08%, terendah jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Juga, bila dibandingkan dengan Korea Selatan Cina dan India. Jumlah peneliti bidang teknik dan rekayasa per satu juta penduduk yang dibutuhkan Indonesia lebih dari 230 ribu orang. Namun, yang ada saat ini masih satu per seribunya. Jumlah publikasi dalam jurnal ilmiah internasional juga terbilang rendah, yakni hanya 270 pada 2011. Bandingkan

dengan Singapura (4.543 publikasi), Thailand (2.304), dan Malaysia (2.092). Bahkan, jumlah publikasi ilmiah Indonesia pada tahun tersebut masih lebih rendah dari Vietnam (432). Makin terlihat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Cina (89.894), Korea (25.593) dan India (22.481). Jika indikator jumlah publikasi di jurnal ilmiah internasional, jumlah peneliti bidang teknik per 1.000 penduduk, dan alokasi pengeluaran untuk riset per PDB dipakai untuk mengukur kapasitas Indonesia menuju negara maju, dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi negeri ini untuk bisa naik kelas dari pendapatan menengah ke pendapatan tinggi. Pemerintah mesti bekerja keras untuk meningkatkan pendidikan tinggi yang menghasilkan pekerja berkeahlian tinggi



Dengan menggunakan indikator pendapatan per kapita dan HDI, untuk kawasan ASEAN, yang masuk kategori negara tinggi adalah Singapura dan Brunei. Lalu, Malaysia dan Thailand masuk negara menengah tinggi. Sedangkan Indonesia terdaftar sebagai negara menengah ke bawah bersama Vietnam, Kamboja, dan Laos.

ketimbang pada tingkat pendidikan menengah yang meluluskan pekerja berkeahlian sedang. Indonesia harus mampu menjawab tantangan ini dengan memanfaatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang membuka peluang pasar *output* dan investasi asing, dan bonus demografi, yaitu meningkatnya angkatan kerja usia muda hingga tahun 2025.

Kualitas SDM pekerja, terutama untuk pekerja berkeahlian sedang, juga bisa diukur dengan indikator produktivitas. Untuk pekerja dengan level menengah tersebut, Indonesia sedang menikmati masa peningkatan SDM kategori ini karena berada dalam kelompok negara berpendapatan sedang. Lihatlah, upah pekerja formal sejak 2001 hingga 2013 mengalami peningkatan. Upah nominal Indonesia selama periode tersebut dapat dilihat pada **Tabel 2.33**. Untuk membandingkan kesesuaian antara upah nominal dan produktivitas, data upah nominal perlu dibandingkan dengan data upah riil. Hasilnya terlihat pada **Tabel 2.34**.

Saat ini industri di Indonesia yang dominan adalah industri padat kerja yang diisi oleh bukan tenaga kerja ahli (*unskilled labor*). Pada industri padat kerja komponen upah menjadi sangat penting dalam komposisi biaya produksi. Selain produktivitas pekerja, rendahnya produktivitas industri dipengaruhi oleh kurang efisiennya produksi. Ini terjadi karena metode yang boros energi dan upah yang ditetapkan pemerintah lebih besar dari tingkat produktivitas pekerja.

Tabel 2.34 juga menunjukkan bahwa sebelum terjadi krisis keuangan global pada 2008, upah riil atau produktivitas pekerja Indonesia selalu lebih tinggi dari upah nominal. Artinya, pekerja dibayar di bawah produktivitasnya. Namun, sejak 2009 terjadi fenomena sebaliknya, yakni upah nominal lebih tinggi dari upah riil. Dengan kata lain, pekerja dibayar lebih tinggi dari produktivitasnya. Jika sebelum 2008 yang terbebani oleh upah adalah pekerja yang dibayar lebih rendah dari produktivitasnya, setelah 2008 giliran pengusaha yang terbebani karena harus membayar di atas produktivitas pekerja. Fenomena ini sekaligus menggambarkan posisi tawar pekerja Indonesia yang saat ini lebih tinggi dari pengusaha. Ketidakseimbangan ini

akan bergeser menuju keseimbangan baru jika terjadi peningkatan persaingan antarpekerja. Sehingga, pekerja dituntut untuk meningkatkan produktivitas, misalnya melalui peningkatan kualitas alat produksi.

KESIMPULAN

1. Kontribusi industri migas terus menurun dalam 10 tahun, dari 4,1% pada 2004 menjadi 2,9% tahun 2013. Hal ini terkait dengan pertumbuhan subsektor pertambangan migas yang terus negatif dalam 13 tahun terakhir. Angkanya -3,2% pada 2013, sedangkan industri migas -1,5% pada tahun yang sama. Keduanya jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional tahun itu sebesar 5,8%. Sumbangan kedua subsektor ini pada laju inflasi nasional juga cukup tinggi, yaitu 7% pada tahun 2013, jauh lebih tinggi dari laju inflasi nasional sebesar 4%. Lemahnya sektor dan subsektor migas terlihat pada defisit neraca transaksi berjalan (CAB), khususnya dari minyak, sehingga memperbesar angka defisit transaksi berjalan per PDB dari -2,8% (2012), -3,3% (2013), dan hampir -2,9% (2014). Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan (*trade account balance*) pertama kali sejak tahun 1969 pada 2012. Bila dilihat dari perbandingan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi pada 2012 dan 2013, pertumbuhan ekonomi melaju lebih cepat, yakni 6,3% dan 5,8%, dibandingkan laju inflasinya sebesar 4% pada kedua tahun itu.
2. Subsektor yang menarik pertumbuhan ekonomi nasional pada periode 2012-2013 adalah jasa (pengangkutan dan komunikasi, konstruksi, jasa keuangan, *real estate*, dan perusahaan) dan subsektor penggalian. Selain itu, subsektor pertambangan nonmigas dan perikanan masih cukup baik. Menurunnya daya saing perdagangan Indonesia pada 2012-2013 menunjukkan bahwa subsektor yang menarik pertumbuhan ekonomi nasional belum optimal mendorong daya saing. Pemerintah perlu meningkatkan daya saing di pasar internasional. Pengembangan sektor industri berbasis

pertanian, industri kelautan/maritim, dan manajemen energi (SDA migas) adalah upaya tepat untuk memulai peningkatan daya saing ekonomi nasional. Dengan demikian diharapkan rupiah stabil karena CAB tidak lagi defisit dan proporsi tabungan nasional per PDB bisa meningkat dibandingkan saat ini, yakni 30,7% (Gross National Saving/ GNS per PDB) atau 31% (M2-M1 per PDB). Peningkatan GNS per PDB ini diperlukan untuk jangka panjang guna mengurangi ketergantungan terhadap PMA. Dengan kata lain, akumulasi tabungan nasional dan modal ekonomi idealnya berasal dari kekuatan domestik.

3. Proporsi investasi (PMTDB) terhadap PDB harga berlaku Indonesia meningkat dari 20% (2001) menjadi 32% (2013). Sejumlah hal yang harus diperhatikan: Pertama, nilai ICOR terus menurun dari 4,45 (2000-2008) menjadi 3,92 (2009-2012); Kedua, kontribusi PMA (*FDI inflows*) masih rendah, yaitu pada kisaran 2,18% pada 2012, namun terus meningkat sejak krisis keuangan global, yakni dari 0,89% pada 2009. Ini berarti investasi di Indonesia semakin efisien dan menarik. Namun, infrastruktur dan kualitas SDM Indonesia masih belum cukup bagus, terutama bila dibandingkan dengan negara lain. Sebagai catatan, ditemukan adanya inkonsistensi data berupa *underestimate* (kekurangan hitung) data deflator impor dan *overestimate* (kelebihan hitung) data deflator ekspor yang diduga menjadi penyebab inkonsistensi menurunnya angka ICOR sebagai indikator semakin efisiennya ekonomi. Sebab, fakta sebaliknya adalah infrastruktur dan SDM Indonesia masih rendah.
4. Dari perspektif akumulasi perekonomian, untuk menarik PMA dan menggeser motivasi investor asing dari *market seeking* (mencari pasar) dan *raw material seeking* (mencari bahan baku) menuju *efficiency vis-a-vis production-based seeking* (mencari efisiensi produksi), Indonesia harus meningkatkan kualitas SDM dari pekerja berkeahlian rendah menuju keahlian sedang dan, lalu, keahlian tinggi. Pekerja dengan tingkat keahlian sedang sebenarnya sudah mulai berkembang. Ini ditunjukkan oleh data pekerja dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas yang meningkat dari 20,71% (2001) menjadi 31,55% (2013). Sedangkan dari sisi gender terlihat bahwa untuk tingkat vokasi, jumlah pekerja perempuan kini lebih banyak dari laki-laki. Data menunjukkan bahwa proporsi perempuan berusia lebih dari 15 tahun per 100 orang laki-laki menurut tingkat pendidikan D-1/D-3 meningkat dari 98,2% (2004) menjadi 132,3% (2013). Perbaikan tingkat pendidikan tak hanya terjadi menurut jenis kelamin, tapi juga menurut wilayah kota dan desa. Angka pekerja dengan keahlian menengah kian meningkat termasuk jumlah perempuan di dalam kategori ini baik di kota maupun di desa.
5. Dari sisi pekerja dengan tingkat keahlian tinggi, Indonesia masih tertinggal. Ini dilihat dari dua indikator. Pertama, proporsi pengeluaran Indonesia untuk riset dan pengembangan per PDB harga berlaku masih cukup rendah, yaitu 0,08% (2009), lebih rendah dibandingkan Malaysia (1,01%) dan Thailand (0,25%). Kedua, jumlah peneliti bidang teknik dan rekayasa teknik Indonesia juga masih tertinggal. Misalnya, pada 2009 hanya ada 90 peneliti sedangkan di Malaysia mencapai 1.065 dan Thailand 332 orang. Jika setiap 1.000 penduduk membutuhkan seorang peneliti, Indonesia membutuhkan setidaknya 230 ribu peneliti bidang teknik. Angka yang sulit dijangkau dari kondisi saat ini.

BAB 3

Proses dan Perkembangan Industrialisasi

Bab ini membahas pola alokasi sumber daya yang terjadi di Indonesia periode 2000-2012. Pertama, pola umum transformasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, termasuk analisis hubungan antarpulau untuk melihat pergeseran sumber daya selama jangka waktu tersebut. Kedua, alokasi sumber daya berdasarkan *output* klasifikasi lapangan usaha (sektor dan subsektor) untuk melihat pola transformasi struktural dalam periode itu.

3.1. POLA UMUM TRANSFORMASI INDUSTRI

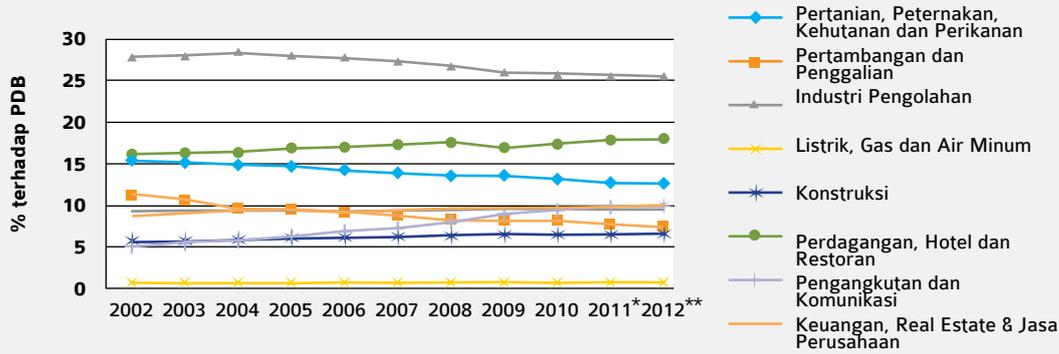
Pola transformasi sektor industri di kelompok negara pendapatan menengah menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor industri biasanya tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi. Di Korea Selatan misalnya, walaupun negara ini sudah berada di kelas negara berpendapatan tinggi, pertumbuhan sektor industri sampai saat ini masih lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi (**Tabel 3.1** dan **3.2**). Teori transformasi struktural Chenery-Syrquin (1975) telah mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor industri akan jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian seiring meningkatnya pendapatan per kapita. Hingga suatu tingkat pendapatan per kapita tertentu, pertumbuhan sektor industri akan melambat digantikan oleh pertumbuhan sektor jasa. Namun, yang menjadi pertanyaan, kapan sektor industri tumbuh melambat dan digantikan perannya oleh sektor jasa?

Indonesia adalah negara besar dengan

jumlah penduduk banyak, wilayah luas, serta sumber daya alam melimpah. Karakteristik sebagai negara besar mempengaruhi pola transformasi struktural yang berbeda dengan sejumlah negara lain. Negara besar memiliki daya serap pasar yang tinggi dan membuka banyak peluang bagi berbagai industri untuk tumbuh. Pasar yang besar memungkinkan industri berkembang hingga mencapai skala ekonomis untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Pada akhirnya aneka ragam jenis industri bisa tumbuh di negara besar memanfaatkan pangsa pasar domestik yang jembar.

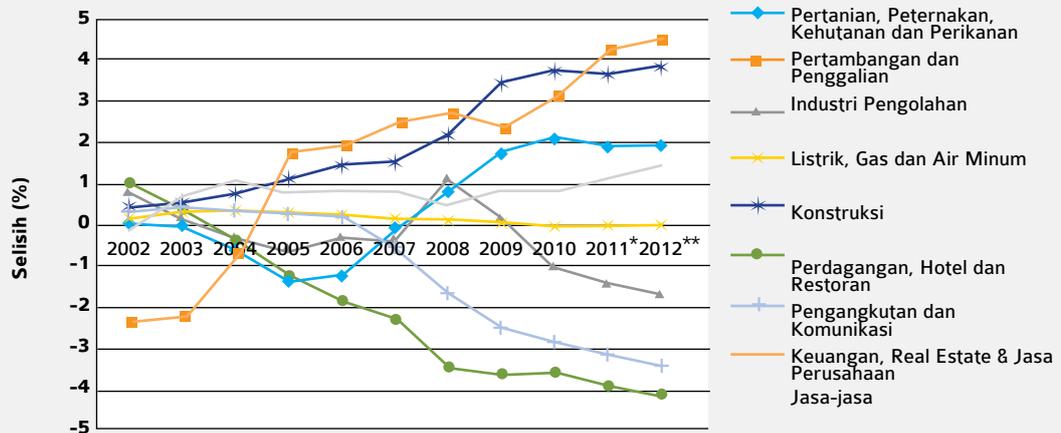
Tabel 3.1 kolom International Standard Industrial Classification/ISIC 2-5 menunjukkan bahwa pada periode 2000-2010 pertumbuhan sektor industri (4,1%) sudah lebih rendah dari pertumbuhan PDB nasional (5,3%). Padahal, tingkat pendapatan per kapita Indonesia masih tergolong menengah bawah. Pada periode sebelumnya, yaitu 1980-1990 dan 1990-2000, sektor industri masih tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB. Hasilnya, seperti ditunjukkan **Gambar 3.1** dan **3.2**, proporsi sektor manufaktur terhadap PDB mulai 2004 mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perkembangan sektor manufaktur melambat dan perannya digantikan sektor jasa, yang pertumbuhannya lebih tinggi daripada pertumbuhan PDB. Peran sektor manufaktur yang menurun bertentangan dengan pola umum di negara besar lain seperti Cina, Korea Selatan, dan Thailand.

Gambar 3.1
Struktur PDB Indonesia Terinci Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2002-2012 (%)



Sumber: BPS, diolah

Gambar 3.2
Selisih Struktur PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000, Terinci Menurut Lapangan Usaha (%)



Sumber: BPS, diolah

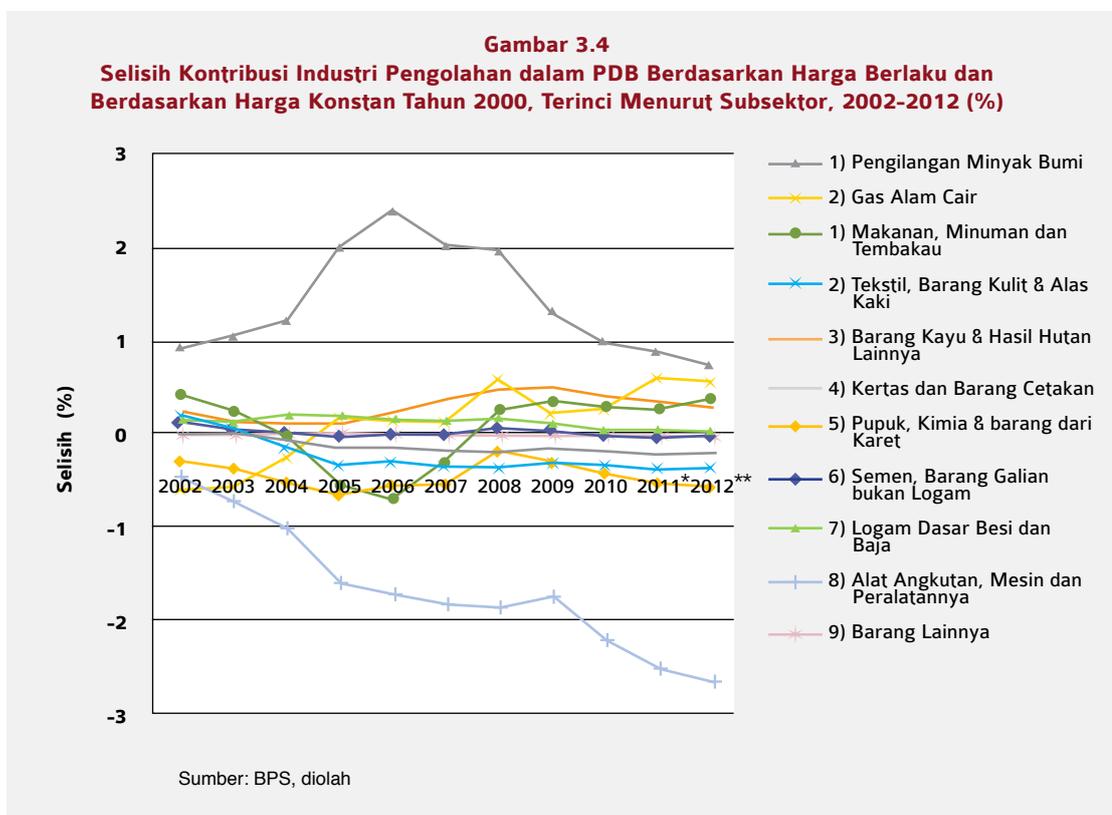
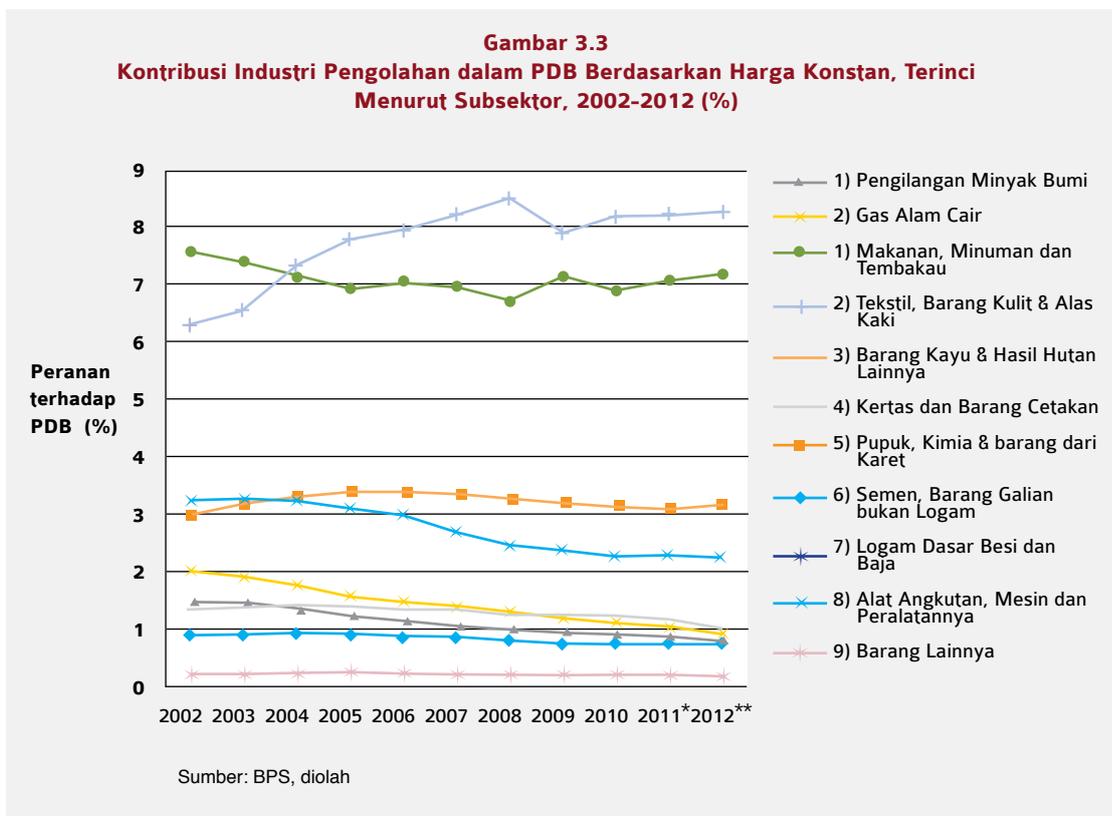
Sejumlah literatur mengenai transformasi struktural, seperti Chenery (1982), berargumen bahwa negara besar—yang jumlah penduduknya banyak dan kekayaan alamnya berlimpah—memiliki kemampuan membangun industri yang lebih besar ketimbang negara kecil. Lantaran pasar domestiknya luas, negara besar seperti Cina, India, dan Brazil, memiliki struktur industri yang lebih besar dan beragam dibandingkan negara kecil. Akibatnya, sektor industri memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan berkembang di atas pertumbuhan rata-rata sektor lain. Proporsi sektor manufaktur di Indonesia yang menurun sejak 2004 mengindikasikan gejala pertumbuhan jangka panjang yang berbeda dengan negara besar lain.

3.2. PERGESERAN STRUKTUR INDUSTRI MANUFAKTUR

Seiring makin tingginya pendapatan per kapita suatu negara, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB kian besar. Pada saat itu juga struktur industri manufaktur mengalami pergeseran. Proporsi industri padat karya dan padat sumber daya alam semakin turun, tapi proporsi industri padat modal dan teknologi terus naik.

Gambar 3.3 dan **3.4** menunjukkan bahwa hingga tahun 2012 industri alat angkatan dan industri makanan, termasuk minuman dan tembakau, adalah dua sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDB. Adapun kontribusi industri pupuk, termasuk kimia dan barang dari karet; industri semen dan barang

galian bukan logam; serta industri lainnya; jauh di bawah dua industri tadi.



Tren perubahan proporsi industri-industri tersebut membuka fakta menarik. Pertama, kontribusi industri padat karya dan sumber daya alam—seperti industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki; serta industri kayu dan hasil hutan lainnya—terhadap PDB terus merosot dalam sepuluh tahun terakhir. Kedua, pertumbuhan industri alat angkut yang cukup tinggi mengakibatkan kontribusinya terhadap PDB juga meningkat pesat dalam periode yang sama. Ketiga, pada saat yang sama industri padat modal dan teknologi—seperti industri pupuk, kimia, dan barang dari karet; industri semen dan barang galian bukan logam—tidak meningkat signifikan sehingga kontribusinya terhadap PDB relatif stabil. Keempat, ada jenis industri padat modal dan teknologi, yakni industri logam dasar besi dan baja, yang kontribusinya terhadap PDB menurun. Ini berarti pertumbuhan industri ini di bawah pertumbuhan PDB.

Keempat fakta di atas menunjukkan bahwa industri padat karya dan sumber daya alam sudah mulai kehilangan daya saing. Hal ini disebabkan, antara lain, kenaikan upah tenaga kerja dan kelangkaan sumber daya hutan dalam sepuluh tahun terakhir. Walaupun kontribusi industri alat angkut terhadap PDB meningkat pesat, tapi industri padat modal dan teknologi relatif tak tumbuh secara signifikan, bahkan sumbangannya terhadap PDB kian merosot. Fakta ini adalah anomali pola umum pergeseran struktur industri, di mana peran industri padat modal dan teknologi semestinya meningkat pesat menggantikan industri padat karya dan sumber daya alam yang menurun ketika pendapatan per kapita suatu negara bertambah.

3.3. PULAU JAWA JENUH DAN KETIMPANGAN JAWA-LUAR JAWA MELEBAR

Transformasi sektor industri di Indonesia akan lebih dipahami dengan melihat proses tersebut di tiap pulau. Ini mengingat wilayah Indonesia yang luas dan pulau-pulainya tersebar. Apalagi, aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi di Jawa menyebabkan ketimpangan yang tinggi dengan luar Jawa.

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa peran Pulau Jawa dalam aktivitas perekonomian nasional sangat dominan hingga kini. Kontribusi Jawa terhadap PDB pada 2012 mencapai 57,82%, turun sedikit dibandingkan tahun 2000, yakni 58,98%. Sedangkan, kontribusi Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara-Maluku-Papua pada 2012 masing-masing hanya 23,61%, 4,76%, dan 3,33%—naik tipis dibandingkan tahun 2000 yang mencapai 22,95%, 4,04%, dan 3,18. Sebaliknya, sumbangan Bali dan Kalimantan pada 2012 mencapai 1,25% dan 9,23%. Angkanya menurun dibandingkan pada 2000, yakni 1,27% dan 9,58%. Tren perubahan kontribusi masing-masing pulau mengindikasikan bahwa tak terjadi pergeseran aktivitas perekonomian antarpulau. Pulau Jawa masih tetap dominan.

Adapun indikator kepadatan aktivitas ekonomi diukur dengan menggunakan kepadatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kilometer persegi (rasio PDRB terhadap luas wilayah) dan kepadatan penduduk per kilometer persegi (rasio jumlah penduduk terhadap luas wilayah). Selama ini, kepadatan aktivitas ekonomi Pulau Jawa jauh di atas pulau-pulau lain. Pada 2012, kepadatan PDRB di Jawa sebesar Rp 29,27 miliar. Sedangkan kepadatan PDRB di Sumatera hanya Rp 3,33 miliar. Pada tahun yang sama, Kalimantan hanya Rp 1,69 miliar dan Bali-Nusa Tenggara-Maluku-Papua Rp 1,63 miliar. Fakta menarik lainnya, kepadatan PDRB di Jawa meningkat hampir tiga kali lipat dari 2004 hingga 2008. Kenaikan serupa terjadi di pulau-pulau lain kecuali Bali-Nusa Tenggara-Maluku-Papua yang meningkat sembilan kali lipat. Walau demikian, peningkatan kepadatan PDRB di Jawa secara absolut jauh lebih tinggi karena angka dasarnya sudah besar, yaitu dari Rp 10,13 miliar menjadi Rp 29,27 miliar.

Indikator kepadatan penduduk per kilometer persegi juga menunjukkan bahwa kepadatan di Jawa jauh lebih tinggi daripada pulau lain. Pada 2013, kepadatan penduduk di Jawa sudah di atas 1.000 per kilometer persegi. Sedangkan di Sumatera angkanya 104, Sulawesi 90, Bali-Nusa Tenggara-Maluku-Papua 34, dan Kalimantan 25 per kilometer persegi. Dibandingkan pada 2004, kepadatan di tiap pulau ini tidak mengalami

perubahan pergeseran berarti.

Proporsi PDRB dan penduduk di Jawa yang tinggi berpengaruh terhadap tingkat daya dukung pulau untuk terus menampung perkembangan aktivitas ekonomi. Tingginya kepadatan aktivitas ekonomi akan mempengaruhi harga-harga faktor produksi dan *input*-nya. Tak heran bila harga sewa tanah di Jawa meroket. Selain karena faktor lain seperti spekulasi, peningkatan kepadatan aktivitas perekonomian berkontribusi cukup besar terhadap kenaikan. Tingginya kepadatan aktivitas ekonomi di Jawa juga berpengaruh terhadap kenaikan upah. Ini disebabkan permintaan tenaga kerja yang semakin terpusat di suatu wilayah—dan tuntutan kenaikan upah dari tenaga kerja itu sendiri di alam demokrasi.

Penyebab utama aktivitas ekonomi masih terpusat di Jawa adalah kualitas infrastruktur di pulau ini jauh lebih baik dibandingkan dengan di pulau lain. Kualitas infrastruktur, salah satunya jalan raya, yang bagus akan meningkatkan daya tarik investasi suatu daerah. Dengan jalan yang bagus, akses terhadap bahan baku dan pasar hasil produksi jadi lebih mudah. **Tabel 3.5** menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur di Jawa jauh di atas rata-rata nasional. Untuk setiap kilometer persegi wilayah, panjang jalan di Jawa pada 2012 adalah 0,92 kilometer, naik dari 0,84 kilometer pada 2005. Bali memiliki infrastruktur jalan raya terbaik di antara semua pulau pada periode yang sama. Untuk setiap kilometer persegi wilayahnya, tersedia jalan sepanjang 1,31 kilometer, meningkat dari 1,17 kilometer. Adapun di pulau lain, ketersediaan jalan masih di bawah 0,5 kilometer per kilometer persegi.

Rendahnya ketersediaan infrastruktur di luar Jawa berimplikasi pada terkonsentrasinya investasi di Jawa. **Tabel 3.6** memperlihatkan bahwa realisasi investasi paling besar—baik

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun PMA—terjadi di Jawa. Dilihat dari lapangan usaha, realisasi investasi di sektor industri pengolahan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lain—dengan pengecualian PMA pada 2011. Ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah juga menjadi faktor penentu daya tarik investasi di tempat tersebut. Namun, hal itu tidak tercermin ketika dilakukan tabulasi silang antara



Keempat fakta di atas menunjukkan bahwa industri padat karya dan sumber daya alam sudah mulai kehilangan daya saing. Hal ini disebabkan, antara lain, kenaikan upah tenaga kerja dan kelangkaan sumber daya hutan dalam sepuluh tahun terakhir.

tingkat pendidikan tenaga kerja dan pulau seperti yang tertera pada **Tabel 3.8**. Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase tenaga kerja dengan pendidikan di atas SMP di Jawa berada pada kisaran 22% (2001) dan 34% (2013). Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Bali dan Sulawesi pada periode yang sama.

Hal tersebut bisa menjelaskan dua hal. Pertama, ketersediaan

infrastruktur menjadi pertimbangan yang lebih penting bagi investasi dibandingkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Kedua, investasi yang dikucurkan membutuhkan tenaga kerja berpendidikan tidak tinggi.

3.4. ALOKASI SUMBER DAYA

Untuk menjawab pola transformasi struktural yang terjadi di Indonesia seperti yang tersaji pada **Tabel 3.1** dan **3.2**, bagian ini akan menjelaskan perubahan struktural yang terjadi menurut lapangan usaha dan wilayah. Bila pada bagian sebelumnya diterangkan alokasi sumber daya berdasarkan sepuluh lapangan usaha besar dan lima pulau besar di Indonesia, kali ini alokasi sumber daya di sektor pertanian dan industri manufaktur menjadi pokok bahasan.

Dalam periode 2002-2012, sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB—walaupun menurun sejak 2005. Peran sektor pertanian juga mengalami penurunan, sedangkan sektor

pengangkutan dan komunikasi meningkat cukup pesat. Perubahan peranan lapangan usaha dalam pembentukan PDB Indonesia terlihat dalam **Gambar 3.1**. Penurunan sektor pertanian serta penggalian dan pertambangan sesuai prediksi teoretis bahwa seiring dengan meningkatnya pendapatan suatu negara, sebagian besar sumber daya suatu negara akan dialokasikan ke sektor industri pengolahan dan jasa. Menariknya, kontribusi industri pengolahan dalam PDB sedikit meningkat dan mencapai puncaknya pada 2004—menyumbang 28,4% PDB Indonesia. Namun, kontribusi kemudian menurun secara konstan hingga 2012—angka-nya menjadi 25,6%. Di sisi lain, dalam **Gambar 3.1** terlihat ada dua sektor yang perannya meningkat dalam pembentukan PDB pada 2002-2012, yaitu pengangkutan dan komunikasi (dari 5,1% menjadi 10,1%); serta perdagangan, hotel, dan restoran (dari 16,2% ke 18,1%).

Proporsi tenaga kerja di sektor pertanian turun drastis, sedangkan di sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan melonjak cukup tinggi. Menurut teori, perubahan peran sektor usaha dalam pembentukan PDB seharusnya sejalan dengan perubahan komposisi tenaga kerja antarsektor.

Proporsi tenaga kerja pada sektor primer akan berkurang seiring dengan menurunnya peran sektor primer dalam pembentukan PDB dan meningkatnya proporsi tenaga kerja pada sektor industri dan jasa. Namun, ada yang menarik dalam perbandingan tenaga kerja berdasarkan sektor usaha. **Tabel 5.5** pada Bab 5 menunjukkan persentase tenaga kerja di sektor pertanian serta jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan, mengalami perubahan paling besar ketimbang sektor lain. Proporsi tenaga kerja di sektor pertanian menurun dari 43,8% menjadi 34,4% pada periode 2001-2013. Adapun jasa kemasyarakatan, sosial,

dan perseorangan meningkat dari 9,1% menjadi 16,4% pada periode yang sama. Yang menarik, proporsi tenaga kerja di industri pengolahan tidak mengalami peningkatan besar—berubah dari 13,3% menjadi 13,4% pada periode itu. Ini bisa berarti tenaga kerja dari sektor pertanian lebih banyak pindah ke sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan dibandingkan ke industri pengolahan. Namun, bertambahnya peran jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan dalam PDB, tak sebesar peningkatan proporsi masyarakat yang bekerja di sektor tersebut. Artinya, produktivitas tenaga kerja di sektor itu rendah. Namun, hal ini baru bisa dikonfirmasi dengan melakukan tabulasi silang antara lapangan usaha dengan tingkat pendidikan tenaga kerja.

Melihat peran sektor usaha terhadap PDB harga berlaku dan PDB harga konstan seperti yang tersaji dalam **Gambar 3.2**, terdapat tiga sektor yang nilai selisihnya mengalami peningkatan, yaitu pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan pertanian. Hal ini mengindikasikan kenaikan harga pada ketiga sektor tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga rata-rata sektor usaha. Untuk pertambangan dan penggalian, kemungkinan besar bertambahnya selisih itu di-

akibatkan oleh kenaikan harga komoditas. Adapun untuk konstruksi dan pertanian, tingginya kenaikan harga bisa diakibatkan oleh keterbatasan lahan dan masih terfokusnya aktivitas perekonomian di Jawa dan Sumatera. Betul bahwa Jawa dan Sumatera menyumbang sekitar 80% dari total PDB (lihat **Tabel 3.5**), namun luas Jawa dan Sumatera hanya 31,9% total luas Indonesia. Tingginya aktivitas perekonomian dan terbatasnya lahan di dua pulau ini akan mengakibatkan kenaikan harga tanah. Ini didasarkan pada argumentasi bahwa pemilik lahan memiliki pilihan yang lebih banyak untuk menggunakan lahannya. Pada saat yang



Penurunan sektor pertanian serta penggalian dan pertambangan sesuai prediksi teoretis bahwa seiring dengan meningkatnya pendapatan suatu negara, sebagian besar sumber daya suatu negara akan dialokasikan ke sektor industri pengolahan dan jasa.

sama, produksi pertanian di Indonesia masih didominasi oleh Jawa dan Sumatera. Kedua pulau ini dalam periode 2000–2012 menyumbang sekitar 75% PDB dari sektor pertanian (lihat **Tabel 3.4**). Di sisi lain, proporsi tenaga kerja di sektor pertanian menurun drastis. Demikian juga produktivitas per tenaga kerja mengalami penurunan (lihat Bab 5). Kendala dari sisi suplai ini akan berimplikasi pada dua hal. Pertama, kenaikan harga produk pertanian yang lebih tinggi (seperti diindikasikan oleh meningkatnya peran sektor pertanian atas dasar harga berlaku dan harga konstan). Kedua, meningkatnya impor produk pertanian, terutama bahan pangan (lihat Bab 4).

Kontribusi kelompok pulau di Indonesia dalam pembentukan PDB menurut lapangan usaha dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.⁸ Tabel tersebut mengandung sejumlah fakta menarik, di antaranya:

- (1) Peran Sumatera dalam sektor pertambangan dan penggalian menurun drastis dari 54% (2000) menjadi 43% (2012). Sementara, Kalimantan naik cukup drastis dari 21% ke 37% pada periode yang sama.
- (2) Kontribusi Kalimantan dalam sektor industri pengolahan mengalami penurunan dari 12% menjadi 7,78% selama 2000-2012, sedangkan Jawa dan Sumatera naik dari 85% menjadi 88% pada periode tersebut.
- (3) Sektor konstruksi di Sumatera meningkat dari 19,3% menjadi 24,5% sepanjang 2000-2012. Di Jawa, angkanya menurun 64,4% menjadi 57,9% dalam rentang waktu tersebut.
- (4) Di sektor pengangkutan dan komunikasi, perubahan terbesar terjadi di Kalimantan—menurun dari 9,5% menjadi 6,6%. Di pulau lain, perubahannya pada kisaran 1%.
- (5) Untuk sektor keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan, terjadi kenaikan di Sumatera (dari 8% menjadi 13%) dan penurunan di Jawa (dari 83,7% ke 76%). Adapun pulau lainnya relatif tidak berubah.
- (6) Jawa mengalami penurunan dalam jasa

kemasyarakatan, sosial, dan perorangan dari 62% menjadi 59%. Sedangkan di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua terjadi sedikit peningkatan.

3.4.1. PERTANIAN

Pulau Jawa masih berperan sebagai kontributor terbesar dalam produksi tanaman bahan makanan dalam periode 2001-2013 seperti terlihat **Tabel 3.9**. Untuk padi dan jagung, sumbangan Jawa masih di atas 50% terhadap produksi nasional. Sedangkan untuk ubi kayu, menunjukkan tren menurun, dari 57% menjadi 46% pada periode tersebut. Namun, produksi ubi jalar di Jawa meningkat drastis pada 2013 sebesar 53% produksi nasional.

Besarnya pengaruh Jawa dalam produksi pertanian dan pada saat yang sama perekonomian masih terfokus di pulau ini seperti terlihat dalam **Tabel 3.3**, berakibat pada makin tingginya biaya kesempatan (*opportunity cost*) yang dihadapi pemilik lahan untuk mempertahankan area pertanian. Sehingga, insentif untuk mengalihkan lahan ke nonpertanian menjadi lebih tinggi. Jika ini terjadi, besar kemungkinan kenaikan permintaan (akibat pertumbuhan jumlah penduduk) tak bisa diimbangi oleh penambahan produksi. Akibatnya, impor meningkat. Hal ini dikonfirmasi pada Bab 4, yang menunjukkan adanya defisit pada komoditas dengan kode Standard International Trade Classification (SITC) 0, yakni makanan dan ternak. Khusus SITC 04 (sereal dan sereal olahan), mengalami defisit perdagangan pada periode 2008-2013.

3.4.2. INDUSTRI PENGOLAHAN

Industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB sektor industri pengolahan sejak 2004. **Gambar 3.3** menunjukkan perkembangan peranan subsektor dari industri ini dalam PDB atas dasar harga konstan. Dari gambar tersebut, terlihat empat subsektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam industri pengolahan, yaitu industri alat angkutan, mesin dan peralatannya, industri makanan, minuman,

⁸ Tabel 3.4 dihitung dengan menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku.

dan tembakau; industri pupuk, kimia dan barang dari karet; dan industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki. Adapun **Gambar 3.4** menunjukkan peranan industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya yang meningkat dan melewati industri makanan, minuman dan tembakau pada 2004. Berbeda dengan industri pupuk, kimia, dan barang dari karet yang relatif tidak banyak berubah, peranan industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki mengalami penurunan sejak 2004. Sehingga, posisi ketiga ditempati oleh industri pupuk, kimia, dan barang dari karet sejak tahun yang sama.

Secara umum, laju perubahan harga di sektor industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya adalah yang terendah. Perbedaan peranan subsektor pada industri pengolahan atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun 2000 tersaji pada **Gambar 3.4**. Nilai selisih positif menunjukkan kontribusi subsektor atas dasar harga berlaku lebih besar dibandingkan kontribusi subsektor berdasarkan harga konstan. Ini berarti, kenaikan harga di subsektor tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan subsektor lain. Sebaliknya, angka negatif menunjukkan kontribusi atas dasar harga berlaku lebih kecil daripada kontribusi atas dasar harga konstan. Artinya, kenaikan harga di subsektor tersebut lebih rendah ketimbang kenaikan harga subsektor lain.

Berdasarkan **Gambar 3.4** dapat ditarik sejumlah kesimpulan. Pertama, ada kecenderungan kontribusi gas alam cair meningkat. Kedua, kenaikan harga minyak bumi mengakibatkan selisih kontribusi meningkat dan mencapai puncaknya pada 2006, sebelum terus menurun. Ketiga, walaupun kontribusi subsektor industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya atas dasar harga konstan naik, namun selisihnya menunjukkan nilai negatif dan kian kecil. Hal ini berarti perubahan harga produk subsektor ini jauh lebih kecil dibandingkan subsektor lain.

Adapun kontribusi tiga subsektor utama dari industri pengolahan—yakni industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya; industri makanan, minuman, dan tembakau; serta industri pupuk, kimia, dan barang dari karet—

yang signifikan dalam pembentukan PDB, bisa jadi karena dua dari tiga industri tersebut berkarakter padat modal. Keduanya adalah industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya; serta industri pupuk, kimia, dan barang dari karet. Namun, perkembangan kedua industri tersebut bisa jadi lebih disebabkan oleh permintaan domestik ketimbang permintaan ekspor.

Hal ini diketahui ketika menilik struktur perdagangan untuk industri manufaktur. Pada periode 2008-2013, industri manufaktur selalu mengalami defisit perdagangan, yang puncaknya terjadi pada 2012 sebesar US\$ 54,1 miliar. Nilai perdagangan untuk industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya tercermin dari SITC 7 (mesin dan alat transportasi) mengalami defisit US\$ 42,8 miliar pada tahun yang sama. Sementara industri pupuk, kimia, dan barang dari karet nilai perdagangannya tercermin dari SITC 5 (barang kimia dan produk terkait) dengan nilai defisit sebesar US\$ 13 miliar (lihat **Tabel 4.1**). Untuk makanan, minuman, dan tembakau, statistik perdagangan internasional tak memasukkan jenis industri ini ke dalam kelompok industri manufaktur. Nilai perdagangan industri ini adalah penjumlahan dari SITC 0, 2, dan 4 dikurangi SITC 22, 27, dan 28. Memang neraca perdagangan untuk industri makanan, minuman, dan tembakau masih menunjukkan surplus. Tapi, surplus tersebut sebagian besar disumbang dari minyak nabati dan hewani (SITC 4), seperti minyak sawit (lihat Bab 4).

KESIMPULAN

Pola perkembangan sektor industri sepuluh tahun terakhir menunjukkan sejumlah fakta menarik yang saling terkait satu sama lain, yaitu:

1. Peran sektor industri dalam PDB yang menurun sejak 2004 sebagai akibat pertumbuhan sektor industri yang lebih rendah daripada sektor lain. Walaupun sektor industri ini berkembang positif tapi pertumbuhannya masih kurang bisa menopang transformasi struktural menuju negara berpendapatan tinggi. Mengacu pada pengalaman sejumlah negara besar di dunia, pola perkembangan sektor industri

di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir ini tergolong tak lazim. Pengalaman negara besar lain menunjukkan bahwa peran sektor industri terhadap PDB masih besar, bahkan ketika negara tersebut sudah berada di kelompok berpendapatan tinggi.

2. Transformasi struktural perekonomian Indonesia seperti meloncat dari sektor pertanian ke sektor jasa. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi tenaga kerja di industri pengolahan yang tidak mengalami peningkatan berarti. Tenaga kerja sektor pertanian bergeser

langsung ke sektor jasa tapi dengan tingkat produktivitas yang rendah—yang diindikasikan oleh rendahnya pertambahan tenaga kerja di sektor jasa tersebut daripada pertumbuhan nilai tambahnya.

3. Perkembangan aktivitas perekonomian begitu terpusat di Jawa. Selama sepuluh tahun terakhir pergeserannya ke pulau-pulau lain tak signifikan. Akibatnya, biaya produksi di Jawa jauh lebih tinggi karena daya dukung pulau kian terbatas dan biaya faktor produksi terutama tanah menjadi lebih mahal.

Perdagangan Internasional dan Kebijakan Makroekonomi

Perdagangan internasional di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah krisis finansial 1997/1998, akan dibahas dalam bagian ini. Kemudian akan digambarkan juga kondisi ekspor-impor sektor pertanian di Indonesia dalam kurun waktu 2008-2013. Tren ekspor-impor sektor manufaktur dan perdagangan sumber daya alam pada periode yang sama pun menarik untuk diulas lebih jauh. Pada akhirnya, pemerintah perlu menentukan arah kebijakan perdagangan dan industrialisasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

4.1. GAMBARAN UMUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Kondisi makroekonomi di Indonesia relatif stabil sejak 2003, yang ditandai dengan inflasi yang cukup rendah. Tingkat inflasi ini buah dari kebijakan pengetatan pertumbuhan jumlah uang yang beredar (*base money*) (Takii, 2004; dan Takii, 2006). Pengetatan tersebut merupakan salah satu fokus kebijakan bank sentral sebagai hasil dari kesepakatan dengan IMF. Meskipun indikator makroekonomi memperlihatkan kondisi yang baik, namun pertumbuhan investasi yang masuk ke Indonesia relatif stagnan. Rendahnya nilai investasi ini bisa berimbas pada turunya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Kecilnya angka investasi asing disebabkan oleh tingkat kepercayaan investor yang masih rendah sebagai akibat dari krisis finansial pada 1997/1998 (Takii, 2004; dan Takii, 2006).

Kondisi makroekonomi yang stabil ini terjadi

pada 2003 hingga 2011, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia saat itu mencapai titik tertinggi pascakrisis ekonomi 1997/1998 dengan pertumbuhan PDB sebesar 6,5% pada tahun 2011. Namun pada 2012 dan 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan—angkanya berturut-turut 6,3% dan 5,8%. Di sisi lain, untuk nilai FDI, terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada 2010. FDI yang sebelumnya berjumlah US\$ 4.877 juta, naik menjadi US\$ 13.771 juta pada 2010 dan terus naik pada tahun berikutnya. Pada 2011, nilai investasi asing di Indonesia mencapai US\$ 19.241 juta, sedangkan pada 2012 nilainya US\$ 19.138 juta. Proporsi FDI terhadap PDB melonjak sangat tinggi pada 2010-2012. Pada tahun 2009 proporsi FDI terhadap PDB hanya sebesar 0,89%, lalu meningkat menjadi 1,2% pada 2010, dan mencapai titik tertinggi pada 2011 dengan angka 2,26%.

Sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia berakhir, transaksi berjalan terus mengalami surplus. Di sisi lain terjadi defisit pada transaksi finansial dalam neraca pembayaran. Defisit ini tak hanya disebabkan oleh besarnya arus modal keluar (*capital outflow*) dalam bentuk investasi dan portofolio dari Indonesia, tapi juga berkurangnya investasi lain seperti pinjaman pemerintah Indonesia. Kondisi ini berbeda dengan periode sebelum krisis, di mana Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan yang masih bisa ditanggulangi oleh besarnya FDI dan portofolio yang masuk ke dalam negeri.

Tren ini berubah terutama pada periode 2011-2012. Pada tahun 2012, transaksi berjalan Indonesia mengalami defisit yang sangat besar dibandingkan periode sebelumnya dengan nilai defisit transaksi berjalan sebesar US\$ 24.418 juta dan semakin meningkat menjadi US\$ 29.130 juta pada 2013. Akan tetapi, transaksi modal dan finansial mengalami peningkatan dan surplus khususnya pada 2011-2012. Begitu pun arus investasi portofolio yang masuk mengalami surplus dan nilainya meningkat sejak 2011. Hal ini jauh berbeda dengan kondisi pascakrisis ekonomi 1997/1998. Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pemulihan kepercayaan dari investor asing terhadap kondisi Indonesia—yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai investasi, walau di sisi lain transaksi berjalan menunjukkan kondisi yang kurang menggembirakan.

Dari sisi perdagangan internasional, komoditas ekspor Indonesia masih didominasi oleh bahan mentah, produk pertanian, dan bahan mineral yang belum diolah. Sedangkan komoditas impor banyak didominasi oleh mesin (Takii, 2004; dan Takii, 2006). Besarnya nilai ekspor komoditas bahan mentah menyebabkan perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap perubahan harga komoditas global. Di sisi lain, impor mesin selalu naik, terutama kendaraan bermotor dan mesin pembangkit listrik. Hal ini merupakan bukti bahwa penduduk Indonesia punya kemampuan untuk menambah konsumsi produk kendaraan bermotor dan listrik.

Jepang merupakan daerah tujuan ekspor utama Indonesia, namun nilainya terus turun sejak tahun 1990-an (World Bank, 1983; World Bank, 1987; World Bank, 1989; dan World Bank, 1991). Di luar Jepang, Amerika Serikat dan Eropa merupakan pasar yang penting dengan nilai ekspor mencapai sepertujuh dari total ekspor Indonesia. Negara kita merupakan salah satu dari sekian negara di Asia Pasifik yang mengalami surplus perdagangan dengan Jepang. Ini disebabkan besarnya impor Jepang untuk produk mineral dari Indonesia.

Dalam data 20 negara tujuan utama ekspor Indonesia selama 2011-2013, Jepang berada di peringkat pertama. Nilai ekspor Indonesia

ke Jepang pada 2013 mencapai US\$ 24,33 miliar. Berikutnya Cina dengan nilai ekspor US\$ 19,3 miliar, Amerika Serikat (US\$ 14,54 miliar), Singapura (US\$ 14,3 miliar), dan India (US\$ 11,45 miliar). Total nilai ekspor Indonesia ke lima negara tersebut mencapai US\$ 84,03 miliar. Adapun total nilai ekspor Indonesia ke 20 negara tujuan utama pada 2013 mencapai US\$ 141,26 miliar.

Dari sisi impor, Cina, Singapura, dan Jepang merupakan negara importir utama Indonesia selama 2011-2013. Nilai impor Indonesia dari Cina pada 2013 mencapai US\$ 22,41 miliar. Pada tahun yang sama nilai impor dari Singapura mencapai US\$ 19,25 miliar, sedangkan dari Jepang sebesar US\$ 14,57 miliar. Total nilai impor lima negara importir terbesar ke Indonesia mencapai US\$ 75,03 miliar. Adapun total nilai impor Indonesia dari dua puluh negara importir utama sebesar US\$ 121,62 miliar. Sehingga, berdasarkan data perdagangan dengan dua puluh negara tujuan ekspor dan impor, terjadi surplus perdagangan bagi Indonesia.

Neraca perdagangan nasional secara konsisten mengalami surplus sepanjang periode 1998-2011. Namun, dalam beberapa tahun terakhir muncul gejala bakal terjadi defisit neraca perdagangan. Penyebab utamanya adalah Indonesia sejak 2004 tak mampu lagi memproduksi minyak bumi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemampuan produksi minyak bumi terus menurun. Inilah sebabnya Indonesia menarik diri dari keanggotaan organisasi negara penghasil minyak (OPEC). Meskipun demikian, transaksi berjalan, khususnya sektor gas, mengalami surplus yang besar sejak 2011. Sebabnya, cadangan gas Indonesia masih besar dan kebutuhan gas luar negeri yang tinggi.

Walau produksi minyak dalam negeri terus menurun, tingkat konsumsinya terus menanjak. Kebutuhan minyak, antara lain untuk transportasi, industri, dan listrik, makin meningkat seiring dengan tumbuhnya perekonomian. Saat ini sulit untuk menurunkan tingkat konsumsi minyak untuk kebutuhan transportasi karena belum terbangunnya sistem transportasi publik yang memadai. Dibandingkan negara-negara di Asia

Tenggara lainnya, Indonesia masih tertinggal dalam penyediaan transportasi umum. Sebab lainnya, harga minyak untuk kendaraan bermotor tergolong murah karena besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari pemerintah. Murahnya harga BBM membuat pemerintah dan swasta kesulitan untuk mengembangkan energi alternatif (misalnya *biofuel*) sebagai pengganti bahan bakar fosil.

Dalam tahun-tahun terakhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, neraca perdagangan Indonesia terus mengalami penurunan karena faktor BBM. Besarnya nilai impor minyak dan harga minyak dunia yang tinggi menjadi penyebabnya. Jika kondisi ini tidak lekas diatasi, Indonesia bisa kesulitan dalam melaksanakan pembangunan (Howes dan Davies, 2014; Armstrong dan Rahardja, 2014).

Dalam teori transformasi struktural yang dikembangkan oleh Chenery (1982), ketika pendapatan per kapita suatu negara meningkat, maka kegiatan ekspor pun akan mengalami perubahan. Negara-negara yang mengalami perbaikan ekonomi dengan mengekspor bahan mentah dan pertanian, akan bergeser menjadi pengekspor produk-produk industri dan manufaktur. Untuk kondisi Indonesia, kita akan melihat tren ekspor-impor untuk produk pertanian, sumber daya alam dan manufaktur sepanjang periode 2008-2013. Secara umum, kegiatan ekspor dan impor Indonesia masih didominasi oleh komoditas pertanian dan sumber daya alam.

4.2. EKSPOR DAN IMPOR KOMODITAS PERTANIAN

Kinerja sektor perdagangan di Indonesia dimotori oleh bidang komoditas dan pelayanan. Kegiatan perdagangan sektor manufaktur belum memperlihatkan tren menggembirakan. Sektor ini terus mengalami defisit perdagangan pada periode 2008-2013. Di sisi lain, pertumbuhan ekspor Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh lonjakan harga komoditas global (Nehru, 2013). Produk pertanian masih menjadi salah satu tonggak kegiatan ekspor-impor di Indonesia.

Tren ini memperlihatkan bahwa proses transformasi ekonomi Indonesia khususnya di bidang perdagangan belum berjalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Chenery (1982).

Berdasarkan **Tabel 4.1**, dari sisi ekspor, kegiatan perdagangan komoditas pertanian terus menunjukkan surplus—nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impornya (net ekspor). Kondisi ini disebabkan oleh besarnya net ekspor pada komoditas hewan, minyak dari tumbuh-tumbuhan, dan lemak (Standard International Trade Classification/SITC 4). Ekspor dari SITC 4 berkontribusi terhadap lebih dari 60% nilai ekspor produk bahan makanan pada 2013. Penyumbang terbesar kedua adalah komoditas makanan dan hewan hidup (SITC 0) dengan nilai mencapai 35% total ekspor bidang pertanian. Komoditas lain seperti minuman dan tembakau (SITC 1), dan biji minyak, kacang-kacangan, dan *kernel* (SITC 22), berkontribusi sangat rendah terhadap total ekspor bidang pertanian Indonesia.

Selama periode tersebut, impor komoditas bahan makanan didominasi oleh makanan dan hewan hidup (SITC 0). Nilai impor SITC 0 mencapai 80% dari total impor produk bahan makanan. Penyumbang terbesar kedua adalah biji minyak, kacang-kacangan, dan *kernel* (SITC 22) dengan proporsi 9% dari impor sektor bahan makanan.

Pada 2008, ekspor untuk komoditas makanan dan hewan hidup (SITC 0) mencapai US\$ 7,30 miliar, sedangkan nilai impornya mencapai US\$ 7,92 miliar. Sehingga, mengakibatkan net impor sebesar US\$ 618,64 juta. Selama lima tahun terakhir, Indonesia selalu mengalami defisit perdagangan komoditas makanan dan hewan hidup (SITC 0). Defisit terbesar terjadi pada 2011 ketika impor Indonesia mencapai US\$ 14,33 miliar, sedangkan ekspornya hanya mencapai US\$ 10,11 miliar. Dari sisi ekspor maupun impor, Indonesia mengalami tren penurunan komoditas yang termasuk dalam kategori SITC 0.

Ekspor dan impor komoditas minuman dan tembakau (SITC 1) berkontribusi sangat kecil terhadap total perdagangan pada kategori

bahan makanan pada kurun waktu yang sama. Pada 2013, Indonesia mengekspor produk yang tergabung dalam kode SITC 1 senilai US\$ 918,19 juta. Adapun nilai impor untuk kategori ini mencapai US\$ 596,67 juta pada 2013—turun dari US\$ 848,11 juta pada tahun sebelumnya. Nilai ekspor SITC 1 selalu positif selama lima tahun terakhir, meskipun laju pertumbuhannya menunjukkan tren yang menurun. Tren serupa juga dapat ditemukan pada nilai impor di SITC 1.

Sejak 2008, Indonesia selalu mengalami net impor, dengan kecenderungan terus meningkat, untuk tanaman bahan makanan. Sereal dan sereal olahan (SITC 04) menjadi penyumbang terbesarnya. Tren ekspor dan impor untuk sereal dan sereal olahan (SITC 04); buah-buahan dan sayuran (SITC 05); pakan ternak (SITC 08); gula dan madu (SITC 06); dan biji minyak untuk ekstraksi sayuran (SITC 22); selalu meningkat sepanjang 2010-2011. Pada periode lain, yakni 2009 dan 2012-2013, terlihat adanya tren negatif pada ekspor maupun impor (lihat **Tabel 4.2**).

Tren pada komoditas hasil peternakan menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami defisit perdagangan sejak 2008. Nilai impor untuk produk susu dan telur (SITC 02) mencapai US\$ 876 juta (2008) dan meningkat menjadi US\$ 951 juta (2013). Pada tahun yang sama, nilai net impor untuk komoditas SITC 02 mencapai US\$ 869 juta. Nilai ini turun dari tahun sebelumnya, yang mencapai sekitar US\$ 1,02 miliar. Dari tren pertumbuhan ekspor dan impor untuk komoditas hasil peternakan terlihat bahwa nilai rata-rata SITC 00, SITC 01, dan SITC 02, terus menurun pada 2012-2013 (lihat **Tabel 4.3**).

4.3. EKSPOR DAN IMPOR SEKTOR MANUFAKTUR

Ekspor dan impor manufaktur Indonesia cenderung meningkat sepanjang 2008-2013. Dilihat dari neraca perdagangan, komoditas sektor manufaktur masih mengalami defisit pada periode itu, meski nilai net impor pada 2013 jauh lebih kecil dibandingkan pada 2012 yang mencapai US\$ 54,17 miliar.

Ekspor manufaktur di Indonesia mengalami fluktuasi pertumbuhan dalam rentang waktu

tersebut. Pada 2008, nilai ekspornya mencapai US\$ 49,30 miliar, lalu menurun pada tahun berikutnya menjadi US\$ 47,16 miliar. Sempat tumbuh pada 2010 dan 2011, namun kembali merosot pada 2012 menjadi US\$ 67,69 miliar. Pada 2013 turun lagi ke tingkat US\$ 61,68 miliar. Sepanjang periode itu, ekspor di sektor manufaktur rata-rata tumbuh 5% tiap tahunnya (lihat **Tabel 4.1**).

Ekspor manufaktur di Indonesia didominasi oleh kelompok komoditas mesin dan alat transportasi (SITC 7). Kelompok produk ini berkontribusi sekitar 33% dari total ekspor manufaktur. Komoditas lain dari barang manufaktur yang menyumbang cukup adalah barang manufaktur (SITC 6)—tak termasuk SITC 68—dan aneka barang manufaktur (SITC 8), masing-masing 27% dan 15%. Adapun bahan kimia dan produk terkait (SITC 5) berkontribusi sebesar 15% ekspor komoditas manufaktur selama periode yang sama.

Impor Indonesia dari sektor manufaktur cenderung meningkat—seperti yang terjadi pada sisi ekspor. Pada 2008, nilai impor dari komoditas manufaktur mencapai US\$ 80,04 miliar. Nilai ini turun dari tahun 2009 yang mencapai US\$ 63,33 miliar. Sejak 2010, nilai impor merangkak naik dengan angka US\$ 87,62 miliar (2010), US\$ 107,87 miliar (2011), dan US\$ 121,87 miliar (2012). Pada 2013, impor sektor ini turun tajam menjadi US\$ 86,16 miliar. Rata-rata, impor sektor manufaktur di Indonesia berkembang pada tingkat 5% sepanjang 2008-2013.

Mesin dan peralatan transportasi (SITC 7) mendominasi impor sektor manufaktur di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Kelompok komoditas ini berkontribusi terhadap lebih dari setengah nilai impor sektor manufaktur. Komoditas barang kimia (SITC 5) dan barang manufaktur (SITC 6)—tidak termasuk SITC 68—berkontribusi terhadap 40% nilai impor sektor ini. Sisanya, berasal dari nilai impor aneka produk manufaktur (SITC 8).

Nilai impor untuk produk kimia dan terkait (SITC 5) terus meningkat sejak 2008. Impor bahan kimia organik (SITC 51) menyumbang sekitar 29% dari total impor SITC 5. Urutan

berikutnya plastik bentuk dasar (SITC 57) sebesar 20%. Hampir semua komoditas dalam SITC 5 menjadi net importir sejak 2008. Di antaranya, bahan kimia organik (SITC 51), bahan kimia anorganik (SITC 52), bahan pewarna (SITC 53), produk kesehatan dan farmasi (SITC 54), manufaktur pembuatan pupuk (SITC 56), plastik berbentuk bahan dasar (SITC 57), dan produk dan bahan kimia (SITC 59). Khusus plastik berbentuk nonprimer (SITC 58) mencatat surplus perdagangan antara 2008 dan 2009. Akan tetapi pada 2010-2013 menunjukkan tren defisit (lihat **Tabel 4.4**).

Barang-barang manufaktur di Indonesia (SITC 6) menunjukkan tren fluktuatif, baik dari sisi ekspor maupun impor. Ekspor barang manufaktur pada 2008 mencapai US\$ 19,29 miliar. Pada 2009, nilainya turun menjadi US\$ 17,07 miliar, namun sepanjang periode 2010-2011 terus tumbuh hingga mencapai US\$ 25,48 miliar.

Di sisi lain, nilai impor SITC 6 terus melonjak. Pada 2008, nilainya US\$ 20,15 miliar, yang kemudian menjadi US\$ 21,76 miliar pada 2013. Defisit perdagangan pada SITC 6 mencapai nilai tertinggi pada 2012, yakni sebesar US\$ 7,48 miliar. Besi dan baja (SITC 67) menjadi komoditas terbesar dalam SITC 6 yang diimpor sejak 2008. Pada 2013, defisit perdagangan untuk SITC 67 mencapai US\$ 7,36 miliar. Namun, ada juga industri manufaktur yang mengalami surplus, seperti kertas dan karton (SITC 64), kayu dan gabus (SITC 63), logam yang bukan besi dan baja (SITC 68), dan produk karet (SITC 62).

Menilik komoditas ISIC 32 dan kelompok komoditas yang termasuk di dalamnya (SITC 61, SITC 65, SITC 83, SITC 84, SITC 85), akan terlihat bahwa SITC 61 dan SITC 65 menjadi penyumbang defisit. ISIC 32 sepanjang 2008-2013 mengalami surplus dan mencapai nilai tertinggi pada 2011 dengan nilai net ekspor mencapai US\$ 9.279,51 juta. Dilihat dari nilai SITC di dalamnya, SITC 61 dan SITC 65 mengalami defisit pada 2008-2013. SITC 61 terus mengalami defisit sepanjang periode itu. Sedangkan SITC 65 sempat mengalami surplus pada 2008-2009, namun mengalami defisit pada periode selanjutnya. Penyumbang utama surplus bagi ISIC 32 adalah SITC 84 dan SITC 85.

Pada komoditas ISIC 33, terjadi surplus perdagangan sepanjang 2008-2012. Dua komoditas yang termasuk di dalamnya, SITC 63 dan SITC 82, memperlihatkan tren surplus sepanjang periode yang sama. SITC 63 menjadi penyumbang utama terhadap surplus di ISIC 33. Nilai surplus perdagangan untuk SITC 63 konsisten pada kisaran US\$ 2 miliar. SITC 82 juga mengalami surplus perdagangan sepanjang periode yang sama (lihat **Tabel 4.5** dan **Tabel 4.8**).

Sebagaimana ISIC 33, tren perdagangan ISIC 34 juga mengalami surplus perdagangan sepanjang periode 2008-2012. Komoditas SITC 64 menjadi penyumbang terbesar ekspor untuk ISIC 34. Surplus tertinggi terjadi pada 2010 dengan nilai US\$ 3.193,86 juta. Namun, sejak 2011-2012 mengalami penurunan. Adapun ISIC 89 justru mengalami defisit perdagangan. Defisit perdagangan komoditas SITC 89 terus meningkat sepanjang 2008-2012.

Tren di atas menunjukkan bahwa perdagangan Indonesia masih didominasi komoditas bahan mentah yang tidak memiliki nilai tambah tinggi. Jika tren ini berlanjut, pada masa yang akan datang Indonesia terancam sangat tergantung pada sumber daya alam. Selain itu, tanpa ada upaya untuk mengubah orientasi ekspor, khususnya pengolahan bahan mentah menjadi hasil olahan, neraca perdagangan akan terus terkena dampak buruk.

Komoditas barang dari logam, dan barang lain yang tidak dispesifikasikan (n.e.s.) selalu mengalami defisit perdagangan sejak 2008. Barang dari logam dasar, n.e.s. (SITC 699); dan paku, sekrup, dan baut (SITC 694) adalah dua komoditas utama yang menyebabkan tren ini terjadi. Angka defisit perdagangan kedua komoditas ini masing-masing US\$ 663,6 juta dan US\$ 484,5 juta. Sementara itu, kelompok lain seperti SITC 691 dan SITC 697 mencatatkan surplus (lihat **Tabel 4.6**).

Mesin dan peralatan transportasi (SITC 7) juga menghadapi defisit dari tahun 2008. Waktu itu, defisit perdagangan SITC 7 sekitar US\$ 26,71 miliar dan meningkat secara signifikan pada 2012 menjadi US\$ 42,86 miliar. Komoditas SITC 74 menyumbang sekitar 27% dari defisit

untuk komoditas mesin dan alat transportasi pada 2013 atau setara US\$ 6,41 miliar. Produk lain, yaitu SITC 71, SITC 72, SITC 73, SITC 75, SITC 76, SITC 77, SITC 78, dan SITC 79, menyumbangkan nilai US\$ 16,97 miliar dalam defisit perdagangan pada komoditas ini.

Nilai ekspor SITC 8 sejak 2008 selalu lebih besar ketimbang impor. Pada 2008, jumlah ekspor mencapai US\$ 11,63 miliar dan meningkat menjadi US\$ 16,51 miliar pada 2013. Ekspor SITC 84 menjadi penyumbang tertinggi tren ini. Jumlah ekspor SITC 84 pada 2013 sekitar US\$ 7,16 miliar. Tren ini diikuti oleh SITC 85 dengan nilai US\$ 3,52 miliar.

Adapun komoditas seperti SITC 89 dan SITC 87 menjadi kontributor terbesar bagi impor dalam kelompok komoditas yang termasuk ke dalam SITC 8. Angkanya pada 2013 berturut-turut mencapai US\$ 2,01 miliar dan US\$ 1,36 miliar untuk SITC 87. Kelompok SITC 8 menunjukkan kenaikan surplus perdagangan dari sekitar USD 7,9 miliar (2008) menjadi sekitar US\$ 10,45 miliar (2013). Dalam kelompok SITC 87, komoditas SITC 874 menjadi kontributor utama bagi defisit neraca perdagangan. Nilai defisit perdagangan untuk SITC 874 pada 2013 sekitar US\$ 759 juta. Pada tahun yang sama, SITC 882 dan SITC 885 mengalami defisit sebesar US\$ 54,5 juta dan US\$ 26,36 juta.

4.4. EKSPOR DAN IMPOR SUMBER DAYA ALAM

Sumber daya alam merupakan sektor yang paling penting dalam perdagangan internasional Indonesia selama 2008-2013. Nilai ekspor Indonesia untuk sumber daya alam pada 2008 mencapai US\$ 56,03 miliar lalu turun ke level US\$ 48,81 miliar pada 2009. Angkanya lalu naik signifikan pada 2011 yang mencapai US\$ 99,98 miliar, meski kemudian turun menjadi US\$ 86,63 miliar pada tahun berikutnya. Pada 2013, nilainya turun lagi menjadi US\$ 71,27 miliar. Rata-rata nilai ekspor sektor sumber daya alam tumbuh 8% tiap tahun (lihat **Tabel 4.1**).

Komoditas yang berperan sangat besar bagi ekspor sumber daya alam selama periode itu adalah kelompok komoditas primer. Komoditas primer berkontribusi sebesar 68% dari total

ekspor sektor sumber daya alam. Pada 2008, ekspor komoditas primer mencapai US\$ 37,43 miliar, sedangkan pada 2013 meningkat hingga US\$ 50,72 miliar. Meskipun nilai ekspor kelompok komoditas tersebut mengalami peningkatan, laju pertumbuhan komoditas ini mengalami penurunan pada periode yang sama. Ekspor komoditas lain seperti bahan baku – (SITC 2, bahan mentah) dan logam yang bukan besi dan baja (SITC 28: logam bijih dan metal scrap, dan SITC 68: non-ferrous metals) –hanya menyumbang sekitar 30% dari total ekspor. Adapun mineral yang belum diolah (SITC 27) tak terlalu mempengaruhi nilai ekspor sumber daya alam.

Impor sumber daya alam mengalami tren serupa pada periode yang sama. Nilainya mencapai US\$ 39,77 miliar pada 2008 dan kemudian turun ke titik US\$ 24,85 miliar pada tahun selanjutnya. Selama tiga tahun berikutnya, impor dari sumber daya alam naik dari US\$ 36,48 miliar (2010) ke US\$ 52,80 miliar (2011), lalu mencapai US\$ 53,98 miliar (2012). Akan tetapi, pada 2013 nilainya turun menjadi US\$ 42,31 miliar. Selama lima tahun itu, impor sumber daya alam tumbuh rata-rata 7% per tahun.

Sebagaimana pada ekspor, komoditas primer merupakan penyumbang terbesar impor sumber daya alam Indonesia. Kelompok ini menyumbang sekitar 78% dari total nilai impor. Kelompok komoditas lainnya—seperti bahan baku, logam yang bukan besi dan baja, dan mineral yang telah diproses—berkontribusi sekitar 22%. Pada 2008, impor komoditas primer mencapai US\$ 30,65 miliar dan pada 2013 berlipat menjadi US\$ 337,90 miliar. Meski angkanya naik, tingkat pertumbuhan impor Indonesia dari komoditas primer menurun sedikit sepanjang 2008-2013.

Kelompok komoditas primer (SITC 3) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perdagangan sumber daya alam Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor. Selama periode tadi, nilai ekspor kelompok komoditas primer selalu melebihi nilai impornya, sehingga berkontribusi besar dalam menciptakan surplus dalam neraca perdagangan. Nilai ekspor dan impor komoditas ini cenderung meningkat

selama periode tersebut. Namun, tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan. Sisi ekspor bahkan merosot drastis.

Ekspor dan impor komoditas SITC 28 dan SITC 68 juga cenderung melonjak dalam periode yang sama. Kedua komoditas ini berperan besar membuat perdagangan sektor sumber daya alam surplus karena nilai ekspor selalu melebihi impornya. Namun, dilihat dari tingkat pertumbuhannya, ekspor dan impor pada kategori ini menukik cukup tajam sepanjang 2008-2013.

Peningkatan nilai ekspor dan impor bahan baku selama periode itu juga dapat dilihat dari SITC 2, tapi tak termasuk SITC 22, SITC 27, dan SITC 28. Kategori ini mencatatkan surplus perdagangan dalam rentang waktu tersebut. Sehingga, berperan besar dalam membuat perdagangan Indonesia dari sumber daya alam secara keseluruhan surplus. Namun, pada tingkat pertumbuhan ekspor dan impor bahan baku trennya menurun. Adapun komoditas mineral yang belum diproses (SITC 27) hanya menyumbang kurang dari 1% total ekspor dan impor. Laju pertumbuhan ekspor untuk barang SITC 27 menunjukkan tren naik, sedangkan tingkat pertumbuhan impor memperlihatkan tren turun.

4.5. KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN INDUSTRIALISASI

Tak bisa dipungkiri, perdagangan internasional memegang peran penting terhadap industrialisasi dan transformasi ekonomi. Namun, saat ini ada ketakutan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia yang kian melambat dan proteksi oleh negara-negara industri akan menghambat ekspor dari negara berkembang. Faktor lain yang bisa jadi penghalang adalah kebijakan fiskal, moneter, dan nilai tukar yang tak efektif—walaupun pemerintah telah mengurangi kebijakan hambatan perdagangan (*trade barriers*). Inflasi dan overvaluasi nilai tukar bisa mengurangi minat investor untuk berinvestasi. Sejumlah literatur menunjukkan bahwa industrialisasi adalah elemen penting dalam pembangunan. Pengalaman dari negara industri menunjukkan bahwa ada hubungan antara

pertumbuhan ekonomi dan ekspansi industri. Selain itu, industri memberikan *positive spillover* yang bermanfaat bagi sektor lain, seperti meningkatnya keahlian, pelatihan tenaga kerja, dan perkembangan teknologi.

Muncul pertanyaan, haruskah Indonesia berfokus hanya pada industri yang memberikan nilai tambah tinggi dan mengesampingkan industri bahan makanan dan bahan mentah? Sebab, banyak juga negara yang sejahtera dengan berfokus pada produksi dan ekspor bahan makanan dan bahan mentah. Negara seperti Australia, Kanada, Denmark, Swedia, Selandia Baru, serta negara pengekspor minyak adalah contoh nyata. Pada tahap tertentu, pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa disebabkan oleh tingginya penghasilan dari sektor pertanian, industri, jasa, atau permintaan pasar terhadap produk-produk tersebut.

Rencana jangka panjang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah meningkatkan efisiensi dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur. Negara berkembang bisa mewujudkan hal tersebut, antara lain, dengan melakukan reformasi di tiga area penting—walaupun hasilnya mungkin berbeda, tergantung karakteristik masing-masing negara. Pertama, reformasi perdagangan. Negara berkembang seperti Indonesia mulai menjalankan kebijakan *outward oriented*, yang berarti mengurangi tarif dan mengadopsi nilai tukar yang realistis. Kedua, kebijakan makroekonomi. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengurangi defisit perdagangan dan memberikan insentif agar nilai tabungan naik. Memastikan nilai suku bunga riil yang positif, nilai tukar yang kompetitif, dan nilai inflasi yang rendah tak hanya akan meningkatkan persediaan sumber pendanaan finansial dalam negeri, tapi juga membantu pelaksanaan reformasi perdagangan. Ketiga, menciptakan lingkungan domestik yang kompetitif. Pemerintah pun mesti mereformasi kebijakan, seperti memperbaiki iklim investasi, regulasi, dan pasar tenaga kerja. Kebijakan ini bakal melengkapi pelaksanaan reformasi perdagangan dan mempromosikan kebijakan adopsi teknologi yang hemat biaya. Akan

tetapi, reformasi saja tidak cukup. Dibutuhkan pertumbuhan dan perbaikan di segala lini. Peningkatan dari arus modal masuk ke Indonesia juga sangat dinantikan.

4.6. REFORMASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Pasar dan pemerintah saling terkait satu sama lain di sektor perdagangan. Ekonom dan para pembuat kebijakan di negara berkembang berpendapat bahwa pemerintah mesti aktif dalam menyediakan infrastruktur untuk menggenjot kegiatan perekonomian dan menghasilkan kondisi makroekonomi yang lebih stabil. Untuk mencapai hal itu dibutuhkan reformasi kebijakan perdagangan.

Kebijakan perdagangan bisa berkarakter orientasi ke luar (*outward oriented*) dan orientasi ke dalam (*inward oriented*). Kebijakan *outward oriented* berarti memberikan insentif terhadap produksi untuk kebutuhan domestik dan ekspor. Namun, ini bukan berarti menganakemaskan kebijakan ekspor dan anti terhadap substitusi impor. Sebaliknya dalam kebijakan *inward oriented*, pemberian insentif difokuskan pada peningkatan kebutuhan pasar domestik dan anti terhadap perdagangan internasional. Kebijakan ini sering disebut juga dengan proteksi secara berlebihan.

Kedua kebijakan itu saling bertolak belakang mengenai nilai mata uang dan proteksi. Strategi *outward oriented* lebih mendukung tarif ketimbang restriksi atau kuota jumlah barang. Pengurangan tarif ini biasanya berseberangan dengan kebijakan lain seperti subsidi untuk produksi. Kebijakan ini pun berusaha menjaga nilai tukar pada tingkat yang sama dengan nilai insentif untuk menghasilkan ekspor. Pengurangan tarif bisa meningkatkan produktivitas dengan turut menghadirkan kompetitor impor yang kompetitif (Amiti dan Konings, 2007). Sebaliknya *inward oriented* cenderung menyukai restriksi jumlah atau kuota dibandingkan tarif. Ditambah lagi dengan level proteksi yang tinggi. Pada saat diterapkan terjadi overvaluasi terhadap nilai tukar. Insentif industri biasanya diikuti dengan proses birokratis yang sangat mahal.

Seperti kebijakan pada umumnya,

perubahan menuju kebijakan *outward oriented* membutuhkan ongkos transisi. Sering kali kebijakan reformasi perdagangan dibuat di tengah krisis ekonomi—yang diasosiasikan dengan defisit neraca pembayaran dan anggaran negara, serta inflasi yang tinggi. Sebab itu, reformasi perdagangan baru bisa optimal ketika perubahan kebijakan dilakukan secara menyeluruh dan signifikan. Hal ini akan menambah kredibilitas pembuat kebijakan terhadap pelaksanaan reformasi.

Kebijakan makroekonomi yang stabil—dicapai dengan menjaga nilai inflasi tetap rendah dan nilai mata uang yang tak mengalami apresiasi—sangat krusial diterapkan agar reformasi perdagangan bisa berjalan baik. Banyak kebijakan perdagangan diputuskan ketika kondisi makroekonomi jauh lebih buruk dibandingkan kondisi perdagangan. Kebijakan memang acap kali ditentukan oleh kondisi neraca pembayaran dan makroekonomi.

Sejumlah pengalaman memperlihatkan bahwa performa ekspor sangat berkaitan dengan tingkat dan stabilitas dari nilai tukar. Penggunaan nilai tukar untuk menstabilkan harga domestik inkonsisten dengan reformasi kebijakan perdagangan. Sebagai contoh, di Amerika Latin arus modal yang masuk menimbulkan apresiasi nilai tukar mata uang, sehingga nilainya melebihi insentif peningkatan produksi ekspor dan substitusi impor. Arus modal masuk yang kian besar sebagai akibat dari reformasi pasar finansial menyebabkan nilai suku bunga domestik dan nilai pinjaman dari luar negeri melonjak tajam.

Belajar dari negara-negara tersebut, Indonesia bisa berfokus pada tiga elemen utama reformasi kebijakan perdagangan internasional. Pertama, bergeser dari restriksi jumlah barang (kuota) menuju penetapan tarif. Ini merupakan penghubung antara harga domestik dan harga internasional. Kedua, mengurangi variasi tingkat proteksi dan mengurangi nilai proteksi secara umum. Ketiga, melakukan promosi dan memasarkan produk ekspor secara langsung untuk mengurangi bias yang terjadi akibat meningkatnya tarif impor.

Kebijakan terkait yang juga bisa dilakukan

untuk menggenjot perdagangan adalah melakukan kombinasi kebijakan perdagangan dan kebijakan dalam negeri. Perdagangan dan kebijakan dalam negeri mempengaruhi biaya pekerja dan jumlah modal. Sebagai contoh nilai tukar yang mengalami overvaluasi meningkatkan permintaan terhadap modal dan tenaga kerja. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah menciptakan lingkungan perdagangan yang kompetitif. Ini bisa mengurangi kemungkinan terjadinya monopoli dan meningkatkan persaingan produksi yang menghasilkan harga kompetitif. Pemerintah pun bisa meniru kebijakan pemerintah Korea Selatan dengan membuat target ekspor bagi setiap sektor yang disertai insentif kemudahan pengucuran modal dan akses bagi perusahaan yang mampu mencapai target tersebut (Westphal, 1990).

KESIMPULAN

1. Secara umum, kondisi makroekonomi Indonesia sejak 2003 hingga 2011 ditandai dengan kondisi inflasi yang cukup rendah, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dan pertumbuhan FDI yang relatif tidak banyak perubahan sebagai imbas dari rendahnya kepercayaan investor pascakrisis 1997/1998. Kondisi ini berubah pada 2012-2013, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Di sisi yang lain, terjadi peningkatan nilai FDI yang sangat signifikan, khususnya sejak 2010. Nilai FDI tahun 2010 mencapai US\$ 13.771 juta, melonjak dari US\$ 4.877 juta pada 2009.
2. Sejak krisis ekonomi 1997/1998, transaksi berjalan terus mengalami surplus. Namun, di sisi lain terjadi defisit transaksi finansial dalam neraca pembayaran. Pada tahun 2011-2012, transaksi berjalan Indonesia mengalami defisit yang sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun transaksi modal dan finansial mengalami surplus dan terus meningkat sepanjang 2011-2012. Kondisi ini jauh berbeda dengan tren yang terjadi pascakrisis 1997/1998.
3. Komoditas ekspor utama Indonesia masih didominasi oleh bahan mentah, produk pertanian, komoditas primer, dan mineral. Di sisi lain, komoditas impor didominasi oleh mesin dan alat transportasi, serta produk-produk kimia. Daerah tujuan ekspor Indonesia masih ditempati Jepang, Cina, Amerika Serikat, Singapura, dan India dengan nilai mencapai US\$ 84,03 miliar.
4. Dilihat dari kegiatan perdagangan pada sektor pertanian, sepanjang periode 2008-2013, ekspor bahan makanan dan peternakan mengalami surplus. Untuk sektor bahan makanan, komoditas hewan, minyak dari tumbuh-tumbuhan dan lemak (SITC 4) berkontribusi terhadap lebih dari 60% nilai ekspor komoditas bahan makanan. Untuk impor, komoditas makanan dan hewan hidup (SITC 0) dan biji minyak, kacang dan *kernel* (SITC 22) mengalami defisit perdagangan.
5. Nilai ekspor impor sektor manufaktur terus mengalami peningkatan, namun nilai impor untuk sektor ini jauh lebih besar. Sehingga, sektor manufaktur masih mengalami defisit perdagangan. Ekspor dan impor pada sektor manufaktur didominasi oleh kelompok komoditas mesin dan alat transportasi (SITC 7).
6. Perdagangan hasil sumber daya alam menjadi sektor yang berperan sangat penting dalam perdagangan internasional Indonesia selama lima tahun terakhir. Komoditas yang berkontribusi secara dominan untuk sektor ini adalah produk primer (SITC 3). Sektor ini berkontribusi terhadap 68% dari total ekspor di sektor sumber daya alam.
7. Melihat tren perdagangan Indonesia, maka kegiatan transformasi struktural yang terjadi di Indonesia justru tidak mengikuti pola yang lazim terjadi. Terlihat jelas kegiatan perdagangan masih terfokus di sektor pertanian dan sumber daya alam. Jika ingin keluar dari perangkap pendapatan menengah, Indonesia semestinya mulai meningkatkan kegiatan ekspor komoditas barang setengah jadi atau barang jadi.

BAB 5

Ketenagakerjaan dan Kependudukan

Bab ini membahas mengenai proses demografi dan transformasi struktural yang terkait dengan kondisi ketenagakerjaan. Ada empat hal yang dijelaskan dalam bab ini. Pertama, investasi modal manusia dan tingkat kepentingannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, kondisi demografi terkait dengan komposisi dan persebaran penduduk serta potensi pengembangannya. Ketiga, profil ketenagakerjaan berdasarkan lapangan pekerjaan, tamatan pendidikan, dan status pekerjaan yang berhubungan dengan indikator tingkat pengangguran. Terakhir, kebijakan ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pengembangan penyerapan tenaga kerja di sektor formal, termasuk kebijakan pendidikan.⁹

5.1. MODAL MANUSIA DAN PEMBANGUNAN

Target pertumbuhan ekonomi dan distribusi akan tergantung pada arah perkembangan struktur perekonomian dalam 10-20 tahun ke depan, yang salah satu komponen utamanya adalah pengelolaan modal manusia di Indonesia. Foxley (2012) mendefinisikan kondisi suatu negara masuk perangkap pendapatan menengah ketika tingkat pertumbuhan ekonomi

tidak melebihi 5% dalam satu dekade.¹⁰ Adapun Indermit dan Kharas (2008) menjelaskan karakteristik perangkap pendapatan menengah mengacu pada kondisi kelompok negara berpendapatan sedang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah ketimbang negara berpendapatan tinggi maupun negara berpendapatan rendah.¹¹

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah atau cenderung moderat seringkali diasosiasikan dengan kondisi biaya produksi (Paus, 2014; Cai, 2012). Ada kecenderungan biaya produksi terus meningkat disebabkan kondisi institusi, keterbatasan kapasitas, dan kenaikan tingkat upah pekerja—yang menurunkan daya saing perekonomian apabila tidak terjadi transisi struktur ekonomi. Struktur ekonomi sektor primer dan juga manufaktur dengan nilai tambah rendah yang umumnya bertumpu pada ketersediaan pekerja *low-skill* (berkeahlian rendah), perlu beralih secara bertahap ke sektor formal jasa. Sektor ini bisa terus berkembang dengan nilai tambah tinggi dan memungkinkan struktur upah tinggi sesuai dengan penyerapan tenaga kerja berkeahlian sedang dan tinggi.

Berdasarkan World Development Report (2014), pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di Indonesia menurun dari 6% pada 1990-1992 menjadi sekitar 4% per tahun pada rentang 2009-2012. Bila dibandingkan dengan negara

⁹ Deskripsi aspek demografi, ketenagakerjaan, dan pendidikan di Indonesia, selain menggunakan data yang bersifat nasional, juga disagregasi konteks wilayah dan pulau. Dalam beberapa hal diperbandingkan juga dengan kondisi di negara-negara lainnya (pengalaman internasional). Terkait dengan catatan mengenai keterbatasan data yang digunakan, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi arah dan tren yang terbentuk, bukan pada besar magnitude (*per se*) perubahan yang terjadi.

¹⁰ Berdasarkan Paus (2014), negara-negara tersebut umumnya lebih berfokus pada upaya untuk menurunkan disparitas ekonomi dan pengelolaan demokrasi.

¹¹ Dikutip dari Cai (2012).

lain di ASEAN, hanya Singapura dan Myanmar yang mengalami peningkatan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja pada periode 2009-2012 dibandingkan dengan periode 1990-an. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Myanmar yang mencapai 7% pada 2009-2012 ditengarai merupakan kontribusi kebijakan keterbukaan ekonomi negara tersebut.

Dari indikator yang terkait dengan perkembangan modal manusia—misalnya dari aspek pendidikan dan kemampuan struktur ekonomi (*capabilities index*)—ranking Indonesia cenderung rendah jika dibandingkan dengan kelompok negara pendapatan menengah dan juga di kawasan ASEAN.¹²

Kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan investasi di bidang pendidikan akan mempengaruhi daya saing dan daya tarik potensi ketenagakerjaan yang dapat dikembangkan. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama pascakrisis 1998, didorong oleh pengelolaan kebijakan makroekonomi yang cukup hati-hati (*prudent*). Namun, kesinambungan pembangunan juga tergantung pada daya dukung perekonomian, di antaranya kondisi dan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia.

5.2. PROFIL DEMOGRAFI DAN POTENSINYA

Sebagai negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, perkembangan dan pengelolaan kependudukan merupakan faktor penting untuk meningkatkan daya saing perekonomian negara. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan pengelolaan kependudukan dan pengembangan sumber daya manusia akan menentukan pola perekonomian dalam jangka menengah dan panjang. Apakah akan tetap seperti saat ini atau akan ada kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mengubah struktur perekonomian dengan—ada atau tidak ada—perbaikan distribusi pendapatan.

Saat ini Indonesia berada pada kondisi

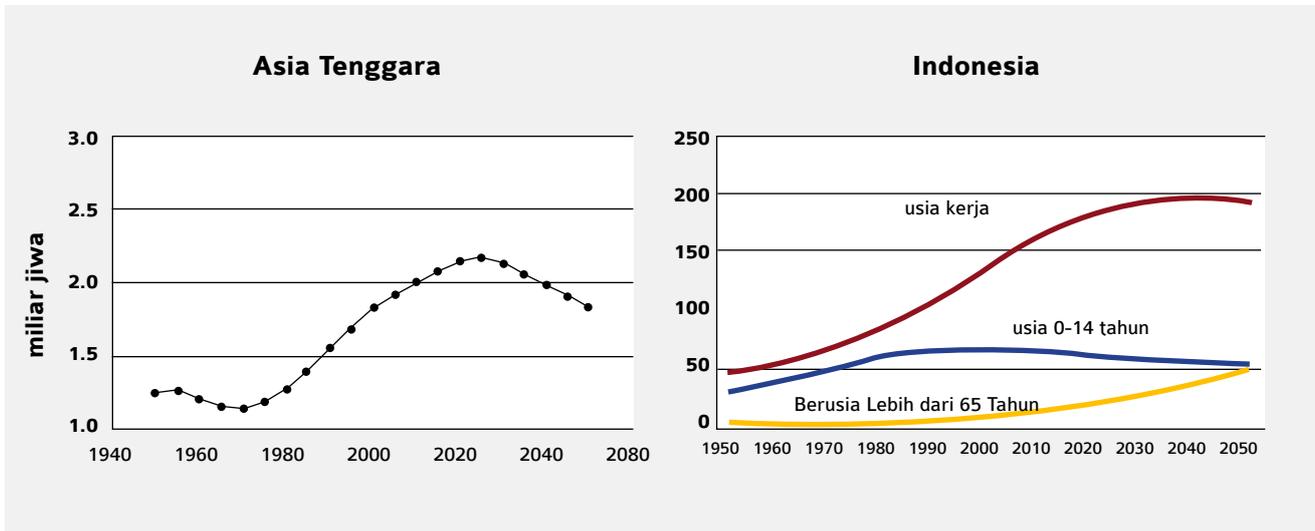
“bonus demografi”, yaitu sebuah negara berpotensi mendapatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi berkat penurunan angka ketergantungan (Bloom, Canning, dan Sevilla, 2003). Penurunan angka ketergantungan, atau rasio antara jumlah penduduk usia anak-anak dan lanjut usia yang dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif, merupakan hasil perubahan struktur umur penduduk dalam transisi demografi di Indonesia. Menurut Jones (2014), penurunan angka ketergantungan di Indonesia dipengaruhi oleh penurunan angka fertilitas dalam jangka panjang yang berakibat pada merosotnya proporsi penduduk usia anak-anak. Bloom dan Williamson (1998) berargumen bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada 1990-an di negara-negara Asia merupakan kontribusi dari kondisi dividen demografi (bonus demografi) dan adanya migrasi ke perkotaan dari kondisi *under-employment* di pedesaan.

Periode bonus demografi diperkirakan akan berakhir setelah angka ketergantungan mencapai titik terendahnya, yakni 44 per 100 penduduk usia kerja, pada 2030 dan akan meningkat sesudahnya. Sementara itu, proyeksi penduduk berdasarkan sensus 2010 memprediksi bahwa angka ketergantungan akan turun hingga mencapai 47 per 100 pada 2035 (BPS dan Bappenas 2014). Berdasarkan estimasi tersebut, Indonesia akan berada pada kondisi demografi yang optimal untuk membangun selama dua dekade ke depan (Jones 2014). Perbandingan tren pertumbuhan penduduk di Asia Tenggara dan Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

12 Berdasarkan studi Paus (2014), *capabilities index* merupakan indeks komposit yang terdiri dari: 1) indeks modal manusia, 2) indeks *knowledge economy*, 3) indeks daya saing global, 4) indeks daya saing industri, 5) indeks kinerja logistik, dan 6) indeks inovasi global.

Gambar 5.1
Tren Jumlah Penduduk Menurut Usia: Asia Tenggara dan Indonesia

Sumber: World Population Prospects (United Nations 2007) dalam Bloom dan Finlay (2009), Adioetomo (2011)



Dari **Tabel 5.1** terlihat bahwa persentase penduduk umur 65 tahun dan lebih yang bekerja cenderung meningkat selama periode 2001-2013. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penurunan angka ketergantungan perlu ditelaah dari tiga aspek. Pertama, sejauh mana hal tersebut terefleksikan oleh tingginya penyerapan pekerja usia produktif. Kedua, sejauh mana penduduk kelompok usia 65 tahun atau lebih tetap bekerja. Dan terakhir, bagaimana komposisi penduduk usia produktif menurut jenis kelamin. Apabila dikaitkan dengan produktivitas di pasar kerja, penduduk laki-laki dan perempuan cenderung memiliki pola berbeda. Demikian pula pada produktivitas berdasarkan persebaran pekerja menurut sektor ekonomi.

Tabel 5.2 menunjukkan proyeksi penduduk Indonesia untuk tahun 2015, 2020, dan 2025 menurut kelompok umur, jenis kelamin, serta rasio ketergantungan. Tidak terjadi banyak perubahan pola komposisi penduduk laki-laki dan perempuan, walaupun dari proyeksi penduduk 2015-2025 terlihat bahwa untuk kelompok usia 15-64 tahun, penduduk pria akan lebih sedikit dari perempuan (**Tabel 5.20**). Seiring meningkatnya proporsi penduduk usia produktif, implikasi dari menurunnya rasio laki-laki terhadap perempuan

untuk kelompok usia produktif perlu diantisipasi dengan kebijakan ketenagakerjaan terutama menyangkut jam kerja dan tingkat upah. Adapun proporsi jumlah penduduk umur 0-14 tahun akan mengalami tren menurun dan diikuti dengan peningkatan proporsi penduduk kelompok usia di atas 65 tahun pada periode 2015-2025.

Di Indonesia dengan ragam dan wilayahnya yang luas, distribusi atau persebaran penduduk merupakan indikator penentu sejauh mana aktivitas ekonomi suatu kawasan dapat dikembangkan. Dari **Tabel 5.3** terlihat bahwa Jawa merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi. Selain itu, pola persebaran penduduk antarpulau relatif tak banyak berubah dari 2001 hingga 2013. Kondisi pada 2013, apabila tingkat kepadatan di Jawa mencapai 1.097 penduduk untuk setiap kilometer persegi, di Kalimantan dan Maluku hanya sekitar 20-an jiwa. Di Papua, bahkan rata-rata hanya terdapat sembilan penduduk per kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi di Jawa pada satu sisi menggambarkan keterbatasan pemanfaatan lahan untuk aktivitas ekonomi, terutama yang terkait dengan sektor pertanian. Di sisi lain, padatnya penduduk dapat diartikan bahwa skala ekonomis untuk

membangun industri relatif telah terbentuk terutama untuk aktivitas ekonomi yang bersifat padat karya. Adapun dilihat dari perbandingan antara kawasan Indonesia Barat dan kawasan Indonesia Timur, perkembangan pola kepadatan penduduk juga tidak banyak berbeda antara tahun 2001 dan 2013.

Aktivitas ekonomi yang terpusat di Jawa cenderung mendorong migrasi penduduk ke wilayah tersebut. Ini menunjukkan bahwa migrasi terjadi ke wilayah dengan aktivitas ekonomi yang lebih berkembang. Seperti terlihat di **Tabel 5.4**, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Banten, dan Bangka Belitung merupakan contoh provinsi dengan peningkatan kepadatan cukup tinggi dalam periode 2001-2013. Ini mengindikasikan net migrasi penduduk ke provinsi dengan dominasi aktivitas ekonomi di sektor SDA migas dan nonmigas.¹³ Namun, penambahan penduduk di provinsi-provinsi tersebut belum mengubah pola distribusi penduduk antarpulau.

Urbanisasi menjadi fenomena terutama karena semakin terintegrasinya sarana transportasi sehingga memudahkan interaksi dan mobilitas penduduk. Konsentrasi sebagian penduduk, mengacu pada terpusatnya pekerja, lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan. Terdapat tiga pandangan penyebab urbanisasi. Pertama, adanya *urban biased*—penduduk pindah dari desa ke kota karena tingkat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan lebih baik di kota daripada di desa. Kedua, pertumbuhan penduduk natural di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan—walaupun kecil kemungkinannya menjadi faktor pendorong urbanisasi karena penduduk urban pada umumnya memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding pedesaan. Namun, ini juga berarti perkotaan memiliki fasilitas kesehatan lebih baik sehingga mempengaruhi tingkat kelahiran dan kematian yang lebih rendah dibanding pedesaan. Terakhir, adanya aglomerasi (atau disebut juga klaster), yang mengacu pada daerah yang sebelumnya bukan kota tapi kemudian berubah menjadi kota.

¹³ Peningkatan kepadatan penduduk juga dapat disebabkan oleh tingkat pertumbuhan penduduk natural (tingkat kelahiran dan tingkat mortalitasnya).

5.3. PROFIL KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan klasifikasi sembilan lapangan pekerjaan utama, proporsi total pekerja antarsektor selama periode 2001-2013 tidak banyak berubah. Dari **Tabel 5.5** terbaca bahwa mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian selama rentang waktu itu. Pada 2001, angkanya sekitar 44%, lalu turun ke level 35% pada 2013. Proporsi pekerja yang juga cukup dominan pada periode tersebut terdapat di sektor perdagangan dan industri pengolahan.

Bila dilihat dari tingkat pertumbuhan jumlah penduduk pekerja, pertumbuhan paling rendah justru terdapat di sektor penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Bahkan, sektor pertanian terpuruk ke tingkat pertumbuhan negatif. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh naiknya biaya produksi, khususnya pada sektor industri pengolahan.

Seperti terlihat di **Tabel 5.6**, pertumbuhan rata-rata tingkat upah sektor pertanian cukup tinggi, selain sektor pertambangan dan penggalian. Selama 2001-2012, sektor industri adalah yang tertinggi dibandingkan sektor lain, yaitu sebesar 30% per tahun. Pertumbuhan rata-rata tingkat upah yang cenderung tinggi untuk sektor industri pengolahan dan pertanian selama periode 2001-2013 dapat disebabkan oleh adanya perubahan pola aktivitas ekonomi di sektor tersebut. Misalnya, peningkatan penyerapan pekerja berkeahlian tinggi.

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada kelompok pekerja usia 15-34 tahun pada **Tabel 5.7**, ada penurunan persentase pekerja tidak tamat atau tamatan setingkat SD. Dari sekitar 40-50% pada 2001 menjadi 30% pada 2013. Kondisi ini masih jauh dari ideal bila dikaitkan dengan nilai investasi pendidikan yang saat ini diperlukan untuk kelompok penduduk usia muda ini. Jumlah pekerja kelompok usia 15-19 tahun semestinya makin sedikit.

Dari **Tabel 5.7** juga terlihat bahwa persentase pekerja tamatan SLTA Kejuruan (SMK) kurang dari 20% dari jumlah pekerja usia 20-24 tahun dalam periode yang sama. Proporsi tersebut lebih rendah dibanding pekerja tamatan

SLTA Umum (SMA), yakni sekitar 26%. Hal ini bisa menunjukkan bahwa jenis pendidikan SLTA Umum lebih banyak dipilih, walaupun sebagian besar tamatannya cenderung tidak melanjutkan kuliah atau tidak tamat diploma dan sarjana.

Di sisi lain, **Tabel 5.7** menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan persentase pekerja tamatan pendidikan minimal D-3 atau universitas. Persentase pekerja dengan tamatan minimal diploma dan sarjana kelompok usia 25-29 tahun kurang dari 10% pada 2001 dan 2007, lalu meningkat menjadi 15% pada 2013. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pekerja perempuan tamatan diploma atau universitas lebih besar dibandingkan dengan pria pada 2007 dan 2013.¹⁴

Penyerapan pekerja di sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan. Di perkotaan, penyerapan terbesar ada pada sektor perdagangan, industri pengolahan, dan jasa. Dibandingkan kondisi pada 2001, sektor penyerap tenaga kerja yang mengalami lonjakan adalah jasa kemasyarakatan. Sebaliknya, terjadi penurunan proporsi pekerja di sektor industri pengolahan selama periode 2001-2013. Peningkatan proporsi pada sektor jasa kemasyarakatan dan

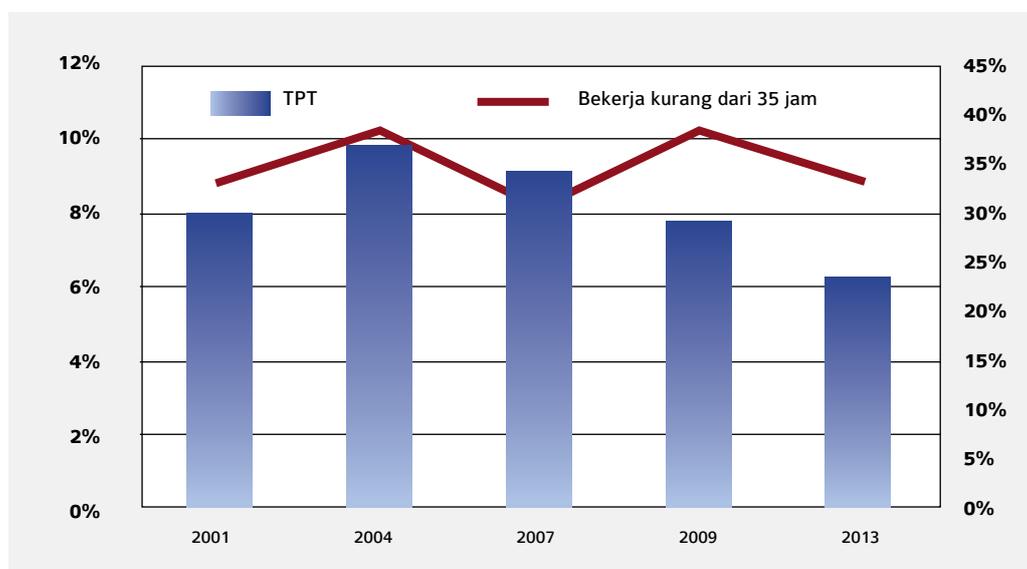
penurunan di sektor manufaktur bisa mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi yang berkembang justru sektor informal. Sektor ini dinilai kurang menciptakan ekspansi untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan dapat menimbulkan persoalan terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan, efisiensi pasar, kesinambungan program, serta sumber pendanaan pemerintah.

Adapun dari **Tabel 5.9** terlihat bahwa di wilayah pedesaan, jumlah pekerja di sektor pertanian sebagai penyerap terbesar menurun selama periode 2001-2013. Di sisi lain, proporsi di sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan yang pada 2001 sebesar 17%, naik hingga 25% pada 2013. Penyerapan di sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja dominan di wilayah pedesaan yang terus menurun, kemungkinan disebabkan perkembangan sektor tersebut yang melambat.

KONDISI PENGANGGURAN DI INDONESIA

Selama 2001-2013, Indonesia mengalami penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi satu digit. Meskipun, angka pengangguran setengah terbuka masih cukup tinggi. Apabila angka pengangguran

Gambar 5.2
Persentase Pengangguran Terbuka dan Persentase Pekerja dengan Jam Kerja Kurang dari 35 Jam



Sumber: Sakernas, berbagai edisi

14 Lihat Tabel 5.8.

mengacu pada definisi pengangguran terbuka, terdapat penurunan tingkat pengangguran yang sempat mencapai 10% selama 2004-2007, menjadi 7-8% pada 2009-2013. Dilihat dari struktur pekerja berdasarkan jam kerjanya, persentase penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam masih di atas 30% selama 2001-2013 seperti terlihat dalam gambar 5.2.

Adapun dilihat dari wilayahnya, tingkat pengangguran terbuka di desa relatif cukup tinggi. Selain itu, pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam satu minggu (bekerja tidak penuh), umumnya terserap di sektor pertanian, terpusat di desa (**Tabel 5.10**). Sebab itu, migrasi dari desa ke kota menjadi fenomena yang umum terjadi.

Pada 2013, angka pengangguran terbuka di Jawa dan Bali cenderung lebih rendah dibanding tahun 2001. Sementara, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua justru meningkat. Dari **Tabel 5.11** terlihat bahwa sebelumnya ada ketimpangan angka pengangguran terbuka cukup tinggi antarwilayah. Namun pada 2013 persentase pengangguran terbuka antarwilayah cenderung tak banyak berbeda—dengan Bali secara konsisten memiliki angka pengangguran terbuka paling rendah dibandingkan wilayah lain. Penurunan pengangguran terbuka untuk wilayah Jawa dan Bali juga menunjukkan bahwa penyerapan pekerja di dua wilayah ini tinggi.

5.4. PENYERAPAN TENAGA KERJA:

PERKEMBANGAN KE AKTIVITAS FORMAL

Keberlanjutan pembangunan ekonomi juga akan tergantung pada perkembangan produktivitas tenaga kerja. Secara umum, produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan rasio nilai tambah (PDB) untuk setiap *input* tenaga kerja. Atau, jika berdasarkan per nilai rupiah dari produktivitas pekerja, produktivitas berasosiasi dengan rasio dari nilai tambah aktivitas ekonomi terhadap total biaya *input* tenaga kerja (Kao, 2013). Dari studi Kao (2013) terlihat bahwa bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih di bawah Filipina, Malaysia, dan Singapura—walaupun masih lebih tinggi ketimbang Thailand.

Dengan adanya pergerakan ke arah industri padat modal, maka nilai tambah aktivitas ekonomi per tenaga kerja relatif konstan atau peningkatannya tidak sebesar dari produktivitas *input* modal.

Kenaikan tingkat upah dan kebijakan upah minimum bisa jadi tidak banyak berdampak pada mayoritas pekerja, terutama bila mereka berkuat di sektor informal. Dengan kebijakan upah minimum, pergerakan tingkat upah berperan signifikan dalam struktur biaya perusahaan yang bersifat padat karya untuk kelompok pekerja berkeahlian rendah.¹⁵ Namun demikian, peningkatan tingkat upah juga merupakan refleksi dari peningkatan standar hidup dan mempertimbangkan tren inflasi.¹⁶

Dilihat dari status pekerjaan, tenaga kerja Indonesia memiliki angka pekerja tidak dibayar yang lebih tinggi dibandingkan negara lain (**Tabel 5.13**), yaitu 8,1% dari total populasi. Di negara lain umumnya kurang dari 5%, terutama untuk pekerja pria. **Tabel 5.13** menggambarkan kondisi pekerja di Indonesia dibandingkan dengan kondisi di negara lain, khususnya yang terkait dengan komposisi perempuan dalam angkatan kerja dan tingkat upah pekerja perempuan. Dengan komposisi angkatan kerja relatif berimbang antara pekerja perempuan dan laki-laki, tingkat upah tenaga kerja perempuan relatif rendah dibandingkan dengan negara jiran seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia (**Tabel 5.13**). Ini tak lepas dari banyaknya pekerja perempuan yang termasuk setengah pengangguran terbuka atau bekerja di bawah 35 jam dalam seminggu, serta terkonsentrasinya kelompok ini di sektor pertanian (**Tabel 5.10**).

Produktivitas pekerja mesti ditingkatkan

15 Dalam hal ini, klasifikasi penduduk bekerja berdasarkan jenis pekerjaan dikelompokkan menjadi pekerjaan dengan kebutuhan kompetensi rendah-menengah, atau yang disebut dengan pekerjaan kerah biru (*blue collar*), mengacu pada jenis pekerjaan kelompok usaha pertanian, kehutanan, perburuhan, dan perikanan, serta tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar. Dalam Tabel 5.12, komposisi pekerja di sektor industri pengolahan polanya tidak berubah selama 2001-2013, yakni masih dominannya jumlah pekerja kerah biru—walaupun ada kenaikan pekerja kerah putih (*white collar*) tertinggi pada industri pengolahan pada periode yang sama.

16 Seperti terlihat di Tabel 2.29, berdasarkan nilai US\$, tingkat pendapatan per kapita telah meningkat hampir tiga kali lipat selama periode 2004-2013.

dengan mengalihkan aktivitas informal ke sektor formal. Sebabnya, produktivitas pekerja relatif lebih tinggi pada sektor formal ketimbang pada sektor informal. Berdasarkan tingkat pendidikannya, pekerja tamatan jenjang pendidikan rendah umumnya tak dapat masuk ke sektor formal. Pekerja informal terserap cukup tinggi di sektor perdagangan, jasa kemasyarakatan, dan pertanian. **Tabel 5.14** memperlihatkan bahwa sekitar 60% pekerja di sektor perdagangan adalah tamatan SD dan SMP. Demikian pula di sektor jasa kemasyarakatan. Sebanyak 30-40% pekerjanya bukan tamatan SMA atau pendidikan tinggi.

Sementara itu, **Tabel 5.15** dan **Tabel 5.16** menggambarkan pola sebaran pekerja antarpulau berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan kedua tabel tersebut, profil pekerja di Jawa tidak menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan di pulau-pulau lain. Jumlah pekerja dengan jenjang pendidikan minimal tamat SLTA masih belum dominan. Padahal, Jawa merupakan wilayah dengan konsentrasi pekerja di industri pengolahan mencapai 80% dari total pekerja di sektor industri ini.

Dalam **Tabel 5.15**, di Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua selama 2001-2013, persentase pekerja dengan pendidikan tak lebih dari tamatan SD dan SMP, masih di atas 75%. Struktur tenaga kerja di ketiga wilayah itu didominasi oleh mereka yang tidak lulus SD dan tamatan SD sebanyak 60%. Rendahnya tingkat pendidikan pekerja di Indonesia Timur ini menjadi kendala tersendiri untuk mengembangkan aktivitas ekonomi di wilayah ini.

Rendahnya keahlian tenaga kerja cenderung membatasi perkembangan industri di lingkup nasional dan daerah. Perubahan struktur ketenagakerjaan diperlukan untuk menjadi acuan, terutama perubahan bertahap jumlah pekerja dari tamatan pendidikan sekolah dasar dan menengah yang masih tinggi. Gambaran mengenai profil pendidikan yang ditamatkan dari populasi pekerja agregat nasional (**Tabel 5.8**) dan juga untuk tiap pulau (**Tabel 5.14**) secara tidak langsung memperlihatkan penerapan

kebijakan wajib belajar 12 tahun yang masih belum efektif. Dalam hal ini, kebijakan wajib belajar 12 tahun untuk penduduk usia sekolah ternyata belum mengikat masyarakat maupun pemerintah sebagai penyelenggara sebagian besar layanan pendidikan.

Apabila dilihat dari pola konsentrasi dan ragam aktivitas ekonominya, sektor formal di Jawa dan Sumatera masih bisa dikembangkan. Dalam **Tabel 5.16**, sekitar 80% pekerja di industri pengolahan terpusat di Jawa—juga sekitar 40% pekerja sektor pertanian. Sebab itu, jika pola pengembangan industri pengolahan tidak banyak berubah dan tetap akan terpusat di Jawa, diperlukan perubahan di sektor pertanian, yang didominasi pekerja informal, supaya pekerja tidak lagi tersentral di Jawa.

5.5. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA: INVESTASI DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN

Peningkatan produktivitas pekerja, dalam jangka menengah dan panjang, akan sangat tergantung pada kebijakan di bidang pendidikan. Produktivitas pekerja dalam mengacu pada nilai tambah pekerja untuk setiap tamatan pendidikan, khususnya pekerja tamatan pendidikan dasar dan pekerja lulusan pendidikan menengah atas. Oleh karena itu, penambahan produktivitas dapat mengacu pada peningkatan keahlian pekerja untuk penduduk yang sedang bekerja, dan mempersiapkan kelompok penduduk usia sekolah dengan memberikan akses dan kualitas layanan pendidikan. Komposisi pekerja berdasarkan tamatan pendidikan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, dengan target kelompok usia kerja 24-35 tahun, dalam lima-sepuluh tahun ke depan perlu fokus pada kebijakan melebarkan akses ke pendidikan tinggi.

Terkait desentralisasi, pemerintah daerah perlu didorong untuk mengembangkan kebijakan pendidikan vokasi yang berbasis keahlian teknis tertentu yang disesuaikan dengan perkembangan dan potensi aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Berdasarkan **Tabel 5.17**, untuk wilayah Indonesia Barat, jumlah penduduk

tamatan SMK mencapai 20-30% total penduduk dengan ijazah tertinggi pendidikan menengah atas. Sedangkan di Indonesia Timur penduduk dengan ijazah tamatan SMK masih sekitar 10-15%. Pendidikan menengah atas masih didominasi pendidikan umum seperti SMA— yang dari karakteristik pendidikannya, jenjang ini sebenarnya persiapan menuju pendidikan lanjutan.¹⁷

Sebab itu, perlu upaya untuk meningkatkan angka partisipasi murni, khususnya untuk jenjang pendidikan menengah atas yang relatif masih rendah. Dari **Tabel 5.18** terlihat bahwa di sebagian besar wilayah, angka partisipasi untuk pendidikan menengah atas masih kurang dari 60%. Ini mengindikasikan masih tingginya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan jenjang pendidikannya. Hal tersebut menjadi persoalan tersendiri dan mesti diidentifikasi penyebabnya. Apakah dari sisi suplai atau akses terhadap pendidikan, atau dari sisi permintaan yang terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan untuk kelompok populasi ini. Wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu kebijakan yang dapat membantu meningkatkan angka partisipasi murni di SMA. Ini ditunjang kebijakan mengurangi beban biaya pendidikan di SMA yang lebih mahal dibanding jenjang sebelumnya, lewat BOS (Bantuan Operasional Sekolah) atau beasiswa siswa miskin.

Peningkatan angka partisipasi sekolah ini perlu dilakukan juga di wilayah luar Jawa. Dikaitkan dengan kontribusi sektor pertanian yang cenderung menurun dan terkonsentrasi di Jawa, sektor ini perlu dialihkan ke luar Jawa. Namun, pengembangan sektor pertanian ke luar Jawa ini perlu mempertimbangkan pengembangan industri terkait. Untuk itu, kondisi awal yang penting untuk dibentuk adalah ketersediaan penduduk dan pekerja di wilayah tersebut dengan kapasitas dan kompetensi yang memadai.

17 Dari Tabel 5.16, juga terlihat bahwa jumlah penduduk dengan ijazah SMK lebih terkonsentrasi di Jawa, dibandingkan dengan sebaran penduduk dengan ijazah SMA. Hal ini kemungkinan juga disebabkan dari sebaran SMK menurut jenisnya, lebih banyak di Jawa.

KESIMPULAN

1. Proyeksi penduduk berdasarkan sensus 2010 memprediksi bahwa angka ketergantungan akan turun hingga mencapai 47 per 100 pada 2035 (BPS dan Bappenas 2014). Berdasarkan estimasi tersebut, Indonesia akan berada pada kondisi demografi yang optimal untuk membangun selama dua dekade ke depan (Jones 2014).
2. Berdasarkan proyeksi penduduk 2015-2025, untuk kelompok usia 15-64 tahun, penduduk laki-laki akan lebih sedikit dari perempuan. Adapun proporsi jumlah penduduk umur 0-14 tahun akan mengalami tren menurun dan diikuti dengan peningkatan proporsi penduduk kelompok usia di atas 65 tahun pada periode 2015-2025.
3. Profil pekerja di Jawa tidak menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan di pulau-pulau lain. Jumlah pekerja dengan jenjang pendidikan minimal tamat SMA masih belum dominan. Padahal, Jawa merupakan wilayah dengan konsentrasi pekerja di industri pengolahan mencapai 80% dari total pekerja di sektor industri ini. Sementara di Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua selama 2001-2013, persentase pekerja dengan pendidikan tak lebih dari tamatan SD dan SMP, masih di atas 75%. Struktur tenaga kerja di ketiga wilayah itu didominasi oleh mereka yang tidak lulus SD dan tamatan SD sebanyak 60%. Rendahnya keahlian tenaga kerja cenderung membatasi perkembangan industri di lingkup nasional dan daerah.
4. Dari tingkat pertumbuhan jumlah penduduk pekerja, angka paling rendah justru terdapat di sektor penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Sementara itu, pertumbuhan rata-rata tingkat upah sektor pertanian juga cukup tinggi, selain sektor pertambangan dan penggalian. Dan untuk periode 2001-2012, sektor industri adalah yang tertinggi dibandingkan sektor lain, yaitu sebesar 30% per tahun.

BAB 6

Rekomendasi Kebijakan: Peta Jalan Keluar dari Perangkap Pendapatan Menengah

6.1. TRANSFORMASI STRUKTURAL: SOLUSI MENGHINDARI PERANGKAP PENDAPATAN MENENGAH

Sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, selalu menghadapi risiko masuk perangkap pendapatan menengah. Untuk Indonesia mungkin itu bukan lagi risiko, tapi saat ini sedang mengalaminya—terjebak dalam pendapatan menengah bawah. Dengan menggunakan definisi perangkap pendapatan menengah sebagai penurunan signifikan kecenderungan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dapat dikatakan bahwa Indonesia masuk dalam jebakan tersebut setelah mengalami krisis ekonomi 1997/1998. Bandingkan rata-rata pertumbuhan jangka panjang sebelum krisis (1967-1996) yang mencapai 7-8% dengan rata-rata pertumbuhan setelahnya (2000-2013) sebesar 5-6%. Tahun 1997 hingga 1999 dikeluarkan dari perhitungan karena 1997/1998 adalah periode krisis, sedangkan pada 1999 perekonomian masih belum pulih betul—perekonomian hampir tidak tumbuh sama sekali. Barulah pada 2000 perekonomian berkembang lagi hingga sekarang. Penurunan kecenderungan pertumbuhan jangka panjang sebesar 2% itu merupakan bukti terperangkapnya perekonomian Indonesia dalam pendapatan menengah bawah.

Bank Dunia telah mengelompokkan negara berdasarkan pendapatan per kapita (1990 PPP US\$), yakni pendapatan rendah (hingga US\$ 2.000), pendapatan menengah bawah (US\$

2.000-7.250), pendapatan menengah atas (US\$ 7.250-11.750), dan pendapatan tinggi (lebih dari US\$ 11.750). Seiring berjalannya pembangunan, suatu negara akan mengalami kenaikan pendapatan per kapita—dengan asumsi tidak ada kejutan negatif yang dapat menyebabkan kontraksi perekonomian. Hal tersebut akan berujung pada naiknya peringkat negara tersebut ke kelompok negara dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Kenyataannya, pertumbuhan pendapatan per kapita berfluktuasi sehingga menjadi kendala dalam meningkatkan kelas pendapatan suatu negara. Bahkan, negara tersebut akan terperangkap dalam jebakan pendapatan menengah.

Studi Felipe (2012) menghasilkan ukuran yang menjadi dasar suatu negara dapat terperangkap pada jebakan pendapatan menengah, yang terbagi atas perangkap pendapatan menengah bawah dan perangkap pendapatan menengah atas. Tenggat suatu negara agar tak masuk dalam jebakan pendapatan menengah bawah adalah 28 tahun, sedangkan perangkap pendapatan menengah atas selama 14 tahun. Suatu negara bisa menghindari perangkap melalui keberlanjutan pertumbuhan pendapatan per kapita. Bagi negara berpenghasilan menengah bawah harus mencapai pertumbuhan minimal sebesar 4,7% selama 28 tahun agar lolos dari jebakan. Sedangkan untuk menghindari jebakan lain, yakni pendapatan menengah atas, suatu negara harus menjaga kestabilan pertumbuhan pendapatan

sekurang-kurangnya 3,5% selama 14 tahun. Cina mampu lolos dari negara berpendapatan menengah bawah dalam waktu 17 tahun karena pertumbuhan pendapatan per kapitanya rata-rata mencapai 7% per tahun. Sedangkan Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan bisa naik kelas dari pendapatan menengah atas menuju pendapatan tinggi dalam waktu tujuh tahun dengan rata-rata penghasilan per kapita tiap tahun mendekati 7%.

Dalam studi yang menggunakan data tahun 2010 tersebut, Indonesia dianggap belum benar-benar terperangkap dalam pendapatan menengah bawah, namun sangat rentan masuk dalam jebakan. Penyebabnya, antara lain, Indonesia sudah masuk kelompok negara berpendapatan menengah bawah selama 25 tahun hingga 2010 dengan pendapatan per kapita tahun itu sebesar US\$ 4.790. Ini merupakan sinyal bagi Indonesia untuk memastikan lagi posisinya saat ini. Menurut data, pertumbuhan rata-rata pendapatan per kapita Indonesia dari 2000 hingga 2010 sebesar 3,9%. Apabila ingin lolos dari perangkap pendapatan menengah bawah, pendapatan per kapita harus tumbuh rata-rata sebesar 15% pada periode 2011-2013.

Pendapatan per kapita dapat dikerek apabila pertumbuhan pendapatan (PDB) melebihi peningkatan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, fokus peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada proses transformasi struktural yang terjadi. Seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita akan terjadi pergeseran permintaan barang dan jasa, perubahan kuantitas dan kualitas, perubahan komposisi faktor produksi, perkembangan teknologi, serta peningkatan spesialisasi dalam perekonomian. Proses transformasi struktural tersebut kelak akan tergambarkan dalam sejumlah proses, yakni akumulasi, alokasi, demografi, dan distribusi. Dampak proses transformasi struktural yang terjadi akan mempengaruhi peningkatan ukuran perekonomian Indonesia. Misalnya, dalam proses alokasi akan cenderung terjadi peningkatan nilai tambah bruto sektor industri yang lebih besar dibandingkan sektor pertanian,

sehingga nilai tambah perekonomian semakin menanjak. Implikasinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan meningkat. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan PDB melebihi pertumbuhan populasi, maka pendapatan per kapita Indonesia pun akan bertambah. Tumbuhnya pendapatan per kapita diharapkan membawa Indonesia lepas dari ancaman perangkap pendapatan menengah bawah dan naik kelas ke negara berpendapatan menengah atas.

6.2. POLA TRANSFORMASI: PENGALAMAN NEGARA-NEGARA LAIN

Kemunculan negara berpendapatan tinggi tak serempak, melainkan dalam beberapa generasi. Generasi pertama (sebelum 1965) adalah Jepang. Generasi kedua (1987-1998) meliputi Singapura, Hongkong, Yunani, Israel, Korea Selatan, dan Portugal. Adapun generasi ketiga (2000-sekarang) merupakan negara bekas anggota blok sosialis seperti Latvia, Ceko, dan Slovakia. Dari kemunculan generasi ketiga itu secara implisit dapat disimpulkan bahwa negara bekas blok sosialis juga memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini tercermin dari jumlah peneliti riset per sejuta penduduk. Sebagai gambaran, negara generasi pertama memiliki jumlah peneliti lebih dari 3.000 per sejuta penduduk. Adapun generasi ketiga rata-rata memiliki jumlah peneliti lebih dari 1.000 per sejuta penduduk. Dengan kata lain, jika ingin masuk kelompok negara berpendapatan tinggi, Indonesia sekurang-kurangnya harus memiliki 250.000 peneliti. Saat ini Indonesia baru memiliki 100 peneliti per sejuta penduduk atau sekitar 25.000 peneliti (baru 10% dari jumlah yang dibutuhkan sebagai indikator negara maju).

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan Indonesia sulit untuk mengikuti pola negara berpendapatan tinggi seperti negara bekas blok sosialis. Pertama, data masa lalu negara eks blok sosialis tidak tercatat karena mereka tidak termasuk anggota Bank Dunia. Kedua, pada awalnya mereka merupakan negara besar yang kemudian terpecah menjadi banyak negara kecil. Ketiga, daerahnya relatif lebih kecil dengan penduduk yang juga lebih sedikit

sehingga pengaturan penduduk dan penyediaan infrastruktur lebih mudah. Terakhir, walau pertumbuhannya relatif rendah, negara-negara itu melakukan diferensiasi pengembangan industri—kecuali Rusia karena memiliki sumber minyak yang berlimpah.

Rusia dan Chili yang merupakan negara berpendapatan tinggi generasi ketiga adalah negara dengan hasil tambang yang besar. Sebab itu, Indonesia tidak dapat mengikuti pola Chili dan Rusia. Indonesia juga tidak bisa sepenuhnya mengikuti pola umum seperti Korea Selatan dan Jepang. Negara berpendapatan tinggi lain seperti Perancis, Amerika Serikat, dan Australia, adalah net eksportir pada sektor makanan dan net importir pada industri. Untuk kasus Indonesia, ke depan rencananya akan dibangun 15 kawasan industri. Daerah luar Jawa hanya akan berfokus memproduksi hasil industri antara. Sehingga, para pekerja di luar Jawa pun mesti tamatan pendidikan tinggi—yang kebanyakan berasal dari Jawa. Dengan demikian, rencana tersebut kurang komprehensif apabila tidak diimbangi dengan tersedianya SDM yang cukup.

6.3. TANTANGAN 10-20 TAHUN KE DEPAN: PILIHAN DAN FOKUS KEBIJAKAN DALAM KONTEKS TRANSFORMASI STRUKTURAL

6.3.1. PROSES AKUMULASI PEMBENTUKAN MODAL

1. Dilihat dari sisi fiskal, rasio penerimaan pemerintah dari pajak (*tax ratio*) terhadap PDB harga berlaku tak cukup tinggi walau meningkat dari 10,62% (2001) menjadi 12,48% (2013). Sumber terbesar, sekitar 51,6% masih berasal dari PPh lalu diikuti oleh PPhn/PPNBM, cukai, PBB dan lainnya. Penerimaan pajak dari PPh juga belum optimal karena: (1) tingginya angka bidang informal, yaitu sekitar 65-70%; dan (2) pemungutan pajak yang di bawah target. Upaya pemerintah untuk memperluas dasar pengenaan pajak (*tax base*) dan meningkatkan pemungutan pajak adalah upaya yang tepat. Reformasi perpajakan harus terus dijalankan secara konsisten.
2. Perlu diperhatikan bahwa selain dari

pajak, Indonesia sangat bergantung pada penerimaan nonpajak dari SDA. Pada 2013, proporsi penerimaan nonpajak sekitar 3,63% per PDB HB di mana sebanyak 53,2% berasal dari pendapatan SDA migas. Besarnya kontribusi SDA khususnya migas menunjukkan bahwa Indonesia belum optimal mengelola sumber penerimaan di luar SDA seperti keuntungan BUMN dan PNPB lainnya. Di luar itu, kontribusi SDA pada ekonomi Indonesia semakin menurun. Kini saatnya Indonesia menggeser penggerak pertumbuhan ekonomi dari sumber daya alam ke sumber daya manusia. Salah satu cara meningkatkan kualitas SDM adalah dengan memanfaatkan investasi asing sebagai sumber efek luberan (*spillover effect*), termasuk alih teknologi. Data menunjukkan dalam 10 tahun terakhir terjadi kenaikan tingkat pendidikan, baik menurut jenis kelamin maupun wilayah desa dan kota. Namun itu belum cukup mendorong Indonesia menjadi negara maju berpendapatan tinggi.

3. Bila Indonesia ingin masuk ke dalam kategori negara maju pada 2025—dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 280 juta jiwa—dibutuhkan kurang lebih 280 ribu peneliti bidang teknik. Untuk diketahui, ketika tercatat sebagai negara maju pada periode 1995-1997, Korea Selatan memiliki sekitar 600 ribu peneliti bidang teknik dan mayoritas bekerja di sektor industri manufaktur. Ini berbeda dengan Australia yang juga memiliki banyak peneliti bidang teknik namun mayoritas bekerja di sektor primer. Indikator jumlah publikasi di jurnal ilmiah internasional juga memperlihatkan bahwa keberadaan tenaga kerja berkeahlian tinggi Indonesia masih rendah. Pada 2011, jumlah publikasi jurnal internasional dari Indonesia hanya 270, sementara Malaysia mencapai 2.092 dan Thailand 2.304 publikasi.
4. Indikator kualitas pekerja memperkuat penjelasan bahwa Indonesia masih berada pada tingkat menengah dari sisi pendapatan dan kualitas SDM. Klasifikasi

menurut PDB per kapita dari Bank Dunia dan HDI dari UNESCO mendukung gambaran ini. Indonesia masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke bawah yang hampir mencapai posisi negara berpendapatan menengah ke atas, sedangkan Malaysia dan Thailand sudah berada pada posisi negara berpendapatan menengah ke atas. Dari klasifikasi HDI, Indonesia juga masih berada pada tingkat negara menengah, yakni di peringkat 108 dunia pada 2013. Bandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang sudah masuk ke kategori tinggi dengan peringkat masing-masing 62 dan 89 dunia. Ke depan, Indonesia harus tergolong dalam 50 besar dunia.

5. Untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, intervensi pemerintah sangat penting. Salah satu proksi untuk mengukur ini adalah proporsi pengeluaran pemerintah untuk kedua bidang ini. Proporsi alokasi anggaran pemerintah untuk bidang pendidikan dan kesehatan terhadap PDB harga berlaku meningkat dalam 10 tahun terakhir. Pendidikan naik dari 2,46% (2001) menjadi 3,56% (2012) dan kesehatan naik dari 2,23% (2001) menjadi 3,03% (2012). Namun, proporsi ini masih perlu ditingkatkan. Ada dua hal yang harus dicatat, yaitu (1) pemerintah harus meningkatkan kualitas pembangunan berdasarkan kualitas SDM; dan (2) pentingnya peningkatan alokasi anggaran untuk kedua bidang tadi. Poin kedua ini sangat tergantung pada kapasitas anggaran pemerintah.

6.3.2. PROSES DAN PERKEMBANGAN INDUSTRIALISASI

1. Tiga fakta pola industrialisasi pada Bab 3 menunjukkan bahwa kebijakan industrialisasi ke depan harus berorientasi ke luar Jawa. Ada beberapa kebijakan kunci untuk mendorong proses industrialisasi dalam menciptakan transformasi struktur perekonomian yang kuat guna mendukung upaya keluar dari *middle-income trap*.

2. Salah satu kunci kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi luar Jawa lebih cepat adalah pembangunan infrastruktur yang bisa berperan sebagai lokomotif aktivitas perekonomian yang memandu arah perkembangan aktivitas perekonomian. Proses pergeseran aktivitas ekonomi dari Pulau Jawa ke luar Jawa memang bisa berjalan secara alamiah karena harga-harga faktor produksi dan *input* menjadi lebih mahal. Proses pergeseran ini bisa menjadi lebih cepat jika pemerintah menyediakan infrastruktur untuk mendukung menciptakan aktivitas perekonomian seperti jalan raya, pelabuhan laut dan udara, dan pembangkit listrik.
3. Kebijakan lain yang perlu didorong adalah program relokasi industri yang sudah kehilangan daya saingnya jika terus beroperasi di Pulau Jawa. Beberapa industri yang perlu direlokasi ke luar Jawa ini harus diidentifikasi lebih lanjut. Program pembangunan infrastruktur dan relokasi industri ini, pada akhirnya, diharapkan bisa menarik perpindahan tenaga kerja dari Jawa ke pulau-pulau lain. Perpindahan tenaga kerja adalah salah satu kunci untuk memacu pertumbuhan aktivitas ekonomi di luar Jawa lebih cepat. Ketersediaan tenaga kerja, selain ketersediaan infrastruktur, adalah salah satu hambatan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa berjalan lambat.
4. Pemerintah juga perlu mendorong alokasi investasi ke sektor industri padat modal dan teknologi lebih cepat, dengan memberikan insentif dan fasilitas, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Meskipun sektor industri padat modal dan teknologi tumbuh positif selama sepuluh tahun terakhir, terutama didorong oleh pertumbuhan industri alat angkut, sektor industri ini berkembang lebih disebabkan faktor permintaan. Faktor permintaan yang tinggi menciptakan peluang pasar domestik lebih besar yang kemudian mengundang investasi di sektor industri ini. Sebetulnya ada sektor industri lain yang

menarik karena peluang pasar domestiknya semakin besar seiring kian tingginya kebutuhan—yang disebabkan meningkatnya pendapatan per kapita. Sektor itu meliputi industri besi dan baja dasar, industri kimia, industri semen dan industri pengilangan minyak. Pemerintah juga perlu memberikan fasilitas dan insentif yang mendorong alokasi investasi di sektor industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan keunggulan komparatif Indonesia. Alokasi investasi ini terutama untuk mendorong penciptaan nilai tambah tinggi terhadap industri-industri yang memiliki keunggulan komparatif tersebut.

6.3.3. PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN MAKROEKONOMI

1. Pemerintah perlu merumuskan strategi yang jitu dalam perdagangan internasional. Strategi diversifikasi pasar Indonesia belum berjalan dengan baik. Pasar utama tidak berubah banyak dari tahun ke tahun. Cina, Jepang, Amerika Serikat, India, dan Singapura masih menjadi daerah tujuan ekspor.
2. Bila ingin serius menggarap pasar baru, pemerintah perlu mengoptimalkan peran intelijen pemasaran (*market intelligence*) untuk melihat potensi produk ekspor yang bisa bersaing di luar negeri. Peran Indonesian Trade Promotion Center pada atase bidang perdagangan di luar negeri harus bisa mengidentifikasi potensi pasar dan masalah yang akan dihadapi, proses distribusi, dan kebutuhan logistik yang diperlukan.
3. Indonesia juga mesti membereskan masalah biaya tinggi di dalam negeri yang membuat biaya produksi dalam negeri tidak lagi kompetitif. Interkonektivitas antara pusat-pusat produksi komoditas ekspor dengan pelabuhan dan bandara harus segera dirampungkan. Masalah-masalah seperti pungutan liar, infrastruktur yang buruk, serta biaya logistik yang tinggi perlu diatasi lebih cepat.
4. Selain memperbaiki komposisi dan struktur produk ekspor, kebijakan perdagangan

mendatang perlu menyasiasi masalah tingginya kandungan bahan baku, bahan antara, dan komponen produk Indonesia yang masih didominasi buatan luar negeri. Indonesia mulai dari sekarang mesti berupaya menghasilkan produk bahan baku yang lebih murah dan kompetitif.

5. Secara spesifik, pemerintah perlu mereformasi regulasi untuk memperbaiki faktor-faktor yang sangat berpengaruh di bidang perdagangan, seperti kepastian usaha, merevisi peraturan yang dirasa menghambat kinerja ekspor dan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia. Pemerintah juga perlu memastikan peningkatan investasi melalui promosi perdagangan yang dilakukan secara nasional dan juga ke luar negeri. Ini untuk memberikan kemudahan dan modal bagi industri agar bisa memproduksi produk ekspor.
6. Indonesia perlu terus aktif melakukan kebijakan perdagangan regional dan bilateral yang memastikan peran dan partisipasi Indonesia dalam pertemuan tingkat tinggi, serta meningkatkan kerja sama dengan negara tetangga—dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.
7. Isu perdagangan diharapkan menjadi isu nasional. Selain itu, harus ada keselarasan antara lembaga kementerian terkait untuk memastikan kebijakan pemerintah dalam perdagangan didukung oleh semua pihak.

6.3.4. PROFIL KETENAGAKERJAAN DAN ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN

1. Produktivitas pekerja harus ditingkatkan. Bagi kelompok pekerja yang ada saat ini hal itu dilakukan melalui berbagai pelatihan, sedangkan kelompok pekerja di masa mendatang lewat jalur pendidikan formal. Rendahnya tingkat pendidikan rata-rata angkatan kerja saat ini—setelah berbagai kebijakan dan program di bidang pendidikan dijalankan selama lebih dari tiga dekade terakhir—menunjukkan bahwa perlu dilakukan berbagai penyesuaian kebijakan

- program pendidikan, serta penguatan dan akselerasi implementasinya.
2. Kebijakan perluasan daya tampung dan pemerataan kesempatan pendidikan memang telah menghasilkan sejumlah kemajuan, sebagaimana dapat dilihat dalam perkembangan angka partisipasi di semua jenjang pendidikan formal. Program Wajib Belajar 9 Tahun telah berjalan 20 tahun, tapi angkatan kerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah. Data Agustus 2013 menunjukkan bahwa 46,9% angkatan kerja berpendidikan tamatan SD atau kurang. Perkembangan pendidikan nasional menyisakan berbagai catatan. Saat ini baru sekitar 70 dari 100 anak yang masuk kelas 1 SD sembilan tahun lalu, menyelesaikan pendidikan SMP. Angka-angka tersebut secara tidak langsung menunjukkan masih rendahnya kualitas pendidikan, angka putus sekolah yang sangat tinggi, dan pelaksanaan wajib belajar yang belum cukup serius dan tanpa disertai sanksi bagi mereka yang tidak menempuh pendidikan wajib selama sembilan tahun. Pemerintah baru telah mengambil kebijakan untuk memperluas wajib belajar menjadi 12 Tahun, walaupun kenyataan di lapangan menunjukkan Wajib Belajar 9 Tahun belum tuntas dan masih menyimpan masalah.
 3. Merujuk pada tantangan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan tinggi demi mendukung transformasi struktur perekonomian nasional, kebijakan perluasan wajib belajar menjadi 12 tahun merupakan opsi yang harus diambil. Penguatan pada tataran implementasi merupakan tantangan tersendiri. Fokusnya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara sistematis sejak program diimplementasikan untuk mencegah langgengnya persoalan seperti yang dalam Wajib Belajar 9 Tahun.
 4. Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun memerlukan persiapan lebih mengingat secara alamiah persoalan yang dihadapi akan lebih besar. Salah satunya sebagai akibat pilihan jenjang pendidikan jalur menengah umum dan menengah kejuruan. Merujuk pada bukti empiris sebagaimana ditunjukkan oleh statistik, kinerja pasar tenaga kerja (*labor market performance*) lulusan sekolah kejuruan ternyata tidak lebih baik dibanding lulusan sekolah menengah umum. Dalam perluasan dan pemerataan pendidikan jenjang menengah atas, pemerintah sebaiknya berfokus pada jalur pendidikan menengah umum yang lebih sederhana dan tidak membutuhkan biaya terlalu besar.
 5. Pada jenjang pendidikan tinggi, perluasan perlu dikaitkan dengan inovasi dan pengembangan wilayah. Pemerintah juga perlu membangun pusat unggulan (*center of excellence*) yang didukung dengan penguatan otonomi pendidikan berbasis riset dan kerja sama dengan industri. Disamping itu, perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi perlu diarahkan untuk mencetak peneliti di bidang sains dan teknik demi mengejar ketertinggalan dari negara jiran. Ini juga untuk menempatkan Indonesia pada posisi kelas pendapatan yang lebih tinggi.
 6. Dalam jangka pendek dan menengah diperlukan kebijakan ketenagakerjaan yang berfokus pada upaya peningkatan keterampilan dan produktivitas pekerja, terutama bagi kelompok usia 19-34 tahun. Pendekatan yang lebih pragmatis dapat dilakukan melalui pelatihan besar-besaran. Tak hanya dengan mengerahkan kapasitas pelatihan yang dimiliki pemerintah, tapi juga dengan menggerakkan potensi yang dimiliki oleh industri. Sistem insentif perlu dikembangkan untuk mendorong industri berinvestasi lebih besar pada karyawannya dalam bentuk pelatihan demi meningkatkan produktivitas. Pelatihan tenaga kerja kelompok usia ini, baik mereka yang sedang bekerja maupun para pencari kerja, perlu diprioritaskan dan dilaksanakan secara masif dan sistematis. Hal ini kian penting sebab tingkat upah pekerja sudah naik

dalam beberapa tahun terakhir sedangkan produktivitasnya relatif masih rendah.

7. Peningkatan produktivitas pekerja sangat dibutuhkan sehubungan perkembangan tingkat upah pekerja dan kontribusi nilai tambah di setiap sektor terkait jumlah pekerja yang diserap di sektor tersebut.
8. Ihwal kenaikan tingkat upah, salah satu tantangannya adalah bagaimana supaya hal

itu tak menurunkan daya saing di wilayah yang dimaksud. Di Indonesia, dengan kewenangan penetapan tingkat upah berada di tangan provinsi, penetapan upah minimum diupayakan tak dilakukan tiap tahun, tapi jangka menengah—saban 2-3 tahun—dengan periode kenaikan upah tahunan bersifat otomatis—misalnya berdasarkan persentase minimum dari tingkat inflasi.



Daftar Pustaka

- Adioetomo, Sri Moetingsih Setyo (2005). "Bonus Demografi: Menjelaskan Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi", Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ekonomi Kependudukan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 30 April 2005.
- Adioetomo, Sri Moetingsih Setyo (2011). "Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan Ekonomi", Presentasi dalam Pentaloka BKKBN, Jakarta, 27 April 2011.
- Amiti, Mary dan Josef Konings (2007). "Trade Liberalization, Intermediate Inputs, and Productivity: Evidence from Indonesia", *American Economic Review*, Vol. 97, No. 5, pp. 1611-1638.
- Armstrong, Shiro dan Sjamsu Rahardja (2014). "Survey of Recent Developments", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 50, Issue 1, pp. 3-28.
- Bank Indonesia (2010). "Memperkuat Perekonomian Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Pemulihan Ekonomi Global" (Laporan Perekonomian 2010).
- Bank Indonesia (2012). "Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia".
- Bank Indonesia (2013). "Menjaga Stabilitas, Mendorong Reformasi Struktural untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan" (Laporan Perekonomian 2013).
- Bank Indonesia (2014). "Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia".
- Bappenas, BPS, UNFPA (2005). "Proyeksi Penduduk Menurut Umur Tunggal dan Umur Tertentu".
- Bappenas, BPS, UNFPA (2008). "Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025".
- Bappenas, BPS, UNFPA (2013). "Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035".
- Bloom, D. dan J. Williamson (1998). "Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia", *World Bank Economic Review* 12, pp. 419-455.
- Bloom, D. E. and J. E. Finlay (2009). "Demographic Change and Economic Growth in Asia", *Asian Economic Policy Review* (4), p.45-64.
- BPS (2004). "Indikator Ekonomi".
- BPS (2007). "Indikator Ekonomi".
- BPS (2007). "Indikator Ekonomi".
- BPS (2013). "Indikator Ekonomi".
- BPS (2001). "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia".
- BPS (2004). "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia".
- BPS (2007). "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia".
- BPS (2009). "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia".
- BPS (2010). "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia".
- BPS (2011). "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia".
- BPS (2012). "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia".
- BPS (2013). "Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia".
- BPS (2000-2002). "Pengangguran Terbuka dan Setengah Pengangguran di Indonesia".
- BPS (2003). "Statistik Indonesia".
- BPS (2007). "Statistik Indonesia".
- BPS (2009). "Statistik Indonesia".

- BPS (2013). "Statistik Indonesia".
- BPS, (2007). "Proyeksi Penduduk Indonesia per Provinsi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2005-2015".
- BPS (2007). "Tabel Input Output 2005 Volume I".
- BPS (2006). "Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Triwulan IV/2006 dan Tahun 2006".
- BPS (2012). "Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Triwulan IV/2012 dan Tahun 2012".
- BPS (2013). "Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Triwulan IV/2013 dan Tahun 2013".
- BPS (2006). "Pendapatan Nasional Indonesia 2002-2005".
- BPS (2012). "Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Indonesia Menurut Penggunaan 2007-2011".
- BPS (2013). "Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2008-2012."
- BPS (2006). "Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2002-2005".
- Cai, F. (2012). "Is There a Middle-Income Trap? Theories, Experiences, and Relevance to Cina", *Cina & World Economic*.20, 1, pp., 49-61.
- Felipe, Jesus (2012). "Tracking the Middle-Income Trap: *What is It, Who is in It, and Why?* Part 1", *ADB Economics Working Paper Series* No. 306
- Howes, Stephen dan Robin Davies (2014). "Survey of Recent Developments", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 50, Issue 2, pp. 157-183.
- Indermit, G. dan H. Kharas, (2008). *An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth*. Beijing: Citic Press Corporation.
- Kao, Chiang (2013). "National Productivity of the Southeast Asian Countries", *European Scientific Journal*, Vol 1, 252-258.
- Nehru, Vikram (2013). "Manufacturing in India and Indonesia: Performance and Policies", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 49, Issue 1, pp. 35-60.
- Paus, E. (2014). *Latin America and the Middle-Income Trap*. ECLAD Financing for Development Series. United Nations.
- Takii, Sadayuki (2004). "Recent Trends and Prospects for Major Asian Economies: Indonesia", *East Asian Economic Perspective*, Vol. 15, No.1, pp. 101-118
- Takii, Sadayuki (2006). "Recent Trends and Prospects for Major Asian Economies: Indonesia", *East Asian Economic Perspective*, Vol. 17, No. 1, pp. 81-94.
- The World Bank (1983). *World Development Report: Recession and Prospects for Recovery*, Oxford University Press: Oxford.
- The World Bank (1987). *World Development Report: Industrialization and Foreign Trade*, Oxford University Press: Oxford.
- The World Bank (1989). *World Development Report: Financial Systems and Development*, Oxford University Press: Oxford.
- The World Bank (1991). *World Development Report: Challenge of Development*, Oxford University Press: Oxford.
- The World Bank (2002). "World Development Indicators".
- The World Bank (2007). "World Development Indicators".
- The World Bank "World Development Report".
- Westphal, Larry E. (1990). "Industrial Policy in an Export-Propelled Economy: Lessons from South Korea's Experience", *Journal of Economic Perspective*, Vol. 3, pp. 41-59.
- World Trade Organization (2013). "Trade Policy Review: Indonesia".

Lampiran

Tabel 1.1
PNB per Kapita Negara Terpilih 1984-1998 (US\$)

No.	Negara	1984	1987	1990	1992	1993	1994	1995	1997	1998
1	Vietnam	-	-	-	-	170	200	240	310	330
2	India	260	300	350	310	300	320	340	370	430
3	Indonesia	540	450	570	670	740	880	980	1.110	680
4	Cina	310	290	370	470	490	530	620	860	750
5	Filipina	660	590	730	770	850	950	1.050	1.200	1.050
6	Thailand	860	850	1.420	1.840	2.110	2.410	2.740	2.740	2.200
7	Rusia	-	-	-	2.510	2.340	2.650	2.240	2.680	2.300
8	Turki	1.160	1.210	1.630	1.980	2.970	2.500	2.780	3.130	3.160
9	Malaysia	1.980	1.810	2.320	2.790	3.140	3.480	3.890	4.530	3.600
10	Polandia	2.100	1.930	1.690	1.910	2.260	2.410	2.790	3.590	3.900
11	Meksiko	2.040	1.830	2.490	3.470	3.610	4.180	3.320	3.700	3.970
12	Hungaria	2.100	2.240	2.780	2.970	3.350	3.840	4.120	4.510	4.510
13	Brazil	1.720	2.020	2.680	2.770	2.930	2.970	3.640	3.310	4.570
14	Chili	1.700	1.310	1.940	2.730	3.170	3.520	4.160	4.820	4.810
15	Republik Ceko	-	-	-	2.450	2.710	3.200	3.870	5.240	5.040
16	Korea Selatan	2.110	2.690	5.400	6.790	7.660	8.260	9.700	10.550	7.970
17	Argentina	2.230	2.390	2.370	6.050	7.220	8.110	8.030	8.950	8.970
18	Portugal	1.970	2.830	4.900	7.450	9.130	9.320	9.740	11.010	10.690
19	Yunani	3.770	4.020	5.990	7.290	7.390	7.700	8.210	11.640	11.650
20	Spanyol	4.440	6.010	11.020	13.970	13.590	13.440	13.580	14.490	14.080
21	Kanada	13.280	15.160	20.470	20.710	19.970	19.510	19.380	19.640	20.080
22	Italia	6.420	10.350	16.830	20.460	19.840	19.300	19.020	20.170	20.250
23	Australia	11.740	11.100	17.000	17.260	17.500	18.000	18.720	20.650	20.300
24	Inggris	8.570	10.420	16.100	17.790	18.060	18.340	18.700	20.870	21.400
25	Perancis	9.760	12.790	19.490	22.260	22.490	23.420	24.990	26.300	24.940
26	Jerman	11.130	14.400	22.320	23.030	23.560	25.580	27.510	28.280	25.850
27	Amerika Serikat	15.390	18.530	21.790	23.240	24.740	25.880	26.980	29.080	29.340
28	Jepang	10.630	15.760	25.430	28.190	31.490	34.630	39.640	38.160	32.380

Sumber: World Development Indicators 2002-2012 dan World Development Report 1986-1996

Tabel 1.2
PNP per Kapita Negara Terpilih 2000-2012 (US\$)

No	Negara	2000	2003	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Vietnam	390	480	620	770	890	1.000	1.160	1.270	1.550
2	India	450	540	730	950	1.040	1.220	1.270	1.420	1.550
3	Filipina	1.040	1.080	1.320	1.620	1.890	1.790	2.060	2.210	2.500
4	Indonesia	570	810	1.280	1.650	1.880	2.050	2.500	2.940	3.420
5	Thailand	2.000	2.190	2.720	3.400	3.670	3.760	4.150	4.440	5.210
6	Cina	840	1.100	1.740	2.370	2.940	3.650	4.270	4.940	5.710
7	Argentina	7.460	3.810	4.470	6.040	7.190	7.650	8.620	-	-
8	Meksiko	5.070	6.230	7.310	9.400	9.990	8.960	8.890	9.420	9.640
9	Malaysia	3.380	3.880	4.970	6.420	7.250	7.350	7.760	8.770	9.820
10	Turki	3.100	2.800	4.750	8.030	9.020	8.720	9.890	10.410	10.830
11	Brazil	3.580	2.720	3.550	5.860	7.300	8.070	9.390	10.720	11.630
12	Hungaria	4.710	6.350	10.070	11.680	12.810	12.980	12.860	12.730	12.410
13	Polandia	4.190	5.280	7.160	9.850	1.73	12.260	12.440	12.380	12.660
14	Rusia	1.660	2.610	4.460	7.530	9.660	9.340	9.900	10.650	12.700
15	Chili	4.590	4.360	5.870	8.190	9.370	9.470	10.120	12.280	14.310
16	Rep. Ceko	5.250	7.150	11.220	14.580	16.650	17.310	17.890	18.700	18.130
17	Portugal	11.120	11.800	17.190	18.950	20.680	21.910	21.870	21.370	20.640
18	Korea Selatan	8.910	12.030	15.840	19.730	21.530	19.830	19.890	20.870	22.670
19	Yunani	11.960	13.230	19.840	25.740	28.400	20.040	26.950	24.490	23.660
20	Spanyol	15.080	17.040	25.250	29.290	31.930	32.120	31.750	30.930	29.270
21	Italia	20.160	21.570	30.250	33.490	35.460	35.110	35.700	35.320	34.640
22	Inggris	24.430	28.320	37.740	40.660	46.040	41.360	38.200	37.780	38.500
23	Perancis	24.090	24.730	34.600	38.810	42.000	42.620	42.370	42.420	41.250
24	Jerman	25.120	25.270	34.870	38.990	42.710	42.450	43.070	44.230	45.070
25	Jepang	35.620	34.180	38.950	37.790	38.130	38.080	41.850	44.900	42.870
26	Kanada	21.130	24.470	32.590	39.650	43.640	41.980	43.250	45.550	51.530
27	Amerika Serikat	34.100	37.810	43.560	46.040	47.930	46.360	47.340	48.620	52.340
28	Australia	20.240	21.950	33.120	35.760	40.240	43.770	46.200	49.790	59.260

Sumber: World Development Indicators 2002-2014

Tabel 1.3
PNB per Kapita (US\$) dan Pertumbuhan Rata-rata PNB per Kapita (%) Negara Terpilih
1984-1995

No.	Negara	1984		1990		1993		1994		1995	
		US\$	Rata-rata pertumbuhan tahunan 1965-1984	US\$	Rata-rata pertumbuhan tahunan 1965-1990	US\$	Rata-rata pertumbuhan tahunan 1980-1993	US\$	Rata-rata pertumbuhan tahunan 1985-1994	US\$	Rata-rata pertumbuhan tahunan 1970-1995
1	Vietnam	-	-	-	-	170	-	200	-	240	-
2	India	260	1,6	350	1,9	300	3,0	320	2,9	340	2,4
3	Cina	310	4,5	370	5,8	490	8,2	530	7,8	620	6,9
4	Indonesia	540	4,9	570	4,5	740	4,2	880	6,0	980	4,7
5	Filipina	660	2,6	730	1,3	850	(0,6)	950	1,7	1.050	0,6
6	Rusia	-	-	-	-	2.340	(1,0)	2.650	(4,1)	2.240	1,3
7	Thailand	860	4,2	1.420	4,4	2.110	6,4	2.410	8,6	2.740	5,2
8	Turki	1.160	2,9	1.630	2,6	2.970	2,4	2.500	1,4	2.780	1,7
9	Polandia	2.100	1,5	1.690	-	2.260	0,4	2.410	0,8	2.790	1,2
10	Meksiko	2.040	2,9	2.490	2,8	3.610	(0,5)	4.180	0,9	3.320	0,9
11	Brazil	1.720	4,6	2.680	3,3	2.930	0,3	2.970	(0,4)	3.640	-
12	Rep. Ceko	-	-	-	-	2.710	-	3.200	(2,1)	3.870	-
13	Malaysia	1.980	4,5	2.320	4,0	3.140	3,5	3.480	5,6	3.890	4,0
14	Hungaria	2.100	6,2	2.780	-	3.350	1,2	3.840	(1,2)	4.120	(1,1)
15	Chili	1.700	(0,1)	1.940	0,4	3.170	3,6	3.520	6,5	4.160	1,8
16	Argentina	2.230	0,3	2.370	(0,3)	7.220	(0,5)	8.110	2,0	8.030	(0,4)
17	Yunani	3.770	3,8	5.990	2,8	7.390	0,9	7.700	1,3	8.210	1,5
18	Portugal	1.970	3,5	4.900	3,0	9.130	3,3	9.320	4,0	9.740	2,5
19	Korea Selatan	2.110	6,6	5.400	7,1	7.660	8,2	8.260	7,8	9.700	10,4
20	Spanyol	4.440	2,7	11.020	2,4	13.590	2,7	13.440	2,8	13.580	2,0
21	Inggris	8.570	1,6	16.100	2,0	18.060	2,3	18.340	1,3	18.700	1,8
22	Australia	11.740	1,7	17.000	1,9	17.500	1,6	18.000	1,2	18.720	1,4
23	Italia	6.420	2,7	16.830	3,0	19.840	2,1	19.300	1,8	19.020	2,4
24	Kanada	13.280	2,4	20.470	2,7	19.970	1,4	19.510	0,3	19.380	1,7
25	Perancis	9.760	3,0	19.490	2,4	22.490	1,6	23.420	1,6	24.770	1,8
26	Amerika Serikat	15.390	1,7	21.790	1,7	24.740	1,7	25.880	1,3	26.980	1,7
27	Jerman	11.130	2,7	22.320	2,4	23.560	2,1	25.580	-	27.510	-
28	Jepang	10.630	4,7	25.430	4,1	31.490	3,4	34.630	3,2	39.640	3,2

Sumber: World Development Indicators 1986, 1992, 1995, 1996, 1997

Tabel 1.4
Investasi Langsung Luar Negeri, PMTDB Negara Terpilih 2000-2010 (Miliar \$ dan % PDB)

	Cina	Korea Selatan	Brazil	Indonesia	India	Filipina	Thailand	Chili
2000	10.795,90	457,22	595,46	163,25	407,00	74,73	122,17	70,54
FDI	38,40	9,28	32,78	-4,55	2,31	2,03	3,37	3,67
GCF	37	29	21	18	24	18	23	23
2001	1.159,03	422,17	502,51	145,31	477,34	71,44	114,68	66,45
FDI	44,24	3,20	22,64	-3,28	340	1,79	3,82	4,48
GCF	38	27	21	17	23	18	24	21
2002	1.266,05	476,69	452,39	172,91	510,18	77,95	126,90	64,15
FDI	49,31	1,97	16,57	-1,51	3,03	1,11	0,90	1,71
GCF	40	26	20	14	23	19	24	23
2003	1.417,00	605,33	492,34	208,31	600,64	80,57	142,95	72,41
FDI	53,50	3,22	10,14	0,60	4,27	0,32	1,95	2,98
GCF	44	29	18	16	24	19	25	24
2004	1.931,71	679,67	603,97	257,64	691,16	84,57	161,69	94,10
FDI	54,94	8,19	18,17	1,02	5,33	0,47	1,41	7,60
GCF	39	30	21	23	24	17	27	23
2005	2.234,30	787,62	796,05	287,22	805,71	99,03	176,63	115,25
FDI	79,13	4,34	15,19	5,26	6,60	1,13	4,53	6,67
GCF	44	30	21	22	33	15	32	23
2006	2.644,68	888,02	1.067,47	364,79	911,81	117,56	206,34	145,84
FDI	78,09	3,64	18,78	5,58	17,45	2,34	9,01	7,95
GCF	45	30	17	25	34	14	28	20
2007	3.205,51	969,79	1.313,36	432,82	1.176,89	144,06	245,35	163,91
FDI	138,41	1,58	34,58	6,93	29,95	2,93	9,50	14,46
GCF	43	29	18	25	39	15	27	21
2008	4.327,40	929,12	1.575,15	510,73	1.159,17	166,91	272,43	169,46
FDI	147,79	2,2	45,06	9,32	41,17	1,40	9,83	16,79
GCF	44	31	19	28	40	15	29	25
2009	4.985,46	832,51	1.594,49	540,27	1.377,26	161,20	263,77	163,67
FDI	78,19	1,51	25,95	4,88	34,58	1,95	4,98	12,70
GCF	48	26	17	31	36	15	22	19
2010	5.926,60	1.014,50	2.087,90	706,60	1.727,10	199,60	318,50	212,70
FDI	185,08	-0,15	48,51	13,37	2.416	1,71	9,68	15,09
GCF	48	29	19	32	35	21	26	21

Sumber: World Development Indicators (2002-2012)

Tabel 1.5
Jumlah Peneliti per Satu Juta Penduduk, Jumlah Artikel Jurnal Teknis dan Ilmiah, Pengeluaran Riset (% dari PDB)
1987-2009

No	Negara	Peneliti per Satu Juta Penduduk			Artikel Jurnal (Sains dan Teknis)			Pengeluaran untuk Riset % PDB		
		1987-1997	2000-2005	2005-2009	1997	2005	2009	1987-1997	2000-2005	2005-2009
1	Vietnam	-	115	-	106	221	326	-	0,19	-
2	India	149	-	136	8.439	14.608	19.917	0,73	0,61	0,76
3	Filipina	157	-	78	159	178	223	0,22	0,14	0,11
4	Indonesia	182	202	90	123	205	262	0,07	0,05	0,08
5	Thailand	454	708	1.199	9.081	41.596	74.019	0,66	1,34	1,47
6	Cina	103	287	316	356	1.249	2.033	0,13	0,25	0,2
7	Malaysia	93	509	365	304	615	1.351	0,24	0,63	0,63
8	Argentina	661	768	1.046	2.119	3.058	3.655	0,38	0,44	0,52
9	Meksiko	168	462	696	3.908	9.889	12.306	0,81	0,91	1,08
10	Brazil	291	469	804	2.116	7.815	8.301	0,45	0,67	0,85
11	Turki	214	321	347	1.915	3.902	4.128	0,33	0,41	0,37
12	Rusia	3.587	3.244	3.091	17.147	14.412	14.016	0,88	1,07	1,25
13	Chili	445	833	355	850	1.559	1.816	0,68	0,68	0,39
14	Polandia	1.358	1.613	1.598	4.019	6.844	7.355	0,77	0,57	0,68
15	Hungaria	1.009	1.572	2.006	1.717	2.614	2.397	0,68	0,95	1,15
16	Republik Ceko	1.222	2.365	2.755	2.024	3.169	3.946	1,2	1,42	1,53
17	Korea Selatan	2.193	3.760	4.947	4.619	16.396	22.371	2,82	2,99	3,36
18	Portugal	773	1.531	1.849	2.123	4.291	4.881	0,47	0,61	0,58
19	Yunani	1.182	2.001	4.308	1.085	2.910	4.157	0,62	0,81	1,66
20	Spanyol	1.305	2.549	2.932	11.210	18.336	21.543	0,9	1,12	1,38
21	Italia	1.318	1.241	1.690	16.405	24.645	26.755	2,21	1,1	1,27
22	Inggris	4.909	5.294	5.189	43.891	55.471	49.627	2,8	3,18	3,45
23	Jepang	2.448	-	3.947	38.530	45.572	45.649	1,95	1,75	1,87
24	Perancis	2.719	3.922	4.335	19.910	25.836	29.017	1,66	2,01	1,95
25	Jerman	2.831	3.242	3.780	36.233	44.145	45.003	2,41	2,51	2,82
26	Kanada	2.659	3.320	3.690	16.509	30.309	31.748	2,25	2,13	2,23
27	Australia	3.357	4.099	4.259	11.793	15.957	18.923	1,8	1,77	2,35
28	Amerika Serikat	3.676	4.605	4.672	166.829	205.320	208.601	2,63	2,68	2,79

Sumber: World Development Indicators

Tabel 1.6
Struktur PDB Negara Terpilih 1965-2010 (% dari PDB)

No.	Negara	Pertanian				Industri				Manufaktur				Jasa			
		1965	1990	2000	2010	1965	1990	2000	2010	1965	1990	2000	2010	1965	1990	2000	2010
1	Vietnam	-	39	25	21	-	23	37	41	-	12	19	20	-	39	39	38
2	India	44	31	23	19	22	28	26	26	16	17	16	14	34	41	50	55
3	Filipina	26	22	14	12	27	34	34	33	20	25	24	21	47	44	52	55
4	Indonesia	51	19	16	15	13	39	46	47	8	21	28	25	36	41	38	38
5	Thailand	32	12	9	12	23	37	42	45	14	27	34	36	45	50	49	43
6	Cina	38	27	15	10	35	42	46	47	28	33	32	30	27	31	39	43
7	Malaysia	28	15	9	11	25	42	48	44	9	24	31	26	47	43	43	48
8	Argentina	14	8	5	10	27	36	28	31	20	27	18	21	59	56	67	59
9	Meksiko	14	8	4	4	27	28	28	34	20	21	20	18	59	64	68	62
10	Brazil	19	8	6	6	33	39	28	27	26	25	17	16	48	53	67	67
11	Turki	34	18	11	10	25	30	31	27	16	20	23	18	41	52	57	64
12	Rusia	-	17	6	4	-	48	38	37	-	-	17	16	-	35	56	59
13	Chili	9	9	6	3	40	41	38	43	24	20	19	12	52	50	55	54
14	Polandia	-	8	5	4	-	50	32	32	-	-	19	18	-	42	63	65
15	Hungaria	-	15	6	4	-	39	32	31	-	23	24	23	-	46	62	65
16	Republik Ceko	-	6	4	2	-	49	38	38	-	-	27	24	-	45	58	60
17	Korea Selatan	38	9	5	3	25	43	38	39	18	29	28	31	37	48	57	58
18	Portugal		9	4	2		32	28	23		22	18	13	-	60	68	74
19	Yunani	24	11	-	-	26	28	21	18	16	-	-	-	49	61	-	-
20	Spanyol	-	6	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-
21	Italia	-	4	3	2	-	34	28	25	-	25	21	17	-	63	69	73
22	Inggris	3	2	1	1	46	35	27	22	34	23	17	11	51	63	72	78
23	Jepang	10	2	2	1	44	39	32	27	34	27	22	18	46	58	66	72
24	Perancis	-	4	3	2		30	23	19		21	16	11		66	74	79
25	Jerman	4	2	1	1	53	39	30	28	40	28	23	21	43	59	68	71
26	Kanada	6	3	2	-	40	32	33	-	26	17	19	-	54	65	65	-
27	Australia	9	4	4	2	39	29	27	20	26	14	13	9	51	67	70	78
28	Amerika Serikat	3	2	1	1	38	28	23	20	28	19	16	13	59	70	75	78

Sumber: World Development Indicators 1992 dan World Development Indicators (2005-2012)

Tabel 2.1
PDB Indonesia Menurut Pengeluaran Berdasarkan Harga Berlaku (Triliun Rupiah)
2004-2013

Deskripsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.533	1.786	2.093	2.511	3.000	3.291	3.643	4.053	4.496	5.071
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	191	225	288	330	417	538	587	669	733	827
Pembentukan Modal Tetap Bruto	515	656	806	986	1.371	1.744	2.065	2.370	2.689	2.876
Perubahan Inventori	37	40	42	-1	6	-7	18	71	170	180
Diskrepansi Statistik	-88	-47	-70	-34	103	-117	25	151	269	311
Ekspor Barang dan Jasa	740	945	1.036	1.163	1.475	1.354	1.585	1.956	1.999	2.157
Impor Barang dan Jasa	632	830	856	1.003	1.423	1.197	1.477	1.851	2.128	2.338
Pendapatan Neto terhadap Luar Negeri Atas Faktor Produksi	-105	-135	-142	-162	-176	-196	-181	-217	-243	-281
Produk Nasional Bruto	2.190	2.639	3.197	3.788	4.773	5.410	6.266	7.202	7.986	8.803
PDB	2.296	2.774	3.339	3.951	4.949	5.606	6.447	7.419	8.229	9.084
PDB Nonmigas	2.083	2.458	2.967	3.534	4.428	5.141	5.942	6.796	7.588	8.416
PDB Migas	213	316	372	416	521	465	505	623	641	668

Sumber: BPS, diolah

Tabel 2.2
PDB Indonesia Menurut Pengeluaran Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (Triliun Rupiah)
2004-2013

Deskripsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.004	1.044	1.077	1.131	1.191	1.249	1.308	1.370	1.442	1.518
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	126	135	148	153	169	196	196	203	205	215
Pembentukan Modal Tetap Bruto	355	394	404	441	494	510	553	600	658	689
Perubahan Inventori	25	34	29	-0	2	-2	-1	9	50	54
Diskrepansi Statistik	9	-9	16	54	27	2	14	4	23	-0
Ekspor Barang dan Jasa	681	794	868	942	1.032	932	1.075	1.221	1.246	1.312
Impor Barang dan Jasa	543	640	695	758	833	709	831	942	1.005	1.017
Pendapatan Neto terhadap Luar Negeri Atas Faktor Produksi	-80	-107	-114	-121	-97	-110	-93	-96	-101	-111
Produk Nasional Bruto	1.576	1.643	1.733	1.844	1.986	2.069	2.221	2.368	2.518	2.659
PDB	1.657	1.751	1.847	1.964	2.082	2.179	2.314	2.465	2.619	2.770
PDB Nonmigas	1.506	1.605	1.703	1.822	1.940	2.037	2.171	2.323	2.482	2.637
PDB Migas	150	146	144	143	143	142	143	142	137	133

Sumber: BPS, diolah

Tabel 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Sektor
2001-2013

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
PDB	3,6%	4,5%	4,8%	5,0%	5,7%	5,5%	6,3%	6,0%	4,6%	6,2%	6,5%	6,3%	5,8%	5,5%
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	3,3%	3,4%	3,8%	2,8%	2,7%	3,4%	3,5%	4,8%	4,0%	3,0%	3,4%	4,2%	3,5%	3,5%
Tanaman Bahan Makanan	0,2%	2,1%	3,6%	2,9%	2,6%	3,0%	3,4%	6,1%	5,0%	1,6%	1,8%	3,1%	1,9%	2,9%
Tanaman Perkebunan	7,8%	5,8%	4,4%	0,4%	2,5%	3,8%	4,6%	3,7%	1,7%	3,5%	4,5%	6,2%	4,9%	4,1%
Peternakan dan Hasil-hasilnya	9,5%	6,5%	4,1%	3,3%	2,1%	3,4%	2,4%	3,5%	3,5%	4,3%	4,8%	4,7%	4,8%	4,4%
Kehutanan	2,4%	2,3%	0,5%	1,3%	-1,5%	-2,9%	-0,8%	0,0%	1,8%	2,4%	0,8%	0,2%	0,1%	0,5%
Perikanan	4,9%	3,4%	5,0%	5,6%	5,9%	6,9%	5,4%	5,1%	4,2%	6,0%	7,0%	6,5%	6,9%	5,6%
Pertambangan dan Penggalian	0,3%	1,0%	-1,4%	-4,5%	3,2%	1,7%	1,9%	0,7%	4,5%	3,9%	1,6%	1,6%	1,3%	1,2%
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	-4,9%	-3,0%	-4,7%	-4,3%	-1,8%	-1,1%	-1,2%	0,4%	0,1%	1,0%	-1,0%	-3,6%	-3,2%	-2,1%
Pertambangan Bukan Minyak dan Gas Bumi	14,7%	9,7%	4,0%	-8,0%	12,2%	4,8%	5,3%	-1,0%	10,9%	7,3%	3,4%	6,5%	5,3%	5,8%
Penggalian	4,6%	5,5%	6,1%	7,5%	7,7%	8,3%	8,5%	7,5%	7,0%	6,5%	7,3%	7,5%	5,9%	6,9%
Industri Pengolahan	3,3%	5,3%	5,3%	6,4%	4,6%	4,6%	4,7%	3,7%	2,2%	4,7%	6,1%	5,7%	5,6%	4,8%
Industri Minyak dan Gas	-6,2%	2,5%	0,8%	-1,9%	-5,7%	-1,7%	-0,1%	-0,3%	-1,5%	0,6%	-0,9%	-2,8%	-1,8%	-1,5%
Industri Bukan Minyak dan Gas	4,9%	5,7%	6,0%	7,5%	5,9%	5,3%	5,2%	4,0%	2,6%	5,1%	6,7%	6,4%	6,1%	5,5%
Listrik, Gas Kota, Air Bersih	7,9%	8,9%	4,9%	5,3%	6,3%	5,8%	10,3%	10,9%	14,3%	5,3%	4,7%	6,2%	5,6%	7,4%
Konstruksi	4,6%	5,5%	6,1%	7,5%	7,5%	8,3%	8,5%	7,6%	7,1%	7,0%	6,1%	7,4%	6,6%	6,9%
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	3,9%	4,3%	5,4%	5,7%	8,3%	6,4%	8,9%	6,9%	1,3%	8,7%	9,2%	8,1%	5,9%	6,4%
Pengangkutan dan Komunikasi	8,1%	8,4%	12,2%	13,4%	12,8%	14,2%	14,0%	16,6%	15,8%	13,4%	10,7%	10,0%	10,2%	12,3%
Kuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	6,8%	6,7%	6,7%	7,7%	6,7%	5,5%	8,0%	8,2%	5,2%	5,7%	6,8%	7,1%	7,6%	6,8%
Jasa-jasa	3,2%	3,8%	4,4%	5,4%	5,2%	6,2%	6,4%	6,2%	6,4%	6,0%	6,8%	5,2%	5,5%	5,4%

Sumber: BPS, diolah

Tabel 2.4
Laju Inflasi Indonesia Menurut Sektor (Perubahan Deflator)
2001-2013

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
PDB	14%	6%	5%	9%	14%	14%	11%	18%	8%	8%	8%	4%	4%	10%
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	12%	8%	5%	5%	8%	15%	21%	26%	15%	12%	7%	5%	6%	11%
Tanaman Bahan Makanan	16%	10%	4%	2%	7%	15%	20%	24%	14%	13%	8%	5%	6%	11%
Tanaman Perkebunan	9%	7%	4%	6%	11%	8%	23%	25%	3%	18%	8%	0%	3%	10%
Peternakan dan Hasil-hasilnya	10%	7%	4%	5%	7%	12%	17%	31%	22%	9%	3%	8%	8%	11%
Kehutanan	1%	1%	4%	9%	13%	37%	21%	12%	10%	5%	6%	6%	4%	10%
Perikanan	12%	9%	8%	10%	6%	17%	25%	34%	24%	6%	6%	6%	7%	13%
Pertambangan dan Penggalian	8%	-12%	6%	28%	46%	17%	18%	22%	5%	17%	20%	9%	4%	14%
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	3%	-17%	7%	30%	53%	14%	18%	20%	-10%	13%	29%	8%	7%	14%
Pertambangan Bukan Minyak dan Gas Bumi	17%	-11%	0%	33%	43%	19%	16%	23%	17%	22%	15%	9%	-1%	16%
Penggalian	16%	13%	8%	5%	15%	23%	19%	26%	23%	9%	6%	6%	8%	14%
Industri Pengolahan	20%	4%	3%	6%	13%	16%	11%	24%	5%	3%	6%	3%	3%	9%
Industri Minyak dan Gas	24%	7%	11%	24%	56%	26%	6%	31%	-10%	2%	19%	3%	7%	16%
Industri Bukan Minyak dan Gas	19%	3%	2%	4%	7%	14%	13%	23%	9%	4%	5%	4%	3%	9%
Listrik, Gas Kota, Air Bersih	20%	30%	19%	18%	6%	8%	4%	6%	0%	0%	9%	5%	7%	10%
Konstruksi	17%	12%	7%	12%	20%	19%	12%	28%	24%	11%	8%	4%	1%	13%
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	14%	13%	2%	4%	8%	9%	8%	9%	6%	9%	6%	4%	7%	8%
Pengangkutan dan Komunikasi	10%	17%	8%	6%	13%	12%	0%	1%	-2%	5%	5%	2%	5%	6%
Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	10%	7%	6%	4%	11%	11%	5%	11%	5%	9%	7%	4%	6%	7%
Jasa-jasa	14%	5%	15%	13%	11%	15%	11%	14%	12%	8%	11%	8%	7%	11%

Sumber: BPS, diolah

Tabel 2.5
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (CAB) per PDB Harga Berlaku (%)
2004-2014

Tahun	Defisit CAB per PDB HB
2004	0,6%
2005	0,1%
2006	2,9%
2007	2,4%
2008	0,0%
2009	1,9%
2010	0,7%
2011	0,2%
2012	-2,8%
2013	-3,3%
2014	-2,9%

Sumber: BI, BPS, diolah

Tabel 2.6
Proporsi Ekonomi Menurut Sektor Harga Berlaku (%)
2004-2013

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	14,3%	13,1%	13,0%	13,7%	14,5%	15,3%	15,3%	14,7%	14,5%	14,4%	14%
Pertambangan dan Penggalian	8,9%	11,1%	11,0%	11,2%	10,9%	10,6%	11,2%	11,8%	11,8%	11,2%	11%
Industri Pengolahan	28,1%	27,4%	27,5%	27,0%	27,8%	26,4%	24,8%	24,3%	24,0%	23,7%	26%
Industri Minyak dan Gas	4,1%	5,0%	5,2%	4,6%	4,8%	3,7%	3,3%	3,4%	3,1%	2,9%	4%
Industri Bukan Minyak dan Gas	24,0%	22,4%	22,4%	22,4%	23,0%	22,6%	21,5%	20,9%	20,9%	20,8%	22%
Listrik, Gas Kota, Air Bersih	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	1%
Konstruksi	6,6%	7,0%	7,5%	7,7%	8,5%	9,9%	10,3%	10,2%	10,3%	10,0%	9%
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	16,1%	15,6%	15,0%	15,0%	14,0%	13,3%	13,7%	13,8%	14,0%	14,3%	14%
Pengangkutan dan Komunikasi	6,2%	6,5%	6,9%	6,7%	6,3%	6,3%	6,6%	6,6%	6,7%	7,0%	7%
Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	8,5%	8,3%	8,1%	7,7%	7,4%	7,2%	7,2%	7,2%	7,3%	7,5%	8%
Jasa-jasa	10,3%	10,0%	10,1%	10,1%	9,7%	10,2%	10,2%	10,6%	10,8%	11,0%	10%
PDB Migas	12,1%	15,2%	15,1%	14,6%	14,5%	12,8%	13,0%	13,8%	13,4%	12,6%	14%
PDB Nonmigas	87,9%	84,8%	84,9%	85,4%	85,5%	87,2%	87,0%	86,2%	86,6%	87,4%	86%
PDB Harga Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPS, diolah

Tabel 2.7
Proporsi Ekonomi Menurut Pengeluaran Harga Berlaku (%)
2004-2013

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	67%	64%	63%	64%	61%	59%	57%	55%	55%	56%	60%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8%	8%	9%	8%	8%	10%	9%	9%	9%	9%	9%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	22%	24%	24%	25%	28%	31%	32%	32%	33%	32%	28%
Perubahan Inventori	2%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	2%	2%	1%
Diskrepansi Statistik	-4%	-2%	-2%	-1%	2%	-2%	0%	2%	3%	3%	0%
Ekspor Barang dan Jasa	32%	34%	31%	29%	30%	24%	25%	26%	24%	24%	28%
Impor Barang dan Jasa	28%	30%	26%	25%	29%	21%	23%	25%	26%	26%	26%
Pendapatan Neto terhadap Luar Negeri Atas Faktor Produksi	-5%	-5%	-4%	-4%	-4%	-4%	-3%	-3%	-3%	-3%	-4%
Produk Nasional Bruto	95%	95%	96%	96%	96%	96%	97%	97%	97%	97%	96%
PDB Nonmigas	91%	89%	89%	89%	89%	92%	92%	92%	92%	93%	91%
PDB Migas	9%	11%	11%	11%	11%	8%	8%	8%	8%	7%	9%
PDB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPS, diolah

Tabel 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Harga Konstan (%)
2005-2013

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,0%	3,2%	5,0%	5,3%	4,9%	4,7%	4,7%	5,3%	5,3%	4,7%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,6%	9,6%	3,9%	10,4%	15,7%	0,3%	3,2%	1,3%	4,9%	6,2%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,9%	2,6%	9,3%	11,9%	3,3%	8,5%	8,3%	9,7%	4,7%	7,7%
Ekspor Barang dan Jasa	16,6%	9,4%	8,5%	9,5%	-9,7%	15,3%	13,6%	2,0%	5,3%	7,8%
Impor Barang dan Jasa	17,8%	8,6%	9,1%	10,0%	-15,0%	17,3%	13,3%	6,7%	1,2%	7,7%
Produk Nasional Bruto	4,3%	5,5%	6,4%	7,7%	4,2%	7,4%	6,6%	6,3%	5,6%	6,0%
PDB	5,7%	5,5%	6,3%	6,0%	4,6%	6,2%	6,5%	6,3%	5,8%	5,9%
PDB Nonmigas	6,6%	6,1%	6,9%	6,5%	5,0%	6,6%	7,0%	6,9%	6,3%	6,4%
PDB Migas	-3,1%	-1,3%	-0,8%	0,2%	-0,5%	0,8%	-1,0%	-3,4%	-2,8%	-1,3%

Sumber: BPS, diolah

Tabel 2.9
PMTDB dan PDB Indonesia Berdasarkan Harga Berlaku (Triliun Rupiah) dan Persentase PMTDB/PDB
2001-2013

Tahun	PMTDB HB (Triliun)	PDB HB (Triliun)	PMTDB/PDB (%)
2001	324	1.646	20%
2002	354	1.822	19%
2003	393	2.014	20%
2004	515	2.296	22%
2005	656	2.774	24%
2006	806	3.339	24%
2007	986	3.951	25%
2008	1.371	4.949	28%
2009	1.744	5.606	31%
2010	2.065	6.447	32%
2011	2.370	7.419	32%
2012	2.689	8.229	33%
2013	2.876	9.084	32%

Sumber: BPS, diolah

Tabel 2.10
ICOR Indonesia Berdasarkan PDB Harga Konstan (Miliar Rupiah)
2000-2012

Harga Konstan	2000-2003	2004-2008	2009-2012
Total PMTDB	1.186.689,55	2.087.269,34	2.320.528,23
Perubahan GDP	266.746,90	522.333,53	591.494,77
ICOR	4,45	4,00	3,92

Sumber: BPS, diolah

Tabel 2.11
Gross National Saving per PDB Harga Berlaku (%)
2005-2012

Tahun	Gross National Saving per PDB (%)
2005	26,0
2006	27,9
2007	26,0
2008	26,4
2009	31,1
2010	31,8
2011	31,9
2012	30,7

Sumber: Bank Dunia, diolah

Tabel 2.12
Deposito (M2-M1) per PDB (%)
2001-2013

Tahun	M2-M1 HB (Deposito Miliar Rupiah)	PDB HB (Miliar Rupiah)	(M2-M1)/PDB
2001	666.322	1.646.322	40%
2002	691.969	1.821.833	38%
2003	731.893	2.013.675	36%
2004	787.931	2.295.826	34%
2005	931.622	2.774.281	34%
2006	1.035.480	3.339.217	31%
2007	1.199.607	3.950.893	30%
2008	1.439.052	4.948.688	29%
2009	1.436.300	5.606.203	26%
2010	1.865.795	6.446.852	29%
2011	2.154.228	7.419.187	29%
2012	2.465.855	8.229.439	30%
2013	2.840.779	9.083.972	31%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel 2.13
Suku Bunga Deposito 6 Bulan (%)
2001-2014 (September)

Tahun	Deposito 6 bulan
2001	16,18
2002	13,79
2003	8,25
2004	7,12
2005	10,17
2006	10,70
2007	7,65
2008	10,34
2009	10,56
2010	7,20
2011	6,50
2012	7,49
2013	7,25
2014 (September)	7,75

Sumber: BI, CEIC

Tabel 2.14
Defisit APBN per PDB Harga Berlaku (%)
2005-2013

Tahun	Defisit APBN (Miliar Rupiah)	PDB Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	Defisit APBN per PDB Nominal
2005	14.408,20	2.774.281,10	0,52%
2006	29.141,50	3.339.216,80	0,87%
2007	49.843,80	3.950.893,20	1,26%
2008	4.121,30	4.948.688,40	0,08%
2009	88.618,80	5.606.203,37	1,58%
2010	46.845,70	6.446.851,90	0,73%
2011	84.399,60	7.419.187,10	1,14%
2012	190.105,30	8.229.439,40	2,31%
2013	153.338,00	9.083.972,20	1,69%

Keterangan:

2005 sampai 2011 = LKPP

2012 = APBNP

2013 = APBN

Tabel 2.15
Proporsi Belanja Modal APBN per PDB Harga Berlaku (%)
2005-2012

Tahun	Belanja Modal APBN per PDB HB
2005	1,2%
2006	1,6%
2007	1,6%
2008	1,5%
2009	1,4%
2010	1,2%
2011	1,6%
2012	1,8%

Sumber: Dasar-dasar Penyusunan APBN, diolah

Tabel 2.16
Proporsi Pengeluaran APBN per PDB Harga Berlaku untuk Infrastruktur (%)
2004-2013
(Proksi Pengeluaran Modal Kementerian PU)

Tahun	Kementerian PU
2004	0,45
2005	0,48
2006	0,57
2007	0,58
2008	0,62
2009	0,71
2010	0,51
2011	0,69
2012	0,83
2013	0,92

Sumber: Data Pokok APBN, diolah

Tabel 2.17
Proporsi Penerimaan Pajak APBN per PDB Harga Berlaku (%)
2001-2013

Tahun	PPh	PPn/PPNBM	PBB	Cukai	Pajak Lainnya
2001	5,75%	3,40%	0,32%	1,06%	0,09%
2002	5,59%	3,58%	0,34%	1,27%	0,08%
2003	5,71%	3,83%	0,44%	1,31%	0,08%
2004	5,21%	4,47%	0,51%	1,27%	0,08%
2005	6,33%	3,65%	0,58%	1,20%	0,08%
2006	6,25%	3,68%	0,63%	1,13%	0,07%
2007	6,03%	3,91%	0,60%	1,13%	0,07%
2008	6,62%	4,24%	0,51%	1,04%	0,06%
2009	5,67%	3,44%	0,43%	1,01%	0,06%
2010	5,54%	3,58%	0,44%	1,03%	0,06%
2011	5,81%	3,74%	0,40%	1,04%	0,05%
2012	5,65%	4,10%	0,35%	1,15%	0,05%
2013*	6,44%	4,66%	0,30%	1,01%	0,07%

Sumber: Dasar-dasar Penyusunan APBN, diolah

Tabel 2.18
Proporsi Penerimaan Nonpajak APBN per PDB HB (%)
2000-2013

Tahun	Penerimaan SDA (Migas & Nonmigas)	Migas	Nonmigas	Laba BUMN	PNBP Lainnya	BLU
2000	5,49%	4,80%	0,69%	0,29%	0,66%	0,00%
2001	5,20%	4,92%	0,28%	0,54%	1,25%	0,00%
2002	3,55%	3,29%	0,26%	0,54%	0,76%	0,00%
2003	3,35%	3,05%	0,30%	0,63%	0,93%	0,00%
2004	3,99%	3,71%	0,27%	0,43%	0,92%	0,00%
2005	3,98%	3,74%	0,24%	0,46%	0,85%	0,00%
2006	5,02%	4,73%	0,28%	0,64%	1,14%	0,00%
2007	3,36%	3,16%	0,21%	0,59%	1,44%	0,05%
2008	4,54%	4,28%	0,26%	0,59%	1,28%	0,08%
2009	2,48%	2,24%	0,24%	0,46%	0,96%	0,15%
2010	2,62%	2,37%	0,25%	0,47%	0,92%	0,16%
2011	2,88%	2,61%	0,27%	0,38%	0,93%	0,27%
2012	2,64%	2,41%	0,23%	0,37%	0,88%	0,25%
2013*	2,17%	1,93%	0,25%	0,37%	0,86%	0,22%

Sumber: Dasar-dasar Penyusunan APBN, diolah

Tabel 2.19
Proporsi PMA (FDI Inflows) per PDB
2004-2012

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PMA (Juta USD)	1.896	8.336	4.914	6.928	9.318	4.877	13.771	19.241	19.138
PDB (Juta USD)	258.794	288.472	369.455	437.294	518.429	550.987	716.502	853.016	879.368
Proporsi PMA per PDB (%)	0,73	2,89	1,33	1,58	1,80	0,89	1,92	2,26	2,18

Sumber: BI, BPS, diolah

Tabel 2.20
PNP per Kapita dan Proporsi FDI per GDCF 2004 dan 2010

No.	Negara	2004	2010	GNI/Capita (US\$)
1	Israel	8%	15%	30,551
2	Yunani	3%	1%	26,950
3	Slovenia	10%	3%	23,418
4	Korea Selatan	4%	0.03%	22,151
5	Portugal	2%	3%	21,870
6	Rep. Ceko	15%	15%	17,890
7	Slovakia	11%	3%	16,510
8	Estonia	30%	40%	14,630
9	Venezuela	6%	1%	13,559
10	Kroasia	12%	3%	13,501
11	Polandia	26%	9%	12,440
Rerata		11%	9%	
12	Lithuania	14%	12%	11,852
13	Uruguay	18%	22%	11,531
14	Latvia	16%	7%	11,447
15	Chili	35%	34%	10,120
16	Rusia	10%	13%	9,900
17	Turki	3%	6%	9,890
18	Brazil	14%	12%	9,390
19	Meksiko	12%	8%	8,890
20	Argentina	14%	9%	8,620
21	Malaysia	17%	18%	7,760
22	Afrika Selatan	2%	1%	7,176
23	Kolombia	16%	10%	6,180
24	Peru	14%	19%	5,075

25	Algeria	3%	3%	4,350
26	Cina	7%	7%	4,270
27	Thailand	3%	12%	4,150
Rerata		13%	12%	
28	Mesir	9%	15%	2,804
29	Indonesia	2%	6%	2,500
30	Filipina	3%	4%	2,060
31	India	3%	4%	1,270
32	Vietnam	10%	19%	1,160
Rerata		5%	10%	

Sumber: WDI, Bank Dunia, diolah

Tabel 2.21
Proporsi Pengeluaran APBN per PDB Harga Berlaku
untuk Bidang Pendidikan dan Kesehatan (%)
2000-2012

Tahun	Pengeluaran untuk Pendidikan per PDB (%)	Pengeluaran untuk Kesehatan per PDB (%)
2000	-	1,96
2001	2,46	2,23
2002	2,65	2,24
2003	3,22	2,53
2004	2,75	2,37
2005	2,87	2,79
2006	-	2,91
2007	3,04	3,10
2008	2,90	2,81
2009	3,53	2,83
2010	2,99	2,92
2011	2,77	2,86
2012	3,56	3,03

Sumber: Bank Dunia, diolah

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia (%)
2001-2012

Tahun	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni Sekolah Tingkat Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Tingkat Menengah Atas
2001	93,2	50,2	14,4
2002	92,7	51,7	15,0
2003	92,1	54,6	16,3
2004	91,2	56,2	17,0
2005	90,4	54,8	17,7
2006	93,4	59,2	17,9
2007	95,4	66,5	18,4
2008	94,6	65,6	21,3
2009	94,9	66,4	23,7
2010	94,9	68,4	24,9
2011	93,7	74,8	27,2
2012	92,2	76,1	31,5

Sumber: Bank Dunia

Tabel 2.23
Angka Melek Huruf di Indonesia (%)
2001-2012

Tahun	Perempuan	Laki-laki
2001	-	-
2002	-	-
2003	-	-
2004	98,5	98,9
2005	-	-
2006	96,3	97,0
2007	-	-
2008	99,4	99,5
2009	99,4	99,6
2010	-	-
2011	98,8	98,8
2012	-	-

Sumber: Bank Dunia

Tabel 2.24
Angka Harapan Hidup di Indonesia (Tahun)
2001-2012

Tahun	Harapan Hidup
2001	67,6
2002	67,9
2003	68,2
2004	68,6
2005	68,9
2006	69,1
2007	69,4
2008	69,7
2009	69,9
2010	70,2
2011	70,4
2012	70,6

Sumber: Bank Dunia

Tabel 2.25
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan (%)
2001-2013

Tingkat Pendidikan	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tidak/ Belum Sekolah	11,65	9,81	9,62	8,98	8,85	8,34	8,59	8,24	7,50	7,28	6,41	5,88	5,58
Tidak Tamat SD	17,53	16,17	15,74	15,31	15,23	14,99	14,42	14,98	14,86	12,74	14,69	13,90	13,76
SD/ Sederajat	33,03	33,40	33,22	31,87	32,07	31,00	30,43	29,08	29,31	29,72	28,72	28,09	28,20
SMP/ Sederajat	17,07	18,21	19,00	20,12	19,48	19,88	19,83	20,23	19,85	20,57	20,74	21,00	20,91
SMA/ Sederajat ke Atas	20,71	22,41	22,41	23,72	24,37	25,78	26,73	27,46	28,49	29,69	29,44	31,13	31,55

Sumber: BPS, Susenas, diolah

Tabel 2.26
Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 100 Orang
Laki-laki Menurut Tingkat Pendidikan yang Sama
2004-2013

Rasio Perempuan per 100 Laki-laki										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tidak punya ijazah	251,1	116,8	116,9	114,4	111,2	111,8	113,2	114,2	113,8	115,0
Kejar Paket	-	-	-	-	-	-	69,8	71,7	68,3	64,1
SD/MI	119,4	100,6	102,1	102,2	101,8	101,9	101,1	100,0	101,5	100,8
SMP/MTS	90,6	91,4	92,6	92,6	94,6	95,7	95,8	96,9	97,6	96,8
SMA/MA/SMK	74,9	78,2	78,6	79,3	80,7	80,5	81,6	79,4	78,6	79,8
D-1, D-2, D-3	98,2	107,5	116,1	126,8	127,5	130,1	131,3	134,0	127,3	132,3
D-4, S-1	62,7	68,7	68,3	73,7	80,1	80,8	81,9	88,0	86,4	94,9
S-2, S-3	-	33,2	35,4	36,5	37,4	44,8	47,1	54,3	42,7	52,3

Sumber: BPS, Susenas, diolah

Tabel 2.27
Proporsi Tingkat Pendidikan Menurut Jenis Kelamin serta Kota dan Desa
2001, 2007, dan 2013

2001	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan
<SLTA	69,3%	87,9%	77,1%	82,2%
SLTA	28,3%	11,6%	21,4%	16,7%
D-1/D-3	1,1%	0,3%	0,6%	0,6%
Universitas	1,3%	0,2%	0,9%	0,5%
2007	Kota	Desa	Laki-Laki	Perempuan
<SLTA	67,3%	84,1%	75,2%	55,9%
SLTA	29,5%	15,1%	22,9%	42,8%
D-1/D-3	1,3%	0,5%	0,8%	0,7%
Universitas	1,8%	0,3%	1,1%	0,6%
2013	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan
<SLTA	64,8%	81,3%	71,1%	74,8%
SLTA	31,4%	17,6%	26,4%	22,7%
D-1/D-3	1,1%	0,4%	0,6%	0,9%
Universitas	2,7%	0,7%	1,9%	1,6%

Sumber: BPS, diolah

Tabel 2.28
PDB per Kapita dalam Rupiah dan US\$
2004-2013

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Populasi	203.507.057	202.436.096	207.468.135	211.103.566	213.765.621	216.440.124	223.286.199	226.056.012	229.836.282	232.928.735
PDB Nominal (Miliar Rp)	2.295.826	2.774.281	3.339.217	3.950.893	4.948.688	5.606.203	6.446.852	7.419.187	8.229.439	9.083.972
Kurs Rupiah per Dollar	8.871	9.617	9.038	9.035	9.546	10.175	8.998	8.698	9.358	10.431
PDB per Kapita (Rp)	11.281.310	13.704.478	16.095.083	18.715.426	23.150.067	25.901.867	28.872.595	32.820.127	35.805.658	38.998.933
PDB per Kapita (US\$)	1.272	1.425	1.781	2.071	2.425	2.546	3.209	3.773	3.826	3.739

Sumber: BPS, Susenas, diolah

Tabel 2.29
HDI Indonesia Dibandingkan dengan HDI Negara ASEAN+6

Ranking 2013	Negara	HDI 2013	HDI 2012	Perubahan Ranking 2012-13	Kategori
2	Australia	0,933	0,931	0	Sangat Tinggi (>0,8)
7	Selandia Baru	0,910	0,908	0	Sangat Tinggi
9	Singapura	0,901	0,899	3	Sangat Tinggi
15	Korea Selatan	0,891	0,888	1	Sangat Tinggi
17	Jepang	0,890	0,888	-1	Sangat Tinggi
30	Brunei Darussalam	0,852	0,852	0	Sangat Tinggi
62	Malaysia	0,773	0,770	0	Tinggi (>0,7)
89	Thailand	0,722	0,720	0	Tinggi
91	Cina	0,719	0,715	2	Tinggi
108	Indonesia	0,684	0,681	0	Sedang (>0,56)
117	Filipina	0,660	0,656	1	Sedang
121	Vietnam	0,638	0,635	0	Sedang
135	India	0,586	0,583	0	Sedang
136	Kamboja	0,584	0,579	1	Sedang
139	Laos	0,569	0,565	0	Medium
150	Myanmar	0,524	0,520	0	Rendah (0,34)

Sumber: UNESCO, diolah

Tabel 2.30
Proporsi Pengeluaran untuk Riset terhadap PDB (%) Indonesia dan Negara Terpilih
2001-2012

Tahun	Pengeluaran Riset per PDB (%)								
	Indonesia	Malaysia	Thailand	Filipina	Singapura	Vietnam	Korea Selatan	Cina	India
2001	0,05	-	0,26	-	2,06	-	2,47	0,95	0,72
2002	-	0,65	0,24	0,14	2,10	0,18	2,40	1,07	0,71
2003	-	-	0,26	0,13	2,05	-	2,49	1,13	0,71
2004	-	0,60	0,26	-	2,13	-	2,68	1,23	0,74
2005	-	-	0,23	0,11	2,19	-	2,79	1,32	0,81
2006	-	0,61	0,25	-	2,16	-	3,01	1,39	0,80
2007	-	-	0,21	0,11	2,36	-	3,21	1,40	0,79
2008	-	0,79	-	-	2,64	-	3,36	1,47	0,84
2009	0,08	1,01	0,25	-	2,20	-	3,56	1,70	0,82
2010	-	1,07	-	-	2,05	-	3,74	1,76	0,80
2011	-	1,07	-	-	2,23	-	4,04	1,84	0,81
2012	-	-	-	-	2,10	-	-	1,98	-

Sumber: Bank Dunia

Tabel 2.31
Jumlah Peneliti per Satu Juta Penduduk Indonesia dan Negara Terpilih
2001-2012

Tahun	Jumlah Peneliti per 1 Juta Penduduk								
	Indonesia	Malaysia	Thailand	Filipina	Singapura	Vietnam	Korea Selatan	Cina	India
2001	202	-	281	-	4.161	-	2.951	577	-
2002	-	293	-	-	4.381	113	3.059	626	-
2003	-	-	281	71	4.706	-	3.246	662	-
2004	-	499	-	-	4.882	-	3.338	707	-
2005	-	-	313	80	5.292	-	3.823	849	137
2006	-	368	-	-	5.425	-	4.229	923	-
2007	-	-	324	78	5.769	-	4.665	1.067	-
2008	-	599	-	-	5.742	-	4.933	1.186	-
2009	90	1.065	332	-	6.150	-	5.068	853	-
2010	-	1.459	-	-	6.307	-	5.451	890	160
2011	-	1.643	-	-	6.494	-	5.928	963	-
2012	-	-	-	-	6.438	-	-	1.020	-

Sumber: Bank Dunia

Tabel 2.32
Jumlah Publikasi Jurnal Ilmiah Internasional Indonesia dan Negara Terpilih
2001-2012

Tahun	Jumlah Publikasi di Jurnal Ilmiah Internasional								
	Indonesia	Malaysia	Thailand	Filipina	Singapura	Vietnam	Korea Selatan	Cina	India
2001	189	472	727	141	2.434	155	11.008	21.134	10.801
2002	178	495	834	182	2.632	144	11.735	23.269	11.665
2003	157	479	1.019	184	2.939	205	13.403	28.768	12.462
2004	182	586	1.131	163	3.384	167	15.256	34.846	13.369
2005	205	615	1.249	178	3.611	221	16.396	41.604	14.635
2006	215	724	1.568	181	3.838	225	17.910	49.575	16.743
2007	198	808	1.728	195	3.793	283	18.470	56.811	18.203
2008	219	951	1.960	224	4.069	363	21.091	65.301	18.988
2009	262	1.351	2.033	223	4.188	326	22.280	74.034	19.924
2010	248	1.608	2.106	222	4.377	390	24.106	79.991	20.882
2011	270	2.092	2.304	241	4.543	432	25.593	89.894	22.481
2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Bank Dunia

Tabel 2.33
Upah Nominal 2001-2013 (Rupiah)

Tahun	Upah Nominal (Buruh/Karyawan/ Pegawai)
2001	626.376
2002	719.081
2003	857.613
2004	902.653
2005	863.711
2006	935.019
2007	1.101.692
2008	1.177.238
2009	1.345.083
2010	1.415.975
2011	1.573.827
2012	1.656.439
2013	1.909.539

Sumber: BPS, Susenas, diolah

Tabel 2.34
Upah Riil (Produktivitas) dan Upah Nominal
2001-2013 (Rupiah)

Tahun	Upah Nominal (Buruh/ Karyawan/Pegawai)	Upah Riil (Buruh/Karyawan/ Pegawai)
2001	626.376	1.468.852
2002	719.081	1.642.985
2003	857.613	906.654
2004	902.653	960.805
2005	863.711	1.061.809
2006	935.019	1.201.007
2007	1.101.692	1.101.692
2008	1.177.238	1.209.658
2009	1.345.083	1.268.047
2010	1.415.975	1.333.047
2011	1.573.827	1.403.556
2012	1.656.439	1.464.149
2013	1.909.539	1.566.432

Sumber: BPS, Susenas, diolah

Tabel 3.1
Pertumbuhan PDB Negara Terpilih
Terinci Menurut Lapangan Usaha Besar
1980-2010 (%)

Negara	Periode	GDP		ISIC 1		ISIC 2-5		ISIC 3		ISIC 6-9	
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
India	A	5,8	6,0	3	3	7,1	6,3	7,4	7	6,7	8
	B	5,9	8,0	3,2	3	6,1	8,5	6,7	8,7	7,7	9,6
Indonesia	A	6,1	4,2	3,4	2,1	6,9	5,3	12,6	6,7	7	4
	B	4,2	5,3	2	3,5	5,2	4,1	6,7	4,6	4	7,3
Cina	A	7,6	4,2	3,9	1	9,8	5,7	9,5	6,9	7,3	3,8
	B	4,2	4,5	1	2,2	5,7	5,4	6,9	5,6	3,7	4
Thailand	A	10,2	10,6	5,9	4,1	11,1	13,7	10,4	-	13,7	10,2
	B	10,6	10,8	4,1	4,4	13,7	11,8	12,9	11,6	11	11,5
Malaysia	A	5,3	7,0	3	0,3	7,2	8,6	8,9	9,5	4,2	7,3
	B	7,0	5,0	0,3	3,3	8,6	3,3	9,5	4,1	7,3	6,9
Brazil	A	0,7	3,1	0,8	1,5	1,1	3,8	1,5	4,4	0,6	2,9
	B	3,1	2,1	1,5	1,7	3,8	1,3	4,3	1,1	2,9	2,5
Meksiko	A	2,7	2,9	2,8	3,3	2	2,6	1,6	1,5	3,3	3
	B	2,7	3,7	3,6	3,6	2,4	2,8	2	2,5	3,8	3,9
Korea Selatan	A	9,4	5,8	2,8	1,6	12,1	6	13,4	7,3	9	5,6
	B	5,8	4,1	1,6	2	6	5,4	7,3	6,3	5,6	3,6
Spanyol	A	3,0	2,6	-	1,2	-	2,1	-	-	-	2,8
	B	2,7	2,4	3,1	-0,1	2,2	0,8	5,2	-0,2	2,7	3,2
Italia	A	2,4	1,6	0,1	1,6	2	1,1	2,9	1,5	2,8	1,7
	B	1,5	0,5	2,1	-0,1	1	-0,8	1,6	-1,4	1,7	1
Jepang	A	4,0	1,3	1,3	-3,1	4,2	-0,1	4,8	0,8	3,9	2,2
	B	1,0	0,4	-0,4	-0,8	-0,4	0,5	0,5	1,6	1,7	1,3
Australia	A	2,3	2,0	2	2	1,1	1	0,8	-	3	2,4
	B	1,9	1,3	2	0,3	0,9	0,5	-	0,1	2,2	1,3
Perancis	A	2,2	1,8	1,7	-0,2	1,2	-0,1	-	-0,1	2,9	2,9
	B	1,6	1,0	0,1	-0,2	-0,1	0,1	0,1	0,5	2,6	1,7
Jerman	A	3,4	3,9	3,3	3,6	2,9	2,9	1,9	2,2	3,7	4,3
	B	3,7	3,2	3,4	1,7	2,8	2,8	1,7	0,9	4	3,6
Amerika Serikat	A	3,0	3,5	-	3,7	-	3,7	-	-	-	3,4
	B	3,6	1,8	3,8	1,4	3,7	0,3	-	1,9	3,6	2,2

Catatan: AI = 1980-1990; BI = 1990-2000; AII = 1990-2000; BII = 2000-2010

Sumber: World Development Indicators

Tabel 3.2
Selisih Pertumbuhan Sektoral dengan Pertumbuhan PDB Negara Terpilih
1980-2010 (%)

Negara	Periode	ISIC 1		ISIC 2-5		ISIC 3		ISIC 6-9	
		I	II	I	II	I	II	I	II
India	A	-2,8	-3	1,3	0,3	1,6	1	0,9	2
	B	-2,7	-5	0,2	0,5	0,8	0,7	1,8	1,6
Indonesia	A	-2,7	-2,1	0,8	1,1	6,5	2,5	0,9	-0,2
	B	-2,2	-1,8	1	-1,2	2,5	-0,7	-0,2	2
Cina	A	-3,7	-3,2	2,2	1,5	1,9	2,7	-0,3	-0,4
	B	-3,2	-2,3	1,5	0,9	2,7	1,1	-0,5	-0,5
Thailand	A	-4,3	-6,5	0,9	3,1	0,2	-10,6	3,5	-0,4
	B	-6,5	-6,4	3,1	1	2,3	0,8	0,4	0,7
Malaysia	A	-2,3	-6,7	1,9	1,6	3,6	2,5	-1,1	0,3
	B	-6,7	-1,7	1,6	-1,7	2,5	-0,9	0,3	1,9
Brazil	A	0,1	-1,6	0,4	0,7	0,8	1,3	-0,1	-0,2
	B	-1,6	-0,4	0,7	-0,8	1,2	-1	-0,2	0,4
Meksiko	A	0,1	0,4	-0,7	-0,3	-1,1	-1,4	0,6	0,1
	B	0,9	-0,1	-0,3	-0,9	-0,7	-1,2	1,1	0,2
Korea Selatan	A	-6,6	-4,2	2,7	0,2	4	1,5	-0,4	-0,2
	B	-4,2	-2,1	0,2	1,3	1,5	2,2	-0,2	-0,5
Spanyol	A	-3	-1,4	-3	-0,5	-3	-2,6	-3	0,2
	B	0,4	-2,5	-0,5	-1,6	2,5	-2,6	0	0,8
Italia	A	-2,3	0	-0,4	-0,5	0,5	-0,1	0,4	0,1
	B	0,6	-0,6	-0,5	-1,3	0,1	-1,9	0,2	0,5
Jepang	A	-2,7	-4,4	0,2	-1,4	0,8	-0,5	-0,1	0,9
	B	-1,4	-1,2	-1,4	0,1	-0,5	1,2	0,7	0,9
Australia	A	-0,3	0	-1,2	-1	-1,5	-2	0,7	0,4
	B	0,1	-1	-1	-0,8	-1,9	-1,2	0,3	0
Perancis	A	-0,5	-2	-1	-1,9	-2,2	-1,9	0,7	1,1
	B	-1,5	-1,2	-1,7	-0,9	-1,5	-0,5	1	0,7
Jerman	A	-0,1	-0,3	-0,5	-1	-1,5	-1,7	0,3	0,4
	B	-0,3	-1,5	-0,9	-0,4	-2	-2,3	0,3	0,4
Amerika Serikat	A	-3	0,2	-3	0,2	-3	-3,5	-3	-0,1
	B	0,2	-0,4	0,1	-1,5	-3,6	0,1	0	0,4

Catatan: AI = 1980-1990; BI = 1990-2000; AII = 1990-2000; BII = 2000-2010

Sumber: World Development Indicators

Tabel 3.3
Struktur PDB Indonesia Terinci Menurut Pulau
2000-2013 (%)

Pulau	Tahun												
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**
Sumatera	22,95	23,79	23,58	22,43	22,47	21,88	22,27	22,73	22,9	22,69	23,1	23,54	23,61
Jawa	58,98	58,12	58,89	59,95	59,33	59,28	59,49	58,99	57,99	58,58	58,07	57,64	57,82
Bali	1,27	1,28	1,35	1,35	1,32	1,28	1,2	1,24	1,22	1,3	1,26	1,22	1,25
Kalimantan	9,58	9,17	8,67	8,82	9,42	9,76	9,51	9,38	10,36	9,21	9,16	9,55	9,23
Sulawesi	4,04	4,15	4,15	4,16	4,16	4,06	4,03	4,09	4,19	4,46	4,52	4,61	4,76
Nusa Tenggara- Maluku- Papua	3,18	3,5	3,37	3,3	3,31	3,74	3,5	3,58	3,34	3,76	3,88	3,46	3,33

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.4
Struktur PDB Indonesia Terinci Menurut Lapangan Usaha dan Pulau (%)

Lapangan Usaha	Pulau	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian	Sumatera	29,61	30,19	30,35	31,41	32,32	32,23	33,04	33,55	34,13	34,21	35,12	35,71	35,38
	Jawa	46,57	45,07	44,66	43,41	42,82	42,94	43,41	43,11	42,56	42,56	42,02	41,27	41,51
	Bali	1,66	1,72	1,81	1,81	1,72	1,72	1,59	1,63	1,58	1,63	1,55	1,47	1,49
	Kalimantan	8,88	8,55	8,58	8,77	8,85	8,63	7,98	7,92	7,71	7,59	7,56	7,69	7,63
	Sulawesi	8,34	8,99	9,14	9,1	8,89	9,2	8,9	8,87	9,12	9,08	8,88	9,03	9,14
	Nusa Tenggara, Maluku, Papua	4,95	5,48	5,46	5,5	5,4	5,28	5,08	4,92	4,89	4,93	4,87	4,83	4,86
Pertambangan dan Galian	Sumatera	54,07	51,19	51,65	48,71	45,59	41,93	43,57	43,99	43,67	40,45	39,59	41,37	43,12
	Jawa	10,68	10,1	9,88	10,05	9,85	9,44	9,18	8,55	7,83	8,2	8,18	8,24	8,28
	Bali	0,08	0,08	0,1	0,1	0,1	0,09	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,11
	Kalimantan	21,68	22,97	23,03	26,32	29,48	29,77	30,33	30,06	34,63	33,3	34,27	37,93	37,37
	Sulawesi	2,69	2,51	2,34	2,6	2,82	2,5	2,43	2,47	2,15	2,18	2,42	2,58	2,9
	Nusa Tenggara, Maluku, Papua	10,81	13,15	12,99	12,22	12,15	16,28	14,41	14,86	11,65	15,78	15,44	9,79	8,22
Industri Pengolahan	Sumatera	17,64	21,82	22,04	19,23	19,36	18,29	17,56	17,75	17,69	18,86	19,57	19,59	19,56
	Jawa	67,78	64,89	65,52	68,6	67,66	68,33	69,67	70,03	68,72	69,73	68,92	68,51	68,43
	Bali	0,44	0,43	0,45	0,46	0,44	0,41	0,39	0,44	0,45	0,48	0,48	0,46	0,48
	Kalimantan	12,06	10,72	9,85	9,47	10,27	10,88	10,25	9,63	10,91	8,38	7,9	7,92	7,78
	Sulawesi	1,69	1,64	1,64	1,71	1,7	1,56	1,59	1,61	1,64	1,77	1,84	1,87	1,94
	Nusa Tenggara, Maluku, Papua	0,4	0,49	0,49	0,54	0,57	0,55	0,54	0,54	0,59	0,78	1,28	1,65	1,82

Listrik, Gas, dan Air Bersih	Sumatera	9,66	10,41	11,08	11,25	10,72	10,73	10,61	10,68	10,37	10,35	10,56	11,19	11,33
	Jawa	81,98	81,16	80,78	80,99	81,72	81,31	81,57	81,02	81,12	81,13	80,85	79,77	79,27
	Bali	1,53	1,51	1,64	1,47	1,57	1,66	1,65	1,86	1,98	1,95	1,91	2,01	2,19
	Kalimantan	2,74	2,81	2,52	2,64	2,55	2,71	2,67	2,77	2,8	2,73	2,77	2,89	2,88
	Sulawesi	3,18	3,19	3,08	2,79	2,6	2,73	2,64	2,77	2,82	2,93	2,98	3,17	3,36
	Nusa Tenggara, Maluku, Papua	0,92	0,91	0,89	0,86	0,84	0,85	0,85	0,91	0,91	0,91	0,93	0,97	0,99
Konstruksi	Sumatera	19,34	19,64	20,27	19,65	19,78	18,83	19,84	20,85	21,57	22,03	22,71	23,6	24,63
	Jawa	64,44	63,3	62,6	62,92	63,2	64,31	63,96	62,66	61,72	60,96	60,5	59,43	57,98
	Bali	0,99	0,99	1,07	1,05	0,97	0,98	0,94	0,98	1,04	0,98	0,92	0,89	0,97
	Kalimantan	6,79	7,16	7,13	7,21	7,04	6,94	6,73	6,74	6,42	6,34	6,15	6,1	6,21
	Sulawesi	5,4	5,54	5,51	5,66	5,51	5,49	5,18	5,34	5,59	5,76	5,57	5,68	5,77
	Nusa Tenggara, Maluku, Papua	3,03	3,37	3,42	3,51	3,5	3,45	3,34	3,44	3,65	3,94	4,14	4,29	4,54
Perdagangan Hotel, dan Restoran	Sumatera	16,04	17,04	16,74	16,23	16,54	15,85	16,9	17,17	17,09	17,02	17,52	17,92	18,08
	Jawa	71,02	69,65	70,21	71,77	69,92	71,16	70,57	70,14	70,23	69,65	69,11	68,69	68,45
	Bali	2,28	2,22	2,2	2,46	2,19	2,15	1,9	1,93	1,88	2,03	1,95	1,91	1,88
	Kalimantan	5,66	5,66	5,41	5,37	5,8	5,45	5,44	5,47	5,42	5,64	5,66	5,65	5,62
	Sulawesi	3,14	3,37	3,36	3,38	3,44	3,37	3,24	3,32	3,47	3,67	3,76	3,82	3,92
	Nusa Tenggara, Maluku, Papua	1,86	2,06	2,07	2,09	2,11	2,03	1,95	1,97	1,92	1,99	1,99	2,01	2,05
Pengangkutan dan Komunikasi	Sumatera	20,47	21,01	21,1	20,3	20,16	20,92	20,85	21,52	21,5	21,4	21,35	21,67	21,83
	Jawa	58,44	58,49	59,69	61,08	61,27	60,65	61,56	60,73	60,44	60,54	61,06	61,21	60,82
	Bali	2,7	2,75	2,61	2,49	2,45	2,43	2,15	2,29	2,39	2,54	2,55	2,42	2,47
	Kalimantan	9,51	8,74	8,21	7,89	7,76	7,63	7,18	7,17	7,23	7,03	6,77	6,6	6,6
	Sulawesi	5,81	5,84	5,26	5,09	5,13	4,963	5,12	5,13	5,3	5,35	5,27	5,18	5,37
	Nusa Tenggara, Maluku, Papua	3,07	3,18	3,14	3,15	3,23	3,41	3,14	3,15	3,14	3,14	3,01	2,93	2,91
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Sumatera	8,8	9,36	9,97	9,94	10,47	10,8	11,12	11,67	12	12,35	12,67	12,94	13,42
	Jawa	83,78	83,65	83,09	82,81	81,77	81,28	80,61	79,32	78,79	78,03	77,44	76,9	76,06
	Bali	1,09	1,07	1,07	1,02	1,03	1,1	1,13	1,15	1,17	1,14	1,08	1,03	1,03
	Kalimantan	2,9	2,78	2,72	2,82	2,9	2,96	3,25	3,57	3,63	3,7	3,76	3,92	4,1
	Sulawesi	2,38	2,23	2,23	2,43	2,77	2,8	2,86	3,04	3,12	3,31	3,56	3,72	3,89
	Nusa Tenggara, Maluku, Papua	1,09	0,91	0,92	0,98	1,06	1,06	1,04	1,25	1,29	1,47	1,49	1,5	1,5
Jasa-jasa	Sumatera	20,38	19,52	19,6	19,64	19,78	19,63	19,9	20,23	19,89	19,98	20,34	20,39	20,65
	Jawa	62,24	62,77	62,35	62,7	62,88	62,98	62,77	62,28	61,49	60,34	59,82	59,54	59,04
	Bali	2,03	2,13	2,44	2,42	2,33	2,31	2,18	2,17	2,04	1,96	2,84	1,8	1,83
	Kalimantan	4,85	4,77	5	5,18	5,21	5,24	5,23	5,31	5,93	6,08	6,08	6,03	6,03
	Sulawesi	6,54	6,66	6,52	6,09	5,96	6,06	6,24	6,29	6,85	7,86	7,86	8,01	8,21
	Nusa Tenggara, Maluku, Papua	3,95	4,14	4,09	3,96	3,84	3,78	3,68	3,73	3,8	4,08	4,08	4,24	4,24

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.5
Perkembangan Panjang Jalan (Km) Terinci Menurut Pulau/Kelompok Pulau dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan 2000-2012

Wilayah	Luas Daerah (Km ²)	Tahun					Persentase Panjang Jalan terhadap Luas Daerah				
		2000	2004	2005	2009	2012	2000	2004	2005	2009	2012
Indonesia	1.910.931,32	355.951	372.929	398.846	426.337	504.184	19%	20%	21%	22%	26%
1. Negara		26.272	34.629	34.628	38.570	38.570	1%	2%	2%	2%	2%
2. Propinsi		46.781	40.125	40.125	48.020	53.642	2%	2%	2%	3%	3%
3. Dati II		282.898	298.175	324.094	389.747	411.972	15%	16%	17%	20%	22%
Jawa	129.438,28			108.619	112.160	119.033			84%	87%	92%
1. Negara				5.119	5.611	5.611			4%	4%	4%
2. Propinsi				8.317	9.648	15.270			6%	7%	12%
3. Dati II				95.183	96.901	98.152			74%	75%	76%
Sumatera	480.793,28			141.335	159.444	172.122			29%	33%	36%
1. Negara				10.589	11.568	11.568			2%	2%	2%
2. Propinsi				14.750	15.247	15.247			3%	3%	3%
3. Dati II				115.996	132.629	145.307			24%	28%	30%
Bali	5.780,06			6.780	7.306	7.598			117%	126%	131%
1. Negara				502	535	535			9%	9%	9%
2. Propinsi				840	883	883			15%	15%	15%
3. Dati II				5.438	5.888	6.130			94%	102%	106%
Nusa Tenggara	67.290,42			26.179	27.297	28.114			39%	41%	42%
1. Negara				1.875	2.034	2.039			3%	3%	3%
2. Propinsi				4.043	3.580	3.580			6%	5%	5%
3. Dati II				20.261	21.678	22.495			30%	32%	33%
Kalimantan	544.150,07			40.065	52.606	55.701			7%	10%	10%
1. Negara				5.706	6.364	6.364			1%	1%	1%
2. Propinsi				3.740	5.730	5.730			1%	1%	1%
3. Dati II				30.619	40.512	43.607			6%	7%	8%
Sulawesi	188.522,36			58.932	81.259	83.318			31%	43%	44%
1. Negara				7.091	7.800	7.800			4%	4%	4%
2. Propinsi				4.977	6.274	6.274			3%	3%	3%
3. Dati II				46.864	67.185	69.244			25%	36%	37%
Maluku	78.896,53			5.454	12.780	14.067			6,91%	16,20%	17,83%
1. Negara				1.443	1.579	1.579			1,83%	2,00%	2,00%
2. Propinsi				1.585	3.479	3.479			2,01%	4,41%	4,41%
3. Dati II				2.426	7.722	9.009			3,07%	9,79%	11,42%
Papua	416.060,32			11.482	23.485	24.231			2,76%	5,64%	5,82%
1. Negara				2.303	3.074	3.074			0,55%	0,74%	0,74%
2. Propinsi				1.873	3.179	3.179			0,45%	0,76%	0,76%
3. Dati II				7.306	17.232	17.978			1,76%	4,14%	4,32%

Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2007-2013

Tabel 3.6
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Terinci Menurut Pulau
2010-2013

Pulau	PMDN (MILIAR RUPIAH)				PMA (JUTA US\$)			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Nilai (Miliar Rupiah/Juta US\$)								
Sumatera	4.224,3	16.334,2	14.256,2	22.913,8	747,2	2.076,5	3.729,2	3.395,5
Jawa	35.140,3	37.176,2	52.693,0	66.495,7	11.498,7	12.324,6	13.659,9	17.326,5
Bali	313,4	313,4	3.108,0	2.984,7	278,3	482,1	482,0	390,8
Kalimantan	14.575,7	13.467,4	16.739,7	28.691,3	2.011,4	1.918,9	3.208,6	2.727,4
Sulawesi	4.337,6	7.227,5	4.901,0	3.624,3	859,2	715,3	1.507,0	1.498,1
Nusa Tenggara, Maluku, Papua	2.035,2	1.483,0	484,2	3.418,8	820,0	1.957,2	1.977,7	3.233,3
Total	60.626,5	76.001,7	92.182,1	128.128,6	16.214,8	19.474,6	24.564,4	28.571,6
Peranan (% terhadap Total)								
Sumatera	6,97%	21,49%	15,47%	17,88%	4,61%	10,66%	15,18%	11,88%
Jawa	57,96%	48,91%	57,16%	51,90%	70,91%	63,29%	55,61%	60,64%
Bali	0,52%	0,41%	3,37%	2,33%	1,72%	2,48%	1,96%	1,37%
Kalimantan	24,04%	17,72%	18,16%	22,39%	12,40%	9,85%	13,06%	9,55%
Sulawesi	7,15%	9,51%	5,32%	2,83%	5,30%	3,67%	6,13%	5,24%
Nusa Tenggara, Maluku, Papua	3,36%	1,95%	0,53%	2,67%	5,06%	10,05%	8,05%	11,32%

Sumber: Diolah dari CEIC

Tabel 3.7
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Terinci Menurut Lapangan Usaha 2010-2013

Pulau	PMDN (Miliar Rupiah)				PMA (Juta US\$)			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Nilai (Miliar Rupiah/Juta US\$)								
Pertanian, Perburuan, Kehutanan, dan Perikanan	9.056,4	9.627,1	9.888,1	6.953,0	833,4	1.263,9	1.677,6	1.655,4
Pertanian	8.883,8	9.614,5	9.728,9	6.949,0	776,0	1.243,6	1.621,7	1.616,6
Kehutanan	171,6	12,5	144,5	-	39,4	10,3	26,9	28,8
Perikanan	1,0	0,1	14,7	4,0	18,0	10,0	29,0	10,0
Pertambangan dan Penggalian	3.075,0	6.899,2	10.480,9	18.762,0	2.200,5	3.619,2	4.255,4	4.816,3
Perindustrian	25.612,6	38.533,8	49.889,1	51.171,0	3.337,4	6.789,5	11.769,9	15.858,8
Listrik, Gas, dan Air	4.929,8	9.134,7	3.796,8	25.831,0	1.428,6	1.864,9	1.514,6	2.221,8
Konstruksi	67,6	598,2	4.586,6	6.033,0	618,4	353,7	239,6	526,8
Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran, dan Hotel	506,7	723,0	2.045,4	3.607,0	1.120,2	1.068,4	1.252,4	1.069,0
Perdagangan	116,4	328,6	1.030,4		773,6	826,0	483,6	
Restoran dan Hotel	390,3	394,4	1.015,0		346,6	242,4	768,8	
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	13.787,7	8.130,1	8.612,0	13.178,0	5.072,1	3.798,9	2.808,2	1.449,8
Real Estate dan Jasa Perusahaan	261,7	732,7	58,0	2.152,0	1.050,4	198,7	401,8	677,7
Jasa Masyarakat, Sosial, dan Perorangan	3.328,8	1.621,9	2.825,1	462,0	553,8	517,5	645,8	341,8
Total	60.626,3	76.000,7	92.182,0	128.149,0	16.214,8	19.474,7	24.565,3	28.617,4
Peranan (% terhadap total)								
Pertanian, Perburuan, Kehutanan, dan Perikanan	14,94%	12,67%	10,73%	5,43%	5,14%	6,49%	6,83%	5,78%
Pertanian	14,65%	12,65%	10,55%	5,42%	4,79%	6,39%	6,60%	5,65%
Kehutanan	0,28%	0,02%	0,16%	0,00%	0,24%	0,05%	0,11%	0,10%
Perikanan	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,11%	0,05%	0,12%	0,03%
Pertambangan dan Penggalian	5,07%	9,08%	11,37%	14,64%	13,57%	18,58%	17,32%	16,83%
Perindustrian	42,25%	50,70%	54,12%	39,93%	20,58%	34,86%	47,91%	55,42%
Listrik, Gas, dan Air	8,13%	12,02%	4,12%	20,16%	8,81%	9,58%	6,17%	7,76%
Konstruksi	0,11%	0,79%	4,98%	4,71%	3,81%	1,82%	0,98%	1,84%

Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran, dan Hotel	0,84%	0,95%	2,22%	2,81%	6,91%	5,49%	5,10%	3,74%
Perdagangan	0,19%	0,43%	1,12%	0,00%	4,77%	4,24%	1,97%	0,00%
Restoran dan Hotel	0,64%	0,52%	1,10%	0,00%	2,14%	1,24%	3,13%	0,00%
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	22,74%	10,70%	9,34%	10,28%	31,28%	19,51%	11,43%	5,07%
Real Estate dan Jasa Perusahaan	0,43%	0,96%	0,06%	1,68%	6,48%	1,02%	1,64%	2,37%
Jasa Masyarakat, Sosial, dan Perorangan	5,49%	2,13%	3,06%	0,36%	3,42%	2,66%	2,63%	1,19%

Sumber: Diolah dari CEIC

Tabel 3.8
Tingkat Pendidikan Tertinggi Tenaga Kerja Berdasarkan Pulau
2001 dan 2013 (%)

Pulau	2001			2013		
	SD	SMP	>SMP	SD	SMP	>SMP
Sumatera	57,21	20,59	22,20	42,92	19,65	37,43
Jawa	62,20	15,38	22,42	45,28	20,16	34,56
Bali	56,99	14,02	28,99	45,12	13,26	41,62
Kalimantan	61,47	17,75	20,78	50,67	16,78	32,55
Sulawesi	58,07	17,46	24,47	40,65	17,63	41,72
Maluku-Nusa Tenggara-Papua	67,18	14,26	18,56	52,84	14,66	32,50

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.9
Struktur Produksi Tanaman Bahan Pangan Terinci Menurut Pulau (%)

Produk/Pulau	Tahun				
	2001	2004	2007	2009	2013
<i>Padi</i>					
Jawa	56,11%	54,11%	54,25%	54,16%	52,82%
Luar Jawa	43,89%	45,89%	45,75%	45,84%	47,18%
Sumatera	22,37%	23,13%	22,83%	22,82%	23,60%
Kalimantan	6,09%	6,68%	7,67%	6,82%	6,66%
Sulawesi	9,87%	9,44%	9,75%	10,56%	11,28%
Bali	1,56%	2,68%	1,50%	1,36%	1,24%
Nusa Tenggara Timur-Maluku-Papua	3,99%	3,96%	4,00%	4,27%	4,41%
<i>Jagung</i>					
Jawa	52,95%	60,19%	60,93%	53,63%	54,55%
Luar Jawa	47,05%	39,81%	39,07%	46,37%	45,45%
Sumatera	30,66%	20,61%	16,44%	23,15%	21,53%
Kalimantan	0,91%	1,44%	2,16%	1,71%	1,50%
Sulawesi	8,50%	10,76%	18,20%	15,37%	14,60%
Bali	0,79%	0,61%	0,57%	0,53%	0,31%
Nusa Tenggara Timur-Maluku-Papua	6,18%	6,39%	1,70%	5,60%	7,50%
<i>Ubi Kayu</i>					
Jawa	57,10%	55,00%	49,29%	46,01%	45,84%
Luar Jawa	42,90%	45,00%	50,71%	53,99%	54,16%
Sumatera	27,82%	29,56%	36,72%	41,23%	43,95%
Kalimantan	2,59%	2,45%	2,56%	2,22%	1,48%
Sulawesi	4,12%	4,98%	4,76%	3,98%	3,47%
Bali	0,94%	0,73%	0,87%	0,78%	0,66%
Nusa Tenggara Timur-Maluku-Papua	7,44%	7,28%	5,81%	5,79%	4,61%
<i>Ubi Jalar</i>					
Jawa	39,27%	39,11%	37,53%	39,87%	55,35%
Luar Jawa	60,73%	60,89%	62,47%	60,13%	44,65%
Sumatera	17,81%	18,05%	18,17%	17,31%	22,09%
Kalimantan	4,41%	4,08%	4,48%	4,10%	2,73%
Sulawesi	8,41%	8,83%	8,65%	9,53%	8,58%
Bali	3,06%	3,81%	4,83%	3,84%	3,07%
Nusa Tenggara Timur-Maluku-Papua	27,04%	26,12%	26,34%	25,35%	8,18%

Sumber: BPS, diolah

Tabel 4.1
Ekspor-Impor Kelompok Komoditas Indonesia (Juta US\$)

Kelompok Komoditas	Net Eksportir (Net Importir)						Pertumbuhan Ekspor (%)	Pertumbuhan Impor (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
Bahan Makanan	12.686,84	10.995,99	13.514,26	14.976,59	17.890,56	16.531,23	0,07	0,08
SITC 0: Food and Live Animals	(618,64)	(259,49)	(1.399,09)	(4.220,73)	(2.599,75)	(153,37)	0,07	0,08
SITC 1: Beverages and Tobacco	20,30	207,75	179,45	150,80	31,82	321,52	0,13	0,07
SITC 22: Oil Seeds, Nuts & Kernels	(792,17)	(783,69)	(1.048,04)	(1.471,27)	(1.405,11)	(1.002,26)	0,08	0,08
SITC 4: Animal & Vegetable Oils & Fats	14.077,35	11.831,43	15.781,94	20.517,79	21.863,60	17.365,35	0,07	0,09
Bahan Mentah	4.414,19	2.553,26	6.157,73	9.596,18	6.252,81	5.789,99	0,13	0,05
SITC 2 (Kec. SITC 22, SITC 27, SITC 28) Crude Materials, Inedible	4.414,19	2.553,26	6.157,73	9.596,18	6.252,81	5.789,99	0,13	0,05
Mineral yang Belum Diolah	(676,65)	(485,16)	(595,08)	(743,12)	(770,92)	(503,00)	0,06	-0,01
SITC 27: Crd. Fertilizers & Crd. Minerals	(676,65)	(485,16)	(595,08)	(743,12)	(770,92)	(503,00)	0,06	-0,01
Logam yang Bukan Besi dan Baja	5.737,09	8.008,10	11.234,98	10.240,81	6.530,05	6.712,49	0,04	0,05
SITC 28: Metalliferous Ores & Metal Scr	3.624,54	5.645,49	8.446,35	6.899,48	5.725,08	5.640,58	0,08	0,03
SITC 68: Non-Ferrous Metals	2.112,55	2.362,61	2.788,63	3.341,33	804,97	1.071,91	-0,01	0,07
Kelompok Komoditas Primer	6.779,63	13.879,36	19.259,00	28.091,21	20.638,56	16.927,20	0,10	0,08
SITC 3: Mineral Fuels, Lubricants etc.	6.779,63	13.879,36	19.259,00	28.091,21	20.638,56	16.927,20	0,10	0,08
Industri Manufaktur	(30.746,96)	(16.174,55)	(28.547,15)	(38.254,58)	(54.173,91)	(24.287,43)	0,05	0,05
SITC 5: Chemical	(8.955,60)	(5.611,80)	(7.842,20)	(9.481,02)	(13.068,81)	(7.914,56)	0,10	0,06
SITC 6 (Tidak Termasuk SITC 68): Manufactured Goods	(2.978,78)	587,84	(1.308,19)	(3.720,40)	(8.288,67)	(3.433,51)	0,03	0,06
SITC 7: Machinery & Transport Eqp.	(26.718,82)	(19.620,02)	(28.961,79)	(36.019,01)	(42.869,90)	(23.393,60)	0,06	0,04
SITC 8: Misc. Manufactured Articles	7.906,24	8.469,43	9.565,03	10.965,85	10.053,46	10.454,23	0,07	0,09

Sumber: UN Comtrade Database

Tabel 4.2
Ekspor-Impor Kelompok Komoditas Tanaman Bahan Makanan (Juta US\$)

Kelompok Komoditas Tanaman Bahan Makanan	Net Eksportir (Net Importir)						Pertumbuhan Ekspor (%)	Pertumbuhan Impor (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
SITC 04: Cereal & Cereal Preparations	(2.355,35)	(1.593,21)	(2.188,63)	(4.760,66)	(3.623,93)	(2338,86)	0,12	0,23
SITC 05: Fruits And Vegetables	(207,37)	(415,53)	(582,05)	(729,92)	(737,74)	(502,88)	0,09	0,17
SITC 08: Feeding Stuff for Animals	(1.332,80)	(1.431,87)	(1.527,01)	(1.716,37)	(2.173,71)	(1.541,45)	0,06	0,13
SITC 06: Sugar, Sugar Prep. and Honey	(323,56)	(551,55)	(1.103,69)	(1.712,68)	(1.690,11)	(1.279,07)	0,32	0,46
SITC 222: Oil Seeds Use for Extraction Ofsoft Fixed Vegetables	(789,79)	(796,64)	(1.061,01)	(1.507,56)	(1.439,54)	(1.018,10)	0,08	0,18

Sumber: UN Comtrade Database

Tabel 4.3
Ekspor-Impor Kelompok Komoditas Hasil Peternakan (Juta US\$)

Kelompok Komoditas Hasil Peternakan	Net Eksportir (Net Importir)						Pertumbuhan Ekspor (%)	Pertumbuhan Impor (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
SITC 00: Live Animal for Food	(342,42)	(395,56)	(396,98)	(263,69)	(220,74)	(131,18)	-0,11	-0,11
SITC 01: Meat And Meat Preparations	(191,87)	(254,08)	(376,03)	(311,06)	(149,86)	(126,59)	-0,01	-0,01
SITC 02: Dairy Product and Eggs	(672,65)	(510,53)	(842,76)	(1.070,80)	(1.028,00)	(869,18)	0,06	0,06

Sumber: UN Comtrade Database

Tabel 4.4
Ekspor-Impor Kelompok Komoditas Barang Kimia (Juta US\$)

Kelompok Komoditas Barang Kimia	Net Eksportir (Net Importir)						Pertumbuhan Ekspor (%)	Pertumbuhan Impor (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
SITC 5: Chemical	(8.955,60)	(5.611,80)	(7.842,20)	(9.481,02)	(13.068,81)	(7.914,56)	0,06	0,06
SITC 51: Organic Chemicals	(2.514,28)	(1.560,31)	(1.511,95)	(938,79)	(3.502,13)	(2.181,41)	0,03	0,03
SITC 52: Inorganic Chemicals	(540,76)	(513,02)	(714,31)	(1.022,73)	(1.446,93)	(896,71)	0,07	0,07
SITC 53: Dyeing, Tanning & Colouring Mat	(556,25)	(487,68)	(667,30)	(916,64)	(988,69)	(725,49)	0,08	0,08
SITC 54: Med. & Pharmaceutical Prod	(348,82)	(360,27)	(404,14)	(405,35)	(417,50)	(307,24)	0,06	0,06
SITC 55: Ess. Oils & Perfum Materials	108,93	188,89	181,74	312,48	274,98	321,21	0,09	0,09
SITC 56: Fertilizers Manufactured	(2.294,18)	(620,62)	(1.015,71)	(2.151,56)	(2.070,13)	(817,29)	0,08	0,08
SITC 57: Plastics, Primary Form	(1.934,27)	(1.469,16)	(2.460,38)	(3.848,42)	(4.018,47)	(3.210,30)	0,12	0,12
SITC 58: Plastics, Non- Primary Form	14,85	14,58	(72,45)	(130,60)	(196,89)	(83,20)	0,13	0,13
SITC 59: Chem. Materials & Products Nes	(890,82)	(804,21)	(1.177,70)	(379,42)	(703,05)	(14,15)	0,07	0,07

Sumber: UN Comtrade Database

Tabel 4.5
Ekspor-Impor Kelompok Komoditas Hasil Industri Menurut Bahan Baku (Juta US\$)

Kelompok Komoditas Hasil Industri Menurut Bahan Baku	Net Eksportir (Net Importir)						Pertumbuhan Ekspor (%)	Pertumbuhan Impor (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
SITC 6: Manufactured Goods	(866,23)	2.950,45	1.480,45	(379,07)	(7.483,70)	(2.361,60)	0,06	0,06
SITC 61: Leather, Leather Med. Nes	(154,09)	(86,82)	(217,22)	(313,15)	(267,24)	(168,52)	0,05	0,05
SITC 62: Rubber Manufactures Nes	359,47	711,55	731,69	923,63	670,86	933,88	0,09	0,09
SITC 63: Wood And Cork Manufactures	1.984,45	1.684,04	2.082,92	2.327,01	2.364,22	2.286,31	0,05	0,05
SITC 64: Paper, Paperboard & Mfd Thereof	2.588,53	2.557,81	3.211,47	2.922,33	2.723,10	2.494,76	0,02	0,02
SITC 65: Textile Yarns, Fabrics & Prod.	170,77	416,70	(89,71)	(863,10)	(1.028,34)	(53,23)	0,09	0,09
SITC 66: Non-Metalic Minerals Mfs	244,65	354,59	225,15	113,12	(421,55)	(78,43)	0,12	0,12
SITC 67: Iron And Steel	(6.827,09)	(3.971,02)	(5.639,81)	(7.188,71)	(10.234,82)	(7.367,63)	0,05	0,05
SITC 68: Non-Ferrous Metals	2.112,55	2.362,61	2.788,63	3.341,33	804,97	1.071,91	0,07	0,07
SITC 69: Manufactures of Metal Nes	(1.345,48)	(1.079,01)	(1.612,68)	(1.641,53)	(2.094,90)	(1.480,64)	0,05	0,05

Sumber: UN Comtrade Database

Tabel 4.6
Ekspor-Impor Kelompok Komoditas Barang Manufaktur (Juta US\$)

Kelompok Komoditas Barang Manufaktur	Net Eksportir (Net Importir)						Pertumbuhan Ekspor (%)	Pertumbuhan Impor (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
SITC 69: Manufactures of Metal Nes	(1.345,48)	(1.079,01)	(1.612,68)	(1.641,53)	(2.094,90)	(1.480,64)	0,05	0,05
SITC 691: Structures and Parts of Iron, Steel or Aluminium	(167,15)	(145,36)	(153,72)	89,88	33,98	78,73	-0,05	-0,05
SITC 692: Metal Containers for Storage and Transport	(36,11)	(33,94)	(43,37)	(25,40)	(72,15)	(115,18)	0,05	0,05
SITC 693: Wire Product and Fencing Grills	(33,28)	(63,80)	(71,36)	(65,12)	(25,78)	(12,21)	-0,03	-0,03
SITC 694: Nails, Screws, Nuts, Bolts, Rivetsin The Like of Iron, St	(362,88)	(248,15)	(440,42)	(507,07)	(648,49)	(484,57)	0,11	0,11
SITC 695: Tools For Use in The Hand or Inmachines	(234,29)	(179,26)	(282,80)	(429,97)	(472,62)	(274,12)	0,10	0,10
SITC 696: Cutlery	(13,73)	(10,57)	(22,18)	(18,77)	(23,23)	(18,49)	0,09	0,09
SITC 697: Household Equipment of Base Metal, N.E.S	28,80	49,34	33,26	(5,34)	(41,74)	8,90	0,08	0,08
SITC 699: Manufactures of Base Metal N.E.S	(526,84)	(447,25)	(632,09)	(679,75)	(844,87)	(663,69)	0,07	0,07

Sumber: UN Comtrade Database

Tabel 4.7
Ekspor-Impor Kelompok Komoditas Mesin dan Alat Pengangkutan (Juta US\$)

Kelompok Komoditas Mesin dan Alat Pengangkutan	Net Eksportir (Net Importir)						Pertumbuhan Ekspor (%)	Pertumbuhan Impor (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
SITC 7: Machinery & Transport Eqp.	(26.718,82)	(19.620,02)	(28.961,79)	(36.019,01)	(42.869,90)	(23.393,60)	0,04	0,04
SITC 71: Power Generating Mach. & Eqp	(2.882,84)	(2.698,92)	(3.523,08)	(3.613,44)	(4.149,09)	(2.362,74)	0,01	0,01
SITC 72: Mach. Special For Partic. Inds	(4.712,45)	(3.276,40)	(5.591,47)	(7.592,47)	(7.213,63)	(3.700,01)	0,09	0,09
SITC 73: Metalworking Machinery	(824,53)	(518,10)	(647,70)	(1.200,73)	(1.564,48)	(1.325,28)	0,16	0,16
SITC 74: General Industrial Mach. & Eqp	(4.855,95)	(4.204,85)	(5.930,73)	(6.753,49)	(8.423,84)	(6.416,91)	0,08	0,08
SITC 75: Office Mach. & Aut. Data Proc.	(398,76)	363,90	(834,23)	(902,76)	(2.114,08)	(2.152,04)	0,04	0,04
SITC 76: Telecommunication & Rep. App	(3.893,37)	(976,61)	(1.092,03)	(2.637,32)	(3.169,00)	(1.441,17)	-0,02	-0,02
SITC 77: Electrical Mach., Apparatus	(2.634,14)	(1.749,45)	(2.696,21)	(3.346,99)	(3.874,01)	(1.452,87)	0,04	0,04
SITC 78: Road Vehicles	(3.867,03)	(1.889,32)	(4.362,64)	(5.940,01)	(6.982,57)	(2.912,61)	0,12	0,12
SITC 79: Other Transport Equipment	(2.649,75)	(4.670,27)	(4.283,70)	(4.031,81)	(5.379,20)	(1.629,97)	0,04	0,04

Sumber: UN Comtrade Database

Tabel 4.8
Ekspor-Impor Kelompok Komoditas Hasil Industri Lainnya (Juta US\$)

Kelompok Komoditas Hasil Industri Lainnya	Net Eksportir (Net Importir)						Pertumbuhan Ekspor (%)	Pertumbuhan Impor (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
SITC 8: Misc. Manufactured Articles.	7.906,24	8.469,43	9.565,03	10.965,85	10.053,46	10.454,23	0,09	0,09
SITC 81: Sanitary, Plumbing, Fittings	(67,33)	(87,84)	(93,71)	(180,93)	(170,89)	(123,22)	0,09	0,09
SITC 82: Furniture	1.581,69	1.522,49	1.734,40	1.454,28	1.400,98	1.314,21	0,15	0,15
SITC 83: Travel Goods	16,53	26,44	26,62	25,37	23,45	47,80	0,19	0,19
SITC 84: Clothing	5.402,88	5.646,15	6.454,71	7.628,70	6.963,28	6.645,72	0,14	0,14
SITC 85: Footwear	1.534,60	1.604,49	2.257,65	2.949,31	3.137,58	3.082,43	0,21	0,21
SITC 87: Prof., Scientific & Cont. Inst.	(677,17)	(635,20)	(1.023,41)	(1.098,17)	(1.255,38)	(1.032,79)	0,12	0,12
SITC 88: Photographic App., Eqp. & Opt.	(197,18)	(111,78)	(144,37)	(141,68)	(150,55)	(92,44)	-0,04	-0,04
SITC 89: Misc. Manufactured Articles	312,22	504,67	353,13	328,96	105,01	612,52	0,07	0,07

Sumber: UN Comtrade Database

Tabel 5.1
Angka Ketergantungan dan Persentase Penduduk Bekerja di Usia Produktif (15-64 Tahun) dan Nonproduktif (65 Tahun dan Lebih) 2001 dan 2013

	2001	2004	2007	2009	2013
Angka Ketergantungan (%)	20,5	19,6	18,6	18,0	16,7
Jumlah Penduduk Usia 0-14 (ribu jiwa)	62.884	62.246	61.508	61.017	61.429
Jumlah Penduduk Usia 65+ (ribu jiwa)	135.351	143.631	151.902	157.497	166.935
Jumlah Penduduk Usia 15-64 (ribu jiwa)	9.693	10.504	11.494	12.119	13.650
Persentase Penduduk Bekerja di Usia Produktif (15-64 tahun)	96,11	95,74	95,38	95,47	95,86
Persentase Penduduk Bekerja di Usia Nonproduktif (65 tahun dan lebih)	3,89	4,26	4,62	4,53	4,14

Sumber: Diolah dari Statistik Indonesia, berbagai edisi

Tabel 5.2
Proyeksi Jumlah Penduduk Terinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2000-2025 (A)- 2015 (B) Terinci

		Total	0-14	%	15-64	65+	%	DR%
A.	2000	205.132,0	62.969,0	30,7	132.605,1	9.557,9	4,7	54,7
	Laki-laki	102.822,4	32.051,1	31,2	66.334,3	4.437,0	4,3	55,0
	Perempuan	102.309,6	30.917,9	30,2	66.270,8	5.120,9	5,0	54,4
	2005	219.204,7	61.981,4	28,3	146.280,9	10.942,4	5,0	49,9
	Laki-laki	109.801,7	31.524,5	28,7	73.218,9	5.058,3	4,6	50,0
	Perempuan	109.403,0	30.456,9	27,8	73.062,0	5.884,1	5,4	49,7
	2010	233.477,4	60.777,4	26,0	160.258,4	12.441,6	5,3	45,7
	Laki-laki	116.875,8	30.934,8	26,5	80.170,8	5.770,2	4,9	45,8
	Perempuan	116.601,6	29.842,6	25,6	80.087,6	6.671,4	5,7	45,6
	2015	247.572,4	61.822,8	25,0	171.067,3	14.682,3	5,9	44,7
	Laki-laki	123.844,7	31.494,6	25,4	85.454,0	6.896,1	5,6	44,9
	Perempuan	123.727,7	30.328,2	24,5	85.613,3	7.786,2	6,3	44,5
	2020	261.005,0	62.413,7	23,9	180.403,5	18.187,8	7,0	44,7
	Laki-laki	130.445,3	31.818,7	24,4	89.949,7	8.676,9	6,7	45,0
	Perempuan	130.559,7	30.595,0	23,4	90.453,8	9.510,9	7,3	44,3
	2025	273.219,2	62.385,8	22,8	187.715,7	23.117,7	8,5	45,6
	Laki-laki	136.290,9	31.824,9	23,4	93.506,7	10.959,3	8,0	45,8
	Perempuan	136.928,3	30.560,9	22,3	94.209,0	12.158,4	8,9	45,4

B.	2010	238.518,8	68.138,0	28,6	158.500,8	11.880,0	5,0	50,5
	Laki-laki	119.852,7	34.924,5	29,1	79.652,8	5.275,4	4,4	50,5
	Perempuan	118.666,1	33.213,5	28,0	78.848,0	6.604,6	5,6	50,5
	2015	255.461,7	69.857,4	27,4	171.874,2	13.730,1	5,4	48,6
	Laki-laki	128.366,7	35.755,0	27,9	86.394,6	6.217,1	4,8	48,6
	Perempuan	127.095,0	34.102,4	26,8	85.479,6	7.513,0	5,9	48,7
	2020	271.066,4	70.710,0	26,1	183.517,3	16.839,1	6,2	47,7
	Laki-laki	136.142,5	36.130,5	26,5	92.188,4	7.823,6	5,8	47,7
	Perempuan	134.923,9	34.579,5	25,0	91.328,9	9.015,5	6,7	47,7
	2025	284.829,0	69.996,5	24,6	1.934.844,0	21.348,1	7,5	47,2
	Laki-laki	142.924,9	35.695,1	25,0	972.293,0	10.000,5	7,0	47,0
	Perempuan	141.904,1	34.301,4	24,2	96.255,1	11.347,6	8,0	47,4
	2030	296.405,1	67.882,8	22,9	201.805,8	26.716,5	9,0	46,9
	Laki-laki	148.547,3	34.634,4	23,3	101.467,8	12.445,1	8,4	46,4
	Perempuan	147.857,8	33.248,4	22,5	100.338,0	14.271,4	9,7	47,4

Tabel 5.3
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Kepadatan Berdasarkan Pulau
2001 dan 2013

Pulau	Luas Wilayah (Km ²)	2001	2013	2001	2013
		Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Kepadatan (Jiwa /Km ²)
Sumatera	480.793	43.661	53.539	91	111
Jawa	129.438	123.350	141.986	953	1.097
Kalimantan	544.150	11.475	14.751	21	27
Sulawesi	188.522	15.306	18.217	81	97
Bali	5.780	3.493	4.056	604	702
Nusa Tenggara	67.290	8.014	9.665	119	144
Maluku	78.897	2.164	2.743	27	35
Papua	416.060	2.993	3.861	7	9
Jawa	129.438	123.350	141.986	953	1.097
Luar Jawa	1.781.493	87.106	106.833	49	60
Kawasan Indonesia Barat	1.154.382	178.486	210.276	155	182
Kawasan Indonesia Timur	756.550	31.969	38.542	42	51
Indonesia	1.430.138	166.794	195.279	117	137

Sumber: Diolah dari Statistik Indonesia

Tabel 5.4
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Kepadatan Berdasarkan Provinsi
2001 dan 2013

Provinsi	Luas Wilayah (Km ²)	2001	2013	2001	2013	Pertumbuhan Kepadatan
		Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	
Aceh	57.956	3.758	4.811	65	83	28,01%
Sumatera Utara	72.981	11.479	13.590	157	186	18,39%
Sumatera Barat	42.013	4.308	5.067	103	121	17,60%
Riau	87.024	5.672	6.033	65	69	6,37%
Kepulauan Riau	8.202		1.861	-	227	0,00%
Jambi	50.058	2.628	3.286	53	66	25,03%
Sumatera Selatan	91.592	6.530	7.829	71	85	19,89%
Kepulauan Bangka Belitung	16.424	1.007	1.315	61	80	30,60%
Bengkulu	19.919	1.472	1.814	74	91	23,22%
Lampung	34.624	6.805	7.932	197	229	16,56%
DKI Jakarta	664	8.716	9.970	13.126	15.015	14,39%
Jawa Barat	35.378	37.459	45.341	1.059	1.282	21,04%
Banten	9.663	8.689	11.453	899	1.185	31,80%
Jawa Tengah	32.801	30.102	33.264	918	1.014	10,50%
DI Yogyakarta	3.133	3.112	3.595	993	1.147	15,53%
Jawa Timur	47.800	35.272	38.363	738	803	8,76%
Bali	5.780	3.493	4.056	604	702	16,14%
Nusa Tenggara Barat	18.572	3.979	4.711	214	254	18,39%
Nusa Tenggara Timur	48.718	4.035	4.954	83	102	22,78%
Kalimantan Barat	147.307	3.788	4.641	26	32	22,54%
Kalimantan Tengah	153.565	1.794	2.385	12	16	32,95%
Kalimantan Selatan	38.744	3.074	3.855	79	99	25,38%

Kalimantan Timur	204.534	2.820	3.871	14	19	37,27%
Sulawesi Utara	13.852	2.047	2.360	148	170	15,33%
Gorontalo	11.257	900	1.098	80	98	21,98%
Sulawesi Tengah	61.841	2.268	2.786	37	45	22,82%
Sulawesi Selatan	46.717	8.250	8.342	177	179	1,12%
Sulawesi Barat	16.787		1.234	-	74	0,00%
Sulawesi Tenggara	38.068	1.841	2.397	48	63	30,18%
Maluku	46.914	1.309	1.628	28	35	24,40%
Maluku Utara	31.983	855	1.115	27	35	30,41%
Papua	319.036	2.993	3.033	9	10	1,32%
Papua Barat	97.024		828	-	9	0,00%

Sumber: Diolah dari Statistik Indonesia

Tabel 5.5
Persentase Penduduk Bekerja dan Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan

Jenis Lapangan Pekerjaan	Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan					Rata-rata Pertumbuhan 2001-2013
	2001	2004	2007	2009	2013	
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	43,8%	43,3%	41,2%	39,7%	34,4%	-0,97%
Pertambangan dan Penggalian	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	1,3%	11,03%
Industri Pengolahan	13,3%	11,8%	12,4%	12,2%	13,4%	5,76%
Listrik, Gas, dan Air	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	19,96%
Bangunan	4,2%	4,8%	5,3%	5,2%	5,7%	13,21%
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	19,2%	20,4%	20,6%	20,9%	21,4%	7,97%
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	4,9%	5,8%	6,0%	5,8%	4,5%	4,25%
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, dan Jasa Perusahaan	4,3%	1,2%	1,4%	1,4%	2,6%	13,91%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	9,1%	11,2%	12,0%	13,4%	16,4%	22,01%

Sumber: Diolah dari Sakernas, berbagai edisi

Tabel 5.6
Nilai Upah Rata-rata Pekerja (Rupiah) Berdasarkan Lapangan Pekerjaan
2001-2012

Lapangan Usaha	2001	2004	2007	2010	2012	Pertumbuhan per Tahun
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	351.425	524.761	840.742	886.757	1.126.704	20,06
Pertambangan dan Penggalian	856.594	1.234.475	906.309	2.497.647	2.846.124	21,11
Listrik, Gas Kota, Air Bersih	869.547	734.777	882.512	1.194.178	1.389.634	5,44
Industri Pengolahan	517.117	1.199.301	1.463.582	1.737.471	2.253.880	30,53
Konstruksi	512.214	834.276	998.192	1.375.353	1.546.430	18,36
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	490.470	703.447	879.546	1.155.356	1.281.656	14,66
Pengangkutan dan Komunikasi	680.139	964.602	1.225.514	1.598.669	1.956.228	17,06
Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan	935.853	1.258.073	1.681.979	2.064.663	2.261.128	12,87
Jasa-jasa	610.917	828.135	1.116.180	1.603.767	1.883.117	18,93

Sumber: Diolah dari Sakernas, berbagai edisi

Tabel 5.7
Tamat Pendidikan Penduduk Bekerja di Sektor Pertanian, Industri Pengolahan,
Perdagangan, dan Sektor Lainnya (%)

Kelompok Usia	Tahun	SD / Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SMA	Tamat SMK	Tamat Diploma 1/2/3	Universitas
15-19 Tahun	2001	55	35	6	4	0	-
	2007	48	37	10	5	0	-
	2013	33	40	14	13	0	-
20-24 Tahun	2001	42	25	18	12	2	1
	2007	37	27	21	10	3	2
	2013	25	23	26	18	4	5
25-29 Tahun	2001	47	22	16	9	3	3
	2007	42	24	17	8	4	5
	2013	28	23	21	12	5	11
30-34 Tahun	2001	49	19	16	9	3	4
	2007	48	21	17	7	3	4
	2013	35	23	19	11	4	9

Sumber: Diolah dari Sakernas, berbagai edisi

Tabel 5.8
Perkembangan Struktur Penduduk Berumur 15 Tahun, Terinci Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditempuh, Jenis Kelamin, Kota dan Desa, Sakernas Agustus 2001-Agustus 2013

		Total	Laki-Laki	Perempuan	Kota	Desa
A	Agustus 2001	144.033.873	71.320.655	72.713.218	64.340.041	79.693.832
1	TIBP SEK	11.548.580	3.712.492	7.836.088	2.938.773	8.609.807
2	TIBT SD	21.538.039	9.542.295	11.995.744	6.192.851	15.345.188
3	SD	50.280.736	24.616.825	25.663.911	16.389.988	33.890.748
	s/d SD	83.367.355	37.871.612	45.495.743	25.521.612	57.845.743
4	SLTP	28.967.452	15.323.552	13.643.900	15.150.703	13.816.749
5	SMA	16.923.582	9.511.800	7.411.782	12.527.091	4.396.491
6	SMK	9.142.598	5.381.187	3.761.411	6.611.878	2.530.720
	SL	55.033.632	30.216.539	24.817.093	34.289.672	20.743.960
7	D-1, D-2, D-3	2.657.379	1.353.530	1.303.849	1.987.319	670.060
8	Universitas	2.975.507	1.878.974	1.096.533	2.541.438	434.069
B	Agustus 2007	164.118.323	82.079.391	82.038.932	72.197.255	91.939.068
1	TIBP SEK	9.753.661	3.218.459	6.535.202	2.303.568	7.450.093
2	TIBT SD	19.137.793	8.879.602	10.258.191	5.119.850	14.017.943
3	SD	56.563.762	28.383.080	28.180.382	18.523.797	38.039.665
	s/d SD	85.454.916	40.481.141	44.973.775	25.947.215	59.507.701
4	SLTP	36.394.897	18.754.592	17.640.305	17.134.794	19.260.103
5	SMA	23.390.385	12.576.605	108.133.780	15.434.130	7.956.255
6	SMK	10.002.880	5.776.735	4.226.145	6.999.651	3.003.225
	SL	69.778.162	37.107.932	32.680.230	39.568.575	30.219.587
7	D-1, D-2, D-3	4.076.333	1.815.520	2.260.813	2.807.636	1.268.697
8	Universitas	4.798.912	2.674.798	2.124.114	3.855.829	943.083
C	Agustus 2013	176.662.097	88.189.028	88.473.069	89.871.713	86.790.384
1	TIBP SEK	9.492.453	3.132.106	6.360.347	2.575.757	6.916.696
2	TIBT SD	23.140.558	10.621.488	12.519.070	8.282.548	14.858.010
3	SD	47.879.341	23.747.485	24.131.856	18.062.284	29.817.057
	s/d SD	80.512.352	37.501.079	43.011.273	28.920.589	51.591.762
4	SLTP	39.685.223	20.182.722	18.502.501	20.413.576	19.271.647
5	SMA	28.977.905	15.413.750	13.564.155	19.460.085	9.517.820
6	SMK	14.609.649	8.603.463	6.006.186	11.045.658	3.563.991
	SL	83.272.777	44.199.935	39.072.842	50.919.319	32.353.458
7	D-1, D-2, D-3	3.897.190	1.677.501	2.219.684	2.960.624	936.566
8	Universitas	8.979.778	4.810.513	4.169.265	7.071.181	1.908.597

Sumber: Diolah dari Sakernas, berbagai edisi

Tabel 5.9
Perkembangan Struktur Jumlah Penduduk yang Bekerja Selama Seminggu, Terinci Menurut Lapangan dan Status Pekerjaan Utama, Jenis Kelamin, Kota dan Desa, Sakernas Agustus 2001-Agustus 2013

	Lapangan/Status Pekerjaan Utama	Total	Laki-laki	Perempuan	Kota	Desa
A	Agustus 2001	90.807.417	57.131.424	33.675.993	36.048.804	54.708.613
	1. LPU 1	39.743.908	24.749.588	14.994.320	4.089.031	35.654.877
	2. LPU (2+4)	1.091.120	910.191	180.929	490.744	600.376
	3. LPU 3	12.086.122	6.953.573	5.132.549	7.215.021	4.871.101
	4. LPU 5	3.837.554	3.725.118	112.436	2.102.669	1.734.885
	5. LPU 6	17.469.129	8.990.893	8.478.236	10.997.406	6.471.723
	6. LPU 7	4.448.279	4.279.435	168.844	2.681.384	1.766.895
	7. LPU 8	1.127.823	851.511	276.312	982.425	145.398
	8. LPU 9	11.003.482	6.671.115	4.332.367	7.540.124	3.463.358
ii	1. SPU 3	2.788.878	2.425.710	363.168	1.342.678	1.446.200
	2. SPU 4	26.579.000	18.221.426	8.357.574	17.928.849	8.650.151
	3. SPU 5	3.633.126	2.122.804	1.510.322	597.071	3.036.055
	4. SPU 6	2.439.035	2.056.800	382.235	1.092.717	1.346.318
	5. SPU 1	17.451.704	11.714.311	5.737.393	7.909.765	9.541.939
	6. SPU 2	20.329.073	15.989.566	4.339.507	4.072.338	16.256.735
	7. SPU 7	17.586.601	4.600.807	12.985.794	3.155.384	14.431.215
B	Agustus 2013	110.804.041	69.216.487	41.587.554	53.622.461	57.181.580
	1. LPU 1	38.068.254	24.336.822	13.731.432	5.520.510	32.547.744
	2. LPU (2+4)	1.671.712	1.532.030	139.682	711.112	960.600
	3. LPU 3	14.883.817	8.880.045	6.003.772	9.895.018	4.988.799
	4. LPU 5	6.276.723	6.089.600	187.123	3.600.163	2.676.560
	5. LPU 6	23.737.236	11.728.494	12.008.742	16.016.573	7.720.663
	6. LPU 7	5.040.849	4.700.332	340.517	3.428.487	1.612.362
	7. LPU 8	2.912.418	2.127.981	784.437	2.490.648	421.770
	8. LPU 9	18.213.032	9.821.183	8.391.849	11.959.950	6.253.082
ii	1. SPU 3	3.755.610	3.036.273	719.337	2.115.179	1.640.431
	2. SPU 4	41.034.050	27.049.744	13.984.306	29.116.358	11.917.692
	3. SPU 5	5.053.263	3.349.910	1.703.353	1.149.502	3.903.761
	4. SPU 6	5.969.716	4.920.704	1.049.012	2.959.837	3.009.879
	5. SPU 1	18.710.007	11.901.516	6.808.491	8.926.602	9.783.405
	6. SPU 2	18.660.698	14.160.833	4.499.865	5.306.038	13.354.660
	7. SPU 7	17.620.697	4.797.507	12.823.190	4.048.495	13.571.752
c	LPU (6-9) 2001	3.408.713	20.792.954	13.255.759	22.201.339	11.847.374
	LPU (6-9) 2013	49.903.535	28.377.990	21.525.545	33.895.658	16.007.877

Keterangan:

Lapangan Pekerjaan Utama	
1	pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan
2	pertambangan dan penggalian
3	industri pengolahan
4	listrik, gas dan air
5	bangunan
6	perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel
7	angkutan, pergudangan dan komunikasi
8	keuangan asuransi, usaha persewaan bangunan
9	jasa kemasyarakatan
0	lainnya

Status Pekerjaan Utama	
1	berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain
2	berusaha dengan dibantu (buruh tak tetap)
3	berusaha dengan buruh tetap
4	pekerja/buruh/karyawan
5	pekerja bebas di pertanian
6	pekerja bebas di nonpertanian
7	pekerja tidak dibayar

Sumber: Diolah dari Sakernas, berbagai edisi

Tabel 5.10
Perkembangan Struktur Jumlah Penduduk dan Penduduk Berumur 15 Tahun dan Lebih
Menurut Jenis Kelamin, Kota dan Desa,
Sakernas Agustus 2009-Agustus 2013

	Total	Laki-laki	Perempuan	Kota	Desa
A. Agustus 2009	231.832.834	116.050.632	115.782.202	100.012.643	131.820.191
1 Usia > 15	169.328.208	84.174.122	85.154.086	74.869.668	94.458.540
2 Angkatan kerja	113.833.280	70.409.087	43.424.193	48.351.273	65.482.007
3 Pengangguran terbuka	8.962.617	5.286.561	3.676.056	5.152.416	3.810.201
4 Bekerja	104.870.663	65.122.526	39.748.137	43.198.857	61.672.806
a < 35 jam	31.569.934	15.672.949	15.896.985	7.960.605	23.609.329
b. Setengah pengangguran terbuka	15.395.570	8.724.692	6.670.979	3.897.325	11.498.245
B. Agustus 2010	238.219.392	119.852.909	118.366.483	102.922.634	135.269.758
1 Usia > 15	172.070.339	85.820.939	86.249.400	76.070.323	96.000.016
2 Angkatan kerja	116.527.546	71.881.763	44.695.783	49.689.741	66.837.805
3 Pengangguran terbuka	8.319.779	4.919.540	3.900.239	4.656.945	3.662.834
4 Bekerja	108.207.767	67.462.223	40.745.544	45.032.796	63.174.971
a < 35 jam	33.269.338	16.621.834	16.647.504	7.876.548	25.392.790
b. Setengah pengangguran terbuka	15.258.755	8.647.031	6.611.724	3.687.834	11.570.921
C. Agustus 2012	241.564.863	121.625.982	119.938.881	120.309.996	121.258.967
1 Usia > 15	171.756.077	85.710.829	86.045.248	86.183.250	85.572.527
2 Angkatan kerja	117.370.485	72.251.521	45.118.964	57.408.397	54.962.088
3 Pengangguran terbuka	7.700.086	4.261.578	3.438.508	4.726.211	2.973.875
4 Bekerja	109.670.399	67.989.943	41.680.456	52.682.186	56.988.213
a < 35 jam	34.588.087	17.306.962	17.281.125	10.329.836	24.258.251
b. Setengah pengangguran terbuka	13.524.054	7.661.408	5.862.646	4.960.582	8.563.472
D. Agustus 2012	244.750.214	123.246.172	121.504.402	121.917.603	124.872.615
1 Usia > 15	173.926.703	868.806.933	87.119.770	87.338.662	86.588.041
2 Angkatan kerja	118.053.110	73.284.748	44.768.362	57.003.114	61.049.996
3 Pengangguran terbuka	7.244.956	4.215.783	3.029.173	4.363.670	2.881.286
4 Bekerja	110.808.154	69.068.965	41.739.189	52.639.444	58.168.710
a < 35 jam	34.294.311	17.438.248	16.856.063	10.082.189	24.212.122
b. Setengah pengangguran terbuka	12.770.521	7.372.345	5.397.776	3.570.830	9.199.691

	Total	Laki-laki	Perempuan	Kota	Desa
E. Agustus 2013	248.593.350	125.197.874	123.395.476	124.496.540	124.096.810
1 Usia > 15	176.662.097	88.189.028	88.473.069	89.871.713	86.790.384
2 Angkatan kerja	118.192.778	73.705.319	44.487.459	57.915.147	60.277.631
3 Pengangguran terbuka	7.388.737	4.488.832	2.899.905	4.292.686	3.096.051
4 Bekerja	110.804.041	69.216.487	41.587.554	53.622.461	57.181.580
a < 35 jam	36.811.239	19.936.776	16.874.463	11.658.694	25.152.545
b. Setengah pengangguran terbuka	10.894.758	7.284.738	3.610.020	3.452.732	7.442.206

Sumber: Diolah dari Sakernas, berbagai edisi

Tabel 5.11
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan TPT Berdasarkan Kelompok Pulau 2001-2013

Angkatan Kerja	Tahun					
	2001	2004	2007	2009	2011	2013
Sumatera	19.744.712	20.819.061	21.383.650	23.101.500	23.892.767	24.168.750
Jawa	59.818.765	62.343.075	65.413.976	67.469.138	66.431.391	67.962.897
Kalimantan	5.186.914	5.629.422	5.974.052	6.531.010	6.861.192	6.886.626
Sulawesi	6.509.646	7.087.154	7.178.658	7.760.429	7.840.198	7.730.176
Bali	1.851.803	1.924.805	2.051.165	2.123.588	2.236.608	2.315.379
Maluku-Nusa Tenggara-Papua	5.700.608	6.169.870	6.354.410	6.847.615	7.158.330	7.424.665
Penduduk Bekerja	Tahun					
	2001	2004	2007	2009	2011	2013
Sumatera	2.395.180	2.483.721	2.741.464	2.994.354	3.557.672	3.693.658
Jawa	2.527.157	2.725.736	3.053.180	3.582.751	4.247.833	4.156.033
Kalimantan	1.178.631	1.153.845	1.268.043	1.352.836	1.648.259	1.728.070
Sulawesi	2.160.643	2.025.036	2.352.410	2.586.405	2.947.414	3.040.042
Bali	7.760.361	7.803.983	9.269.434	10.436.650	11.735.766	11.981.062
Maluku-Nusa Tenggara-Papua	34.345.235	36.197.957	39.387.139	41.588.312	45.129.636	47.405.023
Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun					
	2001	2004	2007	2009	2011	2013
Sumatera	7,40%	9,98%	7,81%	7,67%	4,88%	5,75%
Jawa	8,74%	10,16%	8,41%	8,46%	4,82%	4,59%
Kalimantan	5,78%	7,50%	5,23%	6,77%	2,81%	4,20%
Sulawesi	9,50%	12,72%	7,59%	7,58%	2,62%	4,84%
Bali	2,89%	4,66%	2,05%	3,13%	1,42%	1,79%
Maluku-Nusa Tenggara-Papua	6,03%	6,94%	5,14%	5,62%	3,02%	4,51%

Sumber: Diolah dari Sakernas, berbagai edisi

Tabel 5.12
Perkembangan Struktur Jumlah Penduduk yang Bekerja Selama Seminggu, Terinci Menurut Lapangan dan Jenis Pekerjaan Utama, Sakernas Agustus 2001-Agustus 2013

	JPU (0/1)	JPU (2+3)	JPU (4)	JPU (5)	JPU (6+7/8/9)	JPU x/00
A. Agustus 2001	3.208.207	4.494.699	10.061.660	4.418.983	62.229.264	394.609
1. LPU 1	854	26.007	4.053	23.476	39.689.126	392
2. LPU (2-5)	129.802	870.599	231.856	339.219	15.440.702	2.618
a. LPU (2+4)	13.114	66.243	12.958	15.835	982.495	475
b. LPU 3	85.873	723.954	174.688	305.768	10.793.696	2.143
c. LPU 5	30.815	80.402	44.210	17.616	3.664.511	-
3. LPU (6-9)	3.077.551	4.598.093	15.825.751	4.056.288	7.099.436	391.594
a. LPU 6	35.465	380.232	15.630.131	709.790	712.542	969
b. LPU 7	26.252	328.355	47.726	108.094	3.937.560	392
c. LPU 8	92.863	573.230	75.855	219.253	166.437	185
d. LPU 9	2.922.971	2.316.376	72.039	3.019.151	2.282.897	390.048
B. Agustus 2013	7.128.691	7.263.653	19.849.438	6.219.293	69.747.201	595.765
1. LPU 1	22.166	74.154	44.187	110.123	37.817.624	-
2. LPU (2-5)	570.555	1.398.844	361.165	614.882	19.886.806	-
a. LPU 2	60.795	66.289	7.761	61.813	1.224.109	-
b. LPU 3	323.870	1.012.579	319.073	421.522	12.806.773	-
c. LPU 4	48.870	64.145	11.579	21.581	104.770	-
d. LPU 5	137.020	255.831	22.752	109.966	5.751.154	-
3. LPU (6-9)	6.535.970	5.790.655	19.444.086	5.494.288	12.042.772	595.765
a. LPU 6	132.046	959.602	19.011.878	1.224.237	1.409.473	-
b. LPU 7	131.038	604.974	93.043	296.623	3.915.171	-
c. LPU 8	350.169	1.241.016	217.521	547.595	556.117	-
d. LPU 9	5.922.717	2.985.063	121.644	5.425.833	5.162.010	595.765

Keterangan:

jenis pekerjaan utama

- 0/1 tenaga professional, teknisi dan yang sejenis
- 2 tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan
- 3 tenaga tata usaha dan yang sejenis
- 4 tenaga usaha penjualan
- 5 tenaga usaha jasa
- 6 tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan
- 7,8,9 tenaga produksi, operator alat alat angkutan dan pekerja kasar

x/00 Lainnya

Sumber: Diolah dari Sakernas, berbagai edisi

Tabel 5.13
Populasi Perempuan, Tingkat Upah, dan Status Informalitas dari Pekerja Perempuan

No.	Negara	Populasi Perempuan	Tingkat Harapan Hidup		Tingkat Upah Perempuan	Pekerja Keluarga tidak Dibayar		Perempuan	
		% Total	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki %	Perempuan %	2005-09	2005-10
		2010	2010	2010	2009	2011	2014		
1	Vietnam	50,6	73	77	-	-	-	-	2,2
2	India	48,3	64	67	-	-	-	-	-
3	Filipina	49,8	65	72	42	9	17,4	-	55
4	Indonesia	50,1	67	71	32	8,1	32,4	-	22
5	Thailand	50,9	71	77	46	13,6	28,5	-	24
6	Cina	48,1	72	75	-	-	-	-	17
7	Malaysia	49,3	72	76	39	2,6	8,1	-	24
8	Argentina	51,1	72	79		0,4	1,2	65	23
9	Meksiko	50,7	74	79	39	4,8	9,7	54	31
10	Brazil	50,8	70	77	42	3,4	6,3	68	36
11	Turki	50,1	71	76	24	5,1	35,2	58	10
12	Rusia	53,7	63	75	53	0,1	0,1	62	37
13	Chili	50,6	76	82	37	1,1	2,5	58	24
14	Polandia	51,8	72	81	48	25	5,5	68	36
15	Hungaria	52,5	71	78	49	0,2	0,4	66	36
16	Republik Ceko	51	74	81	46	0,3	1	69	28
17	Korea Selatan	50,1	77	84	42	1,2	12,5	60	10
18	Portugal	51,6	76	82	44	0,7	1,2	66	32
19	Yunani	50,5	78	83	3	3,3	9,2	66	30
20	Spanyol	50,6	79	85	47	0,7	1	78	34
21	Italia	51,1	79	84	44	1,2	2,3	77	33
22	Inggris	50,8	79	82	47	0,2	0,4	75	36
23	Jepang	51,3	80	85	42	1,1	6,9	70	10
24	Perancis	51,3	78	85	49	0,3	0,9	78	39
25	Jerman	51	78	83	48	0,3	0,9	80	30
26	Kanada	50,4	79	83	51	0,1	0,2	67	36
27	Australia	50,2	80	81	47	0,2	0,3	70	43
28	Amerika Serikat	50,7	76	81	48	0,1	0,1	67	37

Sumber: Bank Dunia

Tabel 5.14
Perkembangan Struktur Jumlah Penduduk yang Bekerja Selama Seminggu, Terinci Menurut
Pendidikan yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama,
Sakernas Agustus 2001- Agustus 2013

		s/d T/BT SD	SD	SLTP	SLTA	PT	Total
A.	Agustus 2001						
1	LPU 1	65,3%	53,5%	34,5%	13,5%	2,7%	39.743.908
2	LPU (2-5)	12,6%	18,3%	23,1%	25,3%	13,8%	17.014.796
a.	LPU (2+4)	1,3%	1,0%	1,0%	1,6%	1,3%	1.091.120
b.	LPU 3	8,4%	12,2%	17,1%	19,8%	9,8%	12.086.122
c.	LPU 5	2,8%	5,1%	4,9%	3,9%	2,7%	3.837.554
3	LPU (6-9)	22,1%	28,2%	42,4%	61,2%	83,5%	34.048.713
a.	LPU 6	14,7%	17,7%	23,9%	26,1%	13,2%	17.469.129
b.	LPU 7	2,5%	4,3%	7,6%	7,2%	3,3%	4.448.279
c.	LPU 8	0,2%	0,2%	0,8%	3,4%	8,5%	1.127.819
d.	LPU 9	4,7%	6,0%	10,1%	24,5%	58,5%	11.003.482
B.	Agustus 2007						
1	LPU 1	66,4%	50,9%	35,1%	15,6%	2,6%	41.206.474
2	LPU (2-5)	11,8%	18,7%	23,2%	23,7%	11,7%	18.790.802
a.	LPU (2+4)	1,1%	1,1%	1,1%	1,6%	1,2%	1.169.498
	LPU 2	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,7%	994.614
b.	LPU 3	7,6%	11,6%	15,5%	17,2%	7,3%	12.368.729
c.	LPU 5	3,2%	6,1%	6,7%	4,9%	3,1%	5.252.581
3	LPU (6-9)	21,8%	30,4%	41,7%	60,6%	85,7%	39.932.935
a.	LPU 6	14,4%	19,0%	24,0%	28,9%	12,7%	20.554.650
b.	LPU 7	3,1%	5,4%	8,0%	8,4%	4,5%	5.957.711
c.	LPU 8	0,1%	0,4%	0,7%	3,1%	8,5%	1.399.490
d.	LPU 9	4,0%	5,6%	9,0%	20,2%	60,0%	12.019.984
C.	Agustus 2013						
1	LPU 1	61,2%	47,9%	30,2%	14,1%	3,1%	38.068.254
2	LPU (2-5)	13,9%	20,1%	26,1%	25,6%	10,9%	22.832.252
a.	LPU (2+4)	1,2%	1,5%	1,4%	1,9%	1,2%	1.671.712
	LPU 2	1,2%	1,4%	1,3%	1,4%	0,7%	1.420.767
b.	LPU 3	8,3%	11,5%	17,3%	19,0%	7,0%	14.883.817
c.	LPU 5	4,4%	7,2%	7,4%	4,8%	2,6%	6.276.718
3	LPU (6-9)	24,8%	31,9%	43,7%	60,3%	85,9%	49.903.535
a.	LPU 6	14,9%	18,7%	24,7%	29,8%	13,7%	23.737.236
b.	LPU 7	2,8%	4,1%	5,7%	5,8%	3,6%	5.040.849
c.	LPU 8	0,4%	0,5%	1,4%	4,6%	10,6%	2.912.418
d.	LPU 9	6,8%	8,6%	11,9%	20,1%	62,8%	18.713.032

Sumber: Diolah dari Sakernas, berbagai edisi

Tabel 5.15
Persentase Pekerja Berdasarkan Tamatan Pendidikan dan Kelompok Pulau
2001-2013

Lapangan Pekerjaan Utama	Pulau	Tahun					
		2001	2004	2007	2009	2011	2013
Sampai dengan Tamat SD	Sumatera	9.999.439	9.260.707	9.957.671	10.044.037	11.907.250	9.518.687
	Jawa	34.485.592	32.824.234	34.873.157	33.382.213	36.746.777	32.542.751
	Kalimantan	2.963.689	2.748.976	3.165.272	3.331.746	3.904.467	3.323.781
	Sulawesi	3.474.152	3.353.055	3.529.593	3.773.351	4.518.158	3.483.136
	Bali	1.005.123	983.935	958.939	967.698	1.149.120	886.949
	Maluku-Nusa Tenggara-Papua	3.635.609	3.797.250	3.884.298	4.049.485	4.649.078	4.159.450
Tamat SLTP	Sumatera	3.984.923	4.705.647	4.296.703	4.515.567	4.651.687	5.050.738
	Jawa	8.180.355	10.144.998	10.775.020	11.091.126	11.240.600	13.254.733
	Kalimantan	886.026	1.221.274	1.104.267	1.139.245	1.165.450	1.211.863
	Sulawesi	1.006.386	1.264.806	1.332.291	1.332.239	1.271.146	1.261.668
	Bali	258.559	280.650	390.456	336.668	364.459	345.180
	Maluku-Nusa Tenggara-Papua	747.684	955.510	931.467	975.982	909.969	1.015.050
Tamat SLTA Umum	Sumatera	2.214.611	2.715.668	3.102.748	3.656.950	8.751.578	5.030.690
	Jawa	5.418.620	6.305.937	6.846.771	7.727.816	10.072.829	10.388.048
	Kalimantan	514.072	665.569	761.165	874.960	1.184.650	1.214.099
	Sulawesi	707.267	821.993	999.325	1.125.712	1.437.514	1.471.918
	Bali	281.244	300.095	341.366	392.222	447.430	478.115
	Maluku-Nusa Tenggara-Papua	471.342	576.504	695.654	804.470	1.106.549	1.180.214
Tamat SLTA Khusus	Sumatera	1.277.573	1.184.326	1.167.713	1.694.682	2.931.245	2.153.356
	Jawa	3.804.562	3.673.811	3.578.700	5.304.964	5.354.173	7.428.613
	Kalimantan	341.421	313.851	319.901	377.116	493.312	505.537
	Sulawesi	382.065	362.301	352.372	408.695	505.678	515.404
	Bali	128.369	134.495	136.454	172.504	243.098	273.651
	Maluku-Nusa Tenggara-Papua	272.324	234.031	233.516	282.737	366.415	375.224

Tamat D-1/D-2/D-3	Sumatera	383.677	379.467	562.254	620.664	1.153.855	730.017
	Jawa	1.208.046	1.292.917	1.546.079	1.602.414	1.540.822	1.686.033
	Kalimantan	92.973	108.330	143.566	160.570	194.599	176.123
	Sulawesi	127.484	140.466	153.508	183.425	233.771	208.611
	Bali	57.708	61.690	70.807	83.378	95.419	117.273
	Maluku-Nusa Tenggara-Papua	116.919	75.318	121.379	138.365	199.737	193.162
Tamat Universitas	Sumatera	422.756	495.603	627.461	797.292	1.810.707	1.705.992
	Jawa	1.494.297	1.769.086	2.290.424	2.652.151	2.892.239	3.219.633
	Kalimantan	88.972	149.100	167.472	205.218	336.487	455.223
	Sulawesi	193.580	242.798	266.961	348.643	546.725	789.188
	Bali	67.219	74.300	84.112	104.648	149.847	214.211
	Maluku-Nusa Tenggara-Papua	112.779	103.338	161.375	211.710	406.426	501.565

Sumber: Diolah dari Sakernas, berbagai edisi

Tabel 5.16
Persentase Pekerja Berdasarkan Pulau dan Lapangan Pekerjaan
2001-2013

Lapangan Pekerjaan Utama	Pulau	Tahun					
		2001	2004	2007	2009	2011	2013
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	Sumatera	10.387.929	10.728.919	10.193.043	10.597.796	10.615.877	10.421.899
	Jawa	19.684.624	19.297.803	20.123.012	19.749.603	17.663.828	17.036.805
	Kalimantan	2.491.973	2.723.379	2.920.179	3.094.501	3.110.533	2.903.831
	Sulawesi	3.363.777	3.459.683	3.580.870	3.589.314	3.387.190	3.200.042
	Bali	619.591	681.320	741.091	704.282	556.615	545.827
	Maluku-Nusa Tenggara-Papua	3.196.014	3.716.915	3.675.279	3.876.344	3.994.872	4.049.850
Pertambangan dan Penggalian	Sumatera	134.689	208.516	252.053	294.746	374.472	376.900
	Jawa	561.613	515.223	400.000	422.769	434.465	399.586
	Kalimantan	151.049	168.999	205.940	245.752	376.026	405.895
	Sulawesi	18.576	42.639	48.775	83.934	138.906	112.876
	Bali	8.462	18.805	8.544	8.156	12.635	9.066
	Maluku-Nusa Tenggara-Papua	76.010	80.534	79.302	99.876	128.872	116.444

Industri Pengolahan	Sumatera	1.199.889	1.014.403	1.371.556	1.534.176	1.683.786	1.580.224
	Jawa	9.294.003	8.808.382	9.604.410	9.864.699	11.382.123	11.868.020
	Kalimantan	477.855	353.092	341.971	295.184	322.450	321.824
	Sulawesi	320.565	317.660	337.272	429.778	481.750	419.978
	Bali	302.681	190.420	289.108	293.853	290.132	320.555
	Maluku-Nusa Tenggara-Papua	491.129	386.541	424.412	422.110	381.840	373.216
Listrik, Gas, dan Air	Sumatera	35.288	50.216	33.121	43.527	57.555	57.362
	Jawa	80.808	140.078	109.681	128.331	126.820	140.016
	Kalimantan	7.204	10.816	9.293	10.933	19.501	14.334
	Sulawesi	7.837	7.366	10.180	17.520	17.608	19.271
	Bali	2.562	8.090	3.912	6.838	6.859	9.155
	Maluku-Nusa Tenggara-Papua	7.022	11.731	8.697	15.905	11.293	10.807
Bangunan	Sumatera	650.932	672.048	896.730	1.005.750	1.180.342	1.204.252
	Jawa	2.564.093	3.111.861	3.484.820	3.469.040	3.978.800	3.784.819
	Kalimantan	129.469	227.225	238.385	279.398	329.790	415.366
	Sulawesi	182.840	264.208	294.348	363.843	422.317	431.590
	Bali	133.983	104.595	128.676	142.370	185.705	211.093
	Maluku-Nusa Tenggara-Papua	176.237	160.165	209.602	226.416	242.857	274.190
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	Sumatera	2.970.566	2.995.064	3.315.462	3.810.826	4.109.048	4.225.079
	Jawa	11.705.294	13.113.415	13.990.848	14.640.629	15.105.529	15.589.326
	Kalimantan	791.739	847.872	975.300	1.041.493	1.189.452	1.165.675
	Sulawesi	954.770	1.033.595	1.118.049	1.239.368	1.349.079	1.283.254
	Bali	408.022	489.750	462.517	488.976	596.527	628.585
	Maluku-Nusa Tenggara-Papua	638.738	639.460	692.474	726.531	853.042	845.317
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	Sumatera	754.602	947.127	1.091.903	1.095.877	767.344	915.322
	Jawa	3.000.564	3.618.942	3.822.725	3.925.542	3.127.252	3.106.304
	Kalimantan	200.323	266.817	254.715	259.599	235.457	251.741
	Sulawesi	245.369	313.952	408.169	426.336	404.286	384.735
	Bali	75.603	86.245	77.373	85.991	81.744	72.764
	Maluku-Nusa Tenggara-Papua	171.818	247.444	303.926	324.640	289.832	309.983

Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, dan Jasa Perusahaan	Sumatera	663.504	722.902	179.316	212.990	518.114	461.114
	Jawa	2.334.339	2.145.890	996.177	1.051.439	1.814.379	1.976.600
	Kalimantan	221.719	235.138	60.961	60.706	119.363	141.724
	Sulawesi	332.670	405.243	72.057	73.942	116.923	151.076
	Bali	79.162	94.730	52.936	46.185	83.281	93.368
	Maluku-Nusa Tenggara- Papua	232.417	204.222	38.043	41.334	82.102	88.536
Jasa Kemasya- rakatan, Sosial, dan Perorangan	Sumatera	1.485.580	1.402.223	2.381.346	2.733.504	3.419.577	3.537.709
	Jawa	5.366.134	5.259.389	7.378.478	8.508.632	9.594.733	10.939.938
	Kalimantan	415.822	373.762	654.899	801.289	965.633	977.099
	Sulawesi	464.530	341.073	764.330	948.030	1.316.964	1.353.253
	Bali	168.156	161.210	244.977	280.467	391.376	383.484
	Maluku-Nusa Tenggara- Papua	367.272	294.939	595.954	729.593	957.576	1.021.549

Sumber: Diolah dari Sakernas, berbagai edisi

Tabel 5.17
Penduduk Berdasarkan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki per Pulau
(2004, 2007, 2010, 2013)

		Jawa	Sumatera	Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Maluku	Papua	Sulawesi
2007	Tidak punya ijazah SD	27.785.229	11.378.381	3.016.194	3.104.271	531.274	554.091	3.887.953
	SD	31.530.877	10.022.612	2.489.918	2.572.454	476.473	407.238	3.356.665
	Madrasah Ibtidaiyah	1.842.357	287.067	50.445	152.498	7.366	6.078	36.157
	SMP Umum/ Kejuruan	14.966.612	6.161.547	1.085.495	1.435.461	284.914	253.720	1.895.781
	Madrasah Tsanawiyah	2.457.811	751.603	157.063	259.751	14.232	5.794	120.419
	SMA	10.823.873	4.952.547	1.064.311	1.199.722	265.545	219.613	1.714.806
	Madrasah Aliyah	1.156.340	502.249	107.519	141.407	12.922	7.534	118.654
	SMK	5.541.730	1.851.690	298.090	382.142	59.786	82.934	400.122
	Program D-1/D-2	803.719	331.078	95.039	92.454	19.816	9.396	119.113
	Program D-3	1.298.297	414.035	78.170	100.484	11.962	16.963	110.665
	Program D-3/S-1	3.152.623	996.517	250.461	246.028	44.531	53.571	432.207
	S-2/S-3	228.588	44.833	16.621	13.909	1.385	2.445	26.912

		Jawa	Sumatera	Bali & Nusa Tenggara	Kalimantan	Maluku	Papua	Sulawesi
2010	Tidak punya ijazah SD	27.311.273	11.263.755	3.129.576	3.378.449	572.952	624.618	4.181.761
	SD/SDLB	32.601.953	10.583.195	2.657.768	2.850.161	550.937	493.511	3.610.895
	Madrasah Ibtidaiyah	1.541.480	184.358	34.902	116.371	7.380	2.478	34.155
	Paket A	93.375	19.394	15.322	9.660	988	2.789	8.075
	SMP Umum/ SMPLB	16.645.599	7.004.655	1.254.556	1.620.648	335.428	402.440	2.085.864
	Madrasah Tsanawiyah	2.175.717	601.371	137.619	201.616	10.108	2.142	115.343
	Paket B	116.995	24.170	18.185	19.825	709	3.845	25.322
	SMA/SMLB	13.611.466	6.215.440	1.307.104	1.461.957	359.081	381.518	2.014.578
	Madrasah Aliyah	996.768	381.740	99.070	121.863	8.887	1.548	81.925
	SMK	6.024.177	1.720.353	317.357	391.863	63.055	90.072	453.841
	Paket C	79.662	28.796	14.241	18.198	2.316	3.787	34.185
	Program D-1/D-2	690.243	334.486	119.011	95.225	30.639	15.841	127.504
	Program D-3	1.559.668	512.382	94.218	123.347	17.171	33.835	141.491
	Program D-4/S-1	3.829.037	1.260.670	343.245	329.051	68.657	96.482	555.558
	S-2/S-3	337.200	77.665	20.124	26.789	3.521	5.854	47.367
2013	Tidak punya ijazah SD	29.088.672	11.859.342	3.329.469	3.443.353	639.125	780.783	4.425.921
	SD/SDLB	31.098.701	10.580.868	2.704.159	3.035.835	552.978	579.628	3.682.208
	Madrasah Ibtidaiyah	1.793.270	189.418	56.110	123.653	3.357	1.738	31.334
	Paket A	112.945	41.352	16.490	11.018	623	806	10.339
	SMP Umum/ SMPLB	17.361.018	7.217.102	1.334.108	1.728.660	341.639	380.867	2.139.834
	Madrasah Tsanawiyah	2.314.158	650.196	371.611	198.110	10.334	3.682.131	135.284
	Paket B	201.442	46.547	39.762	27.545	937	1.925	32.891
	SMA/SMLB	13.276.937	7.119.765	2.865.839	1.714.586	429.620	587.608	2.124.031
	Madrasah Aliyah	1.117.128	463.638	218.094	143.829	16.703	12.895	104.462
	SMK	6.254.320	2.000.175	951.828	428.403	55.497	105.348	488.267
	Paket C	174.965	50.443	49.246	37.420	2.692	5.360	61.314
	Program D-1/D-2	439.907	221.321	144.520	56.175	21.426	17.299	83.276
	Program D-3	1.353.646	539.411	241.021	130.115	20.726	35.046	144.963
	Program D-4/S-1	3.752.099	1.412.793	627.379	383.075	90.883	137.907	632.986
	S-2/S-3	332.110	100.261	60.261	33.429	7.786	12.993	54.611

Sumber: BPS, diolah

Tabel 5.18
Angka Partisipasi Murni SD, SMP, SMA (%)

No	Provinsi	SD					SMP					SMA				
		2001	2004	2007	2009	2011	2001	2004	2007	2009	2011	2001	2004	2007	2009	2011
1	Aceh	-	95,88	95,7	96,95	92,57	-	79,98	76,4	77,4	74,76	-	62,04	61,8	62,12	61,43
2	Sumatera Utara	94,9	93,61	93,9	94,46	91,46	72,3	73,02	73,6	74,21	67,96	50,8	56,65	54,8	55,3	57,83
3	Suatera Barat	93,8	93,64	94,5	94,75	93,47	62,5	69,55	67,2	67,61	67,1	46,7	53,13	54,2	54,5	54,05
4	Riau	94,4	93,64	94,8	95,52	91,67	65	69,65	70	70,57	65,98	35,6	47,73	51,4	51,78	53,07
5	Jambi	93,5	93,46	93,9	95,05	92,01	60,44	65,69	65,8	66,42	73,34	34,7	43,34	44,2	44,71	54,25
6	Sumatera Selatan	92,2	93,13	92,7	93,61	92,69	58,3	64,81	65	65,86	66,54	35,5	39,48	42,6	43,01	48,55
7	Bengkulu	93,9	94,72	94,2	94,98	89,79	59,9	67,02	68,7	69,84	64,12	40,2	49,01	48,5	48,99	45,34
8	Lampung	94,1	92,73	94	94,79	91,12	60,6	63,65	68,3	69,17	60,19	34,2	35,66	40,6	41,43	40,91
9	Bangka Belitung	90,9	90,02	91,6	92,52	92,75	44,9	56,38	52,2	53,1	68,55	32,8	38,15	37,1	38,13	49,91
10	Kep. Riau	-	-	93,5	93,92	91,47	-	-	71,3	72,53	66,56	-	-	52,5	53,42	45,06
11	DKI Jakarta	92,2	91,87	93,3	94,07	89,79	71,6	76,08	71,3	72,02	68,85	52,9	61,25	49,6	50,43	49,27
12	Jawa Barat	93,4	93,41	94,2	94,56	92,26	56,3	61,74	66,9	67,91	69,57	31,7	37,18	37,9	38,59	42,5
13	Jawa Tengah	94,5	93,32	94,8	95,63	92,18	64,9	67,82	68,8	69,67	71,12	37,6	41,67	43,8	44,53	46,17
14	D. I. Yogyakarta	95,5	92,55	93,5	94,38	90,19	76,3	77,37	74,5	75,34	69,77	64,6	61,51	57,9	58,69	47,34
15	Jawa Timur	94,1	93,71	94,5	95,27	91,98	62,9	67,1	69	69,9	69,15	36,8	41,94	47,6	48,26	59,68
16	Banten	90,5	94,12	93	94,07	91,88	55,9	63,75	58,4	59,69	71,77	31,1	39,68	38,4	38,77	49,32
17	Bali	92,7	93,48	94,4	94,99	90,39	69,8	69,37	66,6	67,38	69,16	49,8	54,11	55,6	56,48	60,54
18	NTB	92,6	92,42	94,1	94,75	92,69	56,6	61,7	70,7	71,32	76,7	34,2	38,63	48	48,51	53,93
19	NTT	87,9	90,79	91,6	92,46	92,13	36,8	43,26	49,5	50,21	56,74	20	28,27	33,6	34,15	40,84
20	Kalimantan Barat	91,1	93,11	93,5	93,96	92,18	45,2	53,28	54,6	55,45	58,75	24,4	31,51	36,1	36,4	36,28
21	Kalimantan Tengah	95,4	95,1	95,4	96,14	92,25	54,1	65,15	60,1	60,59	66,35	25,3	38,82	39	39,27	43,93
22	Kalimantan Selatan	92,9	93,19	94	94,49	92,01	54,4	59,27	59,3	60,56	65,79	30,6	35,57	35,2	35,71	43,01
23	Kalimantan Timur	91,7	92,87	93,2	93,74	92,23	63,1	70,2	71,1	72,06	72,4	41,8	52,42	52,7	53,1	54,58
24	Sulawesi Utara	93,2	88,26	90,8	91,9	85,91	71,4	67,87	65,9	66,69	61,22	45,4	50,71	50,2	50,46	50,55
25	Sulawesi Tengah	90,9	91,44	92	92,98	90,04	53,9	59,45	59	60,22	59,17	22,6	36,33	39	39,52	44,33
26	Sulawesi Selatan	88,8	90,64	92,1	92,27	89,99	53	57,41	60,4	61,74	61,74	35	38,39	41,6	42,03	46,99
27	Sulawesi Tenggara	90,6	90,18	93,6	94,71	89,48	59,6	64,02	65,8	66,45	65,29	37,2	40,17	47,3	47,9	47,89

No	Provinsi	SD					SMP					SMA				
		2001	2004	2007	2009	2011	2001	2004	2007	2009	2011	2001	2004	2007	2009	2011
28	Gorontalo	86,4	88,85	90,2	90,4	89,35	37,4	49,27	52,2	53,05	60,34	19,6	28,12	37,7	38,47	46,83
29	Sulawesi Barat	-	-	92,2	92,77	88,8	-	-	52,2	53,35	64,31	-	-	33	33,41	52,16
30	Maluku	-	90,92	93,5	94,38	88	-	68,06	70,1	71,48	64,33	-	56,39	59,2	59,58	52,64
31	Maluku Utara	-	93,8	91,9	93,39	89,95	-	64,17	64,7	65,49	65,92	-	44,08	51,3	51,74	51,88
32	Papua Barat	-	-	90,7	91,25	70,13	-	-	48,8	49,03	46,03	-	-	43,2	43,55	32,45
33	Papua	-	85,21	80,9	76,09	88,28	-	47,78	48,6	49,08	57,66	-	30,39	35,7	35,77	47,89

Sumber: Diolah dari Statistik Indonesia, berbagai edisi

Kotak 5.1 Data Sakernas: Sebuah Catatan

Data ketenagakerjaan didasarkan pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Namun, dalam penggunaan dan interpretasi data terkait, perlu kehati-hatian, terutama soal tingkat konsistensinya, dibandingkan dengan data-data lainnya seperti data sensus penduduk. Dalam hal ini, analisis data Sakernas juga mempertimbangkan perubahan tren yang cukup jauh berbeda, terutama ketika diperbandingkan dengan data sensus penduduk.

Kelemahan data Sakernas terkait dengan inkonsistensi angka perkembangan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas (**Tabel 5.5**). Data dianggap inkonsisten akibat nilai perubahan total jumlah penduduk yang jauh berbeda dibandingkan dengan data proyeksi penduduk (2000-2025; 2005-2015; 2010-2035) terutama pada kurun waktu 2010-2013. Informasi tambahan mengenai asumsi *total fertility rate* dalam proyeksi penduduk disajikan dalam tabel berikut:

Proyeksi Penduduk	TFR
2010-2015	2.442
2015-2020	2.326
2025-2030	2.096
2030-2035	1.990

Disamping itu, perubahan (Δ) jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di desa antara periode 2010-2013 sebesar -9.209,6 ribu orang yang dianggap sangat berbeda dibanding perubahan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk berusia berumur 15 tahun ke atas di desa berdasarkan data Sakernas sebelum 2013. Bisa juga karena peningkatan urbanisasi (peningkatan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas di kota) sehingga berdampak terhadap penurunan jumlah penduduk desa berusia berumur 15 tahun ke atas. Meskipun dianggap memiliki kelemahan, data Sakernas pada dasarnya masih dapat diterima karena masih mampu memperlihatkan kecenderungan.

Mengenai data angkatan dan profil ketenagakerjaan, kajian ini terlebih dahulu mengidentifikasi konsistensi dari tren data, kemudian melakukan pendekatan untuk menginterpretasi data-data tersebut. Namun, dengan ketersediaan data seperti ini, perlu kehati-hatian dalam pemilihan periode sebagai *baseline*, terutama apabila polanya cukup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya tanpa ada cukup penjelasan mengenai kebijakan atau periode khusus pada tahun tersebut.

Riwayat Penulis

MOHAMMAD ARSJAD ANWAR

Mohammad Arsjad Anwar menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Ekonomi (kini Fakultas Ekonomi dan Bisnis/FEB) Universitas Indonesia pada 1962. Selepas memperoleh gelar sarjana, penulis melanjutkan pendidikan master di bidang Business Administration di University of California di Berkeley pada 1966. Selanjutnya penulis meraih gelar doktor dari FEB UI pada 1983 dengan predikat *summa cum laude*. Pada 1985, ia diangkat sebagai Guru Besar Tetap FEB UI dengan pidato pengukuhan “Transformasi Struktur Produksi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Perencanaan Pembangunan”. Sebagai pengajar, kariernya dimulai menjadi Asisten Dosen FEB UI (1960). Setelah itu, penulis menjabat sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik (1984-1988), Koordinator Pascasarjana Ekonomi FEUI (1984-1995), Dekan FEB UI (1988-1994), aktif di Senat UI, ikut serta dalam Konsorsium Ilmu Ekonomi (1994-1999), dan menjadi anggota Dewan Perguruan Tinggi (1994-1999). Dia juga mengajar di SESKOAD, SESKOAL, dan LEMHANAS.

Di bidang penelitian, Prof. Mohammad Arsjad Anwar pernah menjabat sebagai Koordinator Penelitian, kemudian Wakil Direktur, dan Direktur LPEM-FEB UI. Di pemerintahan, penulis pernah ditunjuk oleh Prof. Widjojo Nitisastro sebagai anggota Policy Research Team dan membantu Litbang di Departemen Perdagangan. Penulis juga pernah menjadi konsultan Menteri Perindustrian, Staf Ahli Bappenas Bidang Pengkajian Ekonomi, Deputi Bidang Ekonomi Keuangan pada Menko Ekuin RI, dan setelah pensiun menjadi penasihat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas. Atas pengabdianya tersebut, ia dianugerahi Bintang Mahaputra pada 1999.

SOEKARNO WIROKARTONO

Soekarno Wirokartono pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian. Dia pun terlibat dalam serangkaian konsultasi internasional untuk Bank Dunia sebagai penasihat ekonomi senior, UNDP, SEADI, dan lain-lain. Fokus riset dan konsultasinya meliputi iklim usaha, pengeluaran publik, dan manajemen keuangan publik. Ia mendapatkan gelar doktor di bidang ekonomi dari Claremont Graduate School, Amerika Serikat, pada 1985.

KIKI VERICO

Kiki Verico bekerja sebagai dosen ilmu ekonomi di FEB UI. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di FEB UI pada 2000, lalu bekerja sebagai asisten dosen ilmu ekonomi di almaternya dan asisten peneliti di LPEM-FEB UI. Ia menyelesaikan pendidikan S-2 di program International Master in Regional Integration (IMRI) di University of Malaya (Malaysia) dan Universidad Autonoma de Madrid (Spanyol) pada 2005. Sejak itu pula ia diangkat sebagai dosen tetap di FEB UI. Pada 2009, ia melanjutkan studi S-3 di bidang International Studies (Regional Economic Integration) di Waseda University, Tokyo, dan menyelesaikan pendidikannya pada awal 2013. Setelah kembali ke tanah air, ia menjabat sebagai Kepala Kajian Bidang Perdagangan Internasional LPEM-FEB UI.

Beberapa karya akademik Kiki dapat ditemukan di sejumlah jurnal internasional seperti *The Asian Journal of Agriculture and Development (AJAD)*, *Bulletin of Indonesia Economic Studies (BIES)*, *Economics and Finance in Indonesia (EFI)*, *Journal of Economic Cooperation and Development*, dan bab dalam buku. Kiki juga menulis opininya di media massa seperti *The Jakarta Post*, *The Jakarta Globe*, *Indonesia Finance Today*, *Investor Daily*, *Media Indonesia*, *Seputar Indonesia*, *Majalah Gatra*,

Majalah Tempo, dan di blog-blog resmi milik universitas di luar negeri seperti *The Indonesia Project of the ANU* dan *GoLive of The Adelaide University*.

VID ADRISON

Vid Adrison adalah dosen di Departemen Ekonomi FEB UI dan seorang peneliti senior di LPEM-FEB UI. Vid meraih gelar sarjana dari FEB UI pada 1999. Pada 2002, ia mendapat gelar MA dalam bidang ekonomi dari Andrew Young School of Policy Studies, GSU, Atlanta, Amerika Serikat. Pada 2008, ia memperoleh Ph.D di bidang ekonomi dari universitas yang sama.

Sejak bergabung kembali di LPEM-FEB UI, ia terlibat dalam riset tentang ekonomi lingkungan, keuangan publik, ekonomi industri, penelitian iklim investasi, ekonomi perdagangan, dan penelitian pemerintahan. Selain aktif di LPEM-FEB UI, ia masih aktif mengajar Ekonometrika dan Mikroekonomi Lanjutan di almamaternya.

DENDI RAMDANI

Dendi Ramdani adalah pengajar FEB UI sekaligus peneliti LPEM-FEB UI. Dia mendapat *research grant* dari BELSPO (*Belgian Science and Policy*) sebesar 160.000 Euro untuk menjadi peneliti *post-doctoral* selama 3,5 tahun. Dia mendapat gelar Ph.D di bidang Applied Economics dari University of Antwerp, Belgia, pada 2013. Sebelumnya, ia meraih gelar M.Sc. bidang ekonomi dan ekonometrika dari University of Groningen, Belanda, pada 2007. Ia pun mendapat gelar M.S.E dari program pascasarjana Ilmu Ekonomi FEB UI pada 2005. Adapun gelar sarjana ekonomi diraih pada 1999 dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB UI.

JAHEN FACHRUL REZKI

Jahen Fachrul Rezki menyelesaikan studi S-1 jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada 2011. Dia melanjutkan studi di Department of Economics and Related Studies (DERS) The University of York, United Kingdom dengan spesialisasi di bidang Emerging Market Macroeconomics

dan Development Economics. Saat ini aktif di penelitian yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan dan perdagangan di LPEM-FEB UI. Semasa mahasiswa penulis aktif di BO Economica FEUI—lembaga pers kampus tertua di UI.

I KADEK DIAN SUTRISNA ARTHA

Kadek adalah dosen di Departemen Ekonomi FEB UI dan seorang peneliti senior di LPEM-FEB UI. Meraih gelar sarjana ekonomi dari FEB UI dengan predikat lulusan terbaik pada 2001, dia melanjutkan mengambil master dalam Departemen Ekonomi, Vrije Universiteit di Amsterdam, Belanda. Pada 2006, ia memperoleh gelar master di bidang ekonomi dengan *cum laude*. Pada 2012, ia mendapat Ph.D di bidang ekonomi dari Universitas Groningen, Belanda. Dia menulis disertasi tentang “Krisis Keuangan: Dampak pada Central Bank Kemerdekaan, Output, dan Inflasi”.

Sejak bergabung LPEM-FEB UI, ia terlibat dalam penelitian tentang ekonomi makro, perbankan, ekonomi moneter, dan perdagangan internasional. Dia juga mengajar Makroekonomi Lanjutan dan Ekonomi Moneter. Pada 7 Maret 2014, ia resmi diangkat sebagai Kepala LPEM-FEB UI. Ia juga membantu Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai ekonom.

RIATU MARIATUL QITBHIYYAH

Riatu Mariatul Qibthiyah menerima gelar Ph.D di bidang ekonomi dari Georgia State University, Atlanta, Amerika Serikat, pada 2008. Sebelumnya, ia mendapatkan gelar master dari universitas yang sama pada 2002. Gelar sarjana ekonomi diraih dari FEB UI pada 1999. Sebelum menjadi Wakil Direktur LPEM Bidang Penelitian pada 2014, dia adalah Ketua Program Sarjana Ekonomi FEB UI (2009-2013)

Riatu adalah ahli di bidang keuangan publik yang telah terlibat dalam berbagai penelitian dan proyek evaluasi kebijakan dan *monitoring*, desain skema fiskal terkait, transfer antarpemerintah, dan penilaian dampak regulasi. Selama tiga tahun terakhir, dia adalah anggota dari TADF (Bantuan Teknis Desentralisasi Fiskal) untuk

Menteri Keuangan. Dia juga melakukan penelitian terkait dengan kebijakan pendidikan tinggi.

ABDUL MALIK

Abdul Malik memperoleh gelar doktor di bidang ekonomi dari University of Michigan, Ann Arbor, pada 1994 dan sebelumnya di kampus yang sama memperoleh gelar MA di bidang Applied Economics (1989). Ia mendapatkan gelar sarjana teknik sipil dari Institut Teknologi Bandung (1984). Berbagai posisi telah ditempati penulis di pemerintahan sejak 1986 hingga sekarang. Di antaranya, pernah menjadi Kepala Biro Agama dan Pendidikan Bappenas (Januari 2000-Agustus 2000), Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi (Mei 2000-Desember 2001), hingga sekarang aktif sebagai konsultan di bidang keuangan publik, pengelolaan keuangan negara, kebijakan pendidikan, dan keuangan dan pembiayaan pendidikan.

Selain bekerja di bidang pemerintahan, ia pernah menjadi pengajar pada program S-1 di FEB UI dan Universitas Indonusa Esa Unggul. Ia pun mengajar di program S-2 di Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang dan Program Studi Manajemen Bisnis Universitas Bhayangkara, Jakarta.

Sejak Maret 2011, penulis ditunjuk sebagai Penasehat Teknis Inti (Core Technical Advisor), Kemitraan untuk Penguatan Analisis Kebijakan dan Pengembangan Kapasitas (Analytical and Capacity Development Partnership), Kemendikbud-Kemenag-Bappenas, dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

DIAZ ERLANGGA

Diaz Erlangga dilahirkan di Depok, Jawa Barat. Menyelesaikan kuliah di Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UI pada 2014 dengan predikat *cum laude*. Peraih medali perunggu Olimpiade Sains Nasional (OSN) Ekonomi SMA 2009 dan saat ini menjadi pengajar OSN Ekonomi siswa-siswi SMA di wilayah Bodetabek. Diaz pernah menjadi asisten dosen terbaik Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI selama dua periode. Ia pun berpengalaman sebagai asisten dosen pada mata kuliah Pengantar Ekonomi 1, Matematika Ekonomi dan Bisnis, Mikroekonomi 1, Makroekonomi 1, dan Perekonomian Indonesia. Penulis memiliki ketertarikan pada bidang Ekonomi Energi dan Ekonomi Sumber Daya Alam. Ia pun pernah menjadi *runner-up* dalam kompetisi pembuatan video mengenai *Renewable Energy* yang diselenggarakan oleh ADB di Manila, Filipina, pada 2012.

